



LKJIP

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

TAHUN 2025

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

Jl. D.I. Panjaitan No 07, Setabelan, Banjarsari,
Kota Surakarta
Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintahan selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Penyusunan LKjIP tahun 2025 ini menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi di masing masing perangkat Daerah (PD) serta keberhasilan capaian sasaran saat ini, untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang akan datang. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip good gaverment, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilata di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP tahun 2025 ini kami susun semoga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Surakarta, Januari 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**
DWI ARIYATNO, S.STP., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197803091997111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Pendidikan Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban / akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Surakarta, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan. LKjIP ini menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan selama Tahun Anggaran 2025 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. LKjIP ini juga merupakan instrumen evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, kinerja Dinas Pendidikan diarahkan pada tiga sasaran strategis. Sasaran pertama, terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif, menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercapai sesuai target yaitu 11,26 (100%), sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) terealisasi 15,08 dari target 15,38 (98,05%), yang menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan akses pendidikan masyarakat.

Sasaran kedua Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Non-Formal (PNF).

Secara umum, seluruh indikator pada sasaran ini memperoleh predikat Sangat Berhasil. APK usia 3–6 tahun terealisasi 58,76% dari target 65,90% dengan capaian 89,17%. APS usia 7–12 tahun mencapai 99,52% dari target 99,96% (capaian 99,54%), dan APS usia 13–15 tahun terealisasi 95,50% dari target 99,61% (capaian 95,87%). Partisipasi pendidikan kesetaraan usia 7–18 tahun mencapai 94,17% dari target 94,80% (capaian 99,34%).

Pada aspek tata kelola dan mutu layanan, seluruh indikator mencapai 100% bahkan melampaui target, yaitu penerapan kurikulum muatan lokal, kepemilikan

izin operasional satuan pendidikan, pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa/Solo, serta ketersediaan guru yang mencapai 97,99% dari target 89,37% (capaian 109,65%). Hal ini menunjukkan penguatan tata kelola pendidikan yang efektif dan merata

Sasaran ketiga, meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan serta pencapaian kinerja perangkat daerah, Nilai Maturitas Kelembagaan terealisasi sebesar 52 dari target 42 atau mencapai 123,81% dengan predikat Sangat Berhasil, capaian ini mencerminkan penguatan tata kelola, perencanaan berbasis kinerja, serta sistem pengendalian internal yang semakin efektif.

Dari sisi pengelolaan keuangan, pagu anggaran sebesar Rp 543.545.224.123,00 terealisasi Rp 517.044.807.883,00 atau 93,88% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 33.723.764.295,00 atau 6,12%. Tingkat serapan anggaran tersebut menunjukkan pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta selaras dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Surakarta berada pada kategori Sangat Berhasil. Dari 3 sasaran terdapat 11 indikator, 6 indikator tercapai tidak maksimal, 4 indikator tercapai sesuai target, dan 1 indikator tercapai melebihi target. Ke depan, penguatan akan difokuskan pada peningkatan partisipasi pendidikan usia dini dan jenjang menengah guna memastikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Surakarta secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025 menunjukkan kontribusi yang positif dalam mendukung Peningkatan kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Surakarta. Hasil evaluasi kinerja ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program pada tahun berikutnya guna terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif melalui layanan pendidikan.

Melalui penyusunan laporan kinerja ini diharapkan seluruh pihak pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta semakin memperkuat komitmen untuk

mengembangkan budaya kerja yang berorientasi hasil, serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang transparan akuntabel efektif dan berdaya saing tinggi

Demikian ihktisar eksekutif ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam penyampaian informasi kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Gambaran Umum Organisasi.....	10
B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah.....	22
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
A. Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	26
B. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	28
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025.....	47
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	47
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif.....	49
a. Progres capaian kinerja tahun 2025.....	49
b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	50
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026.....	51
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	53
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan.....	54
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (<i>man, money, method</i>).....	56
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.....	60
Sasaran Dinas Pendidikan : Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang disediakan untuk Masyarakat Surakarta.....	62
a. Progres Capaian Kinerja Tahun 2025.....	62
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	69
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 Dengan Target RPJMD Tahun 2021–2026.....	73
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	81
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan	

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	83
f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (<i>Man, Money, Method</i>)....	89
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	113
Sasaran Dinas Pendidikan : Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien.....	129
a. Progres Capaian Kinerja Tahun 2025	129
b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	130
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 Dengan Target RPJMD Tahun 2021–2026.....	131
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	132
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	132
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (<i>man, money, method</i>).....	134
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	140
B. Realisasi Anggaran.....	143
C. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	151
D. Capaian Kinerja Regulasi.....	156
E. Pencapaian Lainnya.....	157
BAB IV PENUTUP	159
A. Kesimpulan	159
B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan.....	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025.....	17
Tabel 1. 2. Data Aset Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025.....	19
Tabel 1. 3. Data Nilai Aset Tetap Dinas Pendidikan.....	21
Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021–2026	26
Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021–2026	27
Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2025	29
Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025	45
Tabel 2. 5. Program dan Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025	46
Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Tahun 2025	47
Tabel 3. 2. Predikat Capaian Kinerja	48
Tabel 3. 3. Progres Capaian Kinerja Tiwulanan Tahun 2025	49
Tabel 3. 4 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan s.d. Tahun 2025	50
Tabel 4. 1. Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Aktivitas Prioritas Tahun 2027	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan.....	52
Gambar 3. 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan TW I - TW IV	52
Gambar 3. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	56
Gambar 3. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	56
Gambar 3. 5. Capaian Kinerja Indikator APK 3-6 Tahun 2025.....	67
Gambar 3. 6. Capaian Kinerja Indikator APS 7-12 Tahun	67
Gambar 3. 7. Capaian Kinerja Indikator APS 13-15 Tahun	68
Gambar 3. 8. Capaian Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7–18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	69
Gambar 3. 9. Capaian Indikator satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Tahun 2025.....	70
Gambar 3. 10. Capaian Indikator Guru yang tersediakan.....	71
Gambar 3. 11. Capaian Indikator Guru yang tersediakan.....	71
Gambar 3. 12. Capaian Indikator Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa/Solo	72
Gambar 3. 13. Perbandingan Capaian APK 3-6 tahun Tahun 2021 - 2025	73
Gambar 3. 14. Perbandingan Capaian APS 7-12 tahun Tahun 2021 - 2025	73
Gambar 3. 15. Perbandingan Capaian APS 13-15 tahun Tahun 2021 - 2025	74
Gambar 3. 16. Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan Usia 7–18 Tahun 2021 - 2025.....	74
Gambar 3. 17. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Tahun 2021 - 2025.....	75
Gambar 3. 18. Perbandingan Capaian Indikator guru yang tersediakan di satuan pendidikan Tahun 2021 - 2025	75
Gambar 3. 19. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Satuan Pendidikan Yang Telah Memiliki Izin Operasional 2021 - 2025	76
Gambar 3. 20. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa 2021 - 2025.....	76
Gambar 3. 21. Perbandingan realisasi APK 3-6 Tahun sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026.....	79
Gambar 3. 22. Perbandingan realisasi APS 7-12 Tahun sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026	79
Gambar 3. 23. Perbandingan realisasi APS 13-15 Tahun sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026	80
Gambar 3. 24. Perbandingan realisasi Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026	81
Gambar 3. 25. Perbandingan realisasi Indikator Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026	82
Gambar 3. 26. Perbandingan realisasi Indikator Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal dengan RPJMD	82
Gambar 3. 27. Perbandingan realisasi Indikator Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional Tahun 2025 dengan RPJMD	83
Gambar 3. 28. Perbandingan Capaian Persentase Satuan Pendidikan Yang Telah Mengembangkan Bahasa Dan Sastra Jawa/Solo Tahun 20225 Dengan RPJMD.....	83
Gambar 3. 29. Perbandingan Realisasi APS 7-12 Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	84

Gambar 3. 30. Perbandingan Realisasi APS 13-15 Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	86
Gambar 3. 31. Program/Kegiatan Responsif Gender	129
Gambar 3. 32. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah.....	133
Gambar 3. 33. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026.....	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1) Dasar hukum dan kedudukan

Dinas Pendidikan Kota Surakarta dibentuk sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai kewenangan otonomi daerah dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta. Pembentukan dan kedudukan Dinas Pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai bagian dari struktur organisasi pemerintahan kota dan **Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah** yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan organisasi dan kerja dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

2) Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependidikan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas. Tugas utama ini mencakup kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan kesetaraan, pengelolaan kurikulum, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan perizinan pendidikan, pengelolaan bahasa dan sastra, data dan informasi pendidikan, serta koordinasi program/program peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan di wilayah Kota Surakarta.

3) Fungsi Utama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surakarta menjalankan beberapa fungsi utama, antara lain

- a. Perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

4) Struktur Organisasi (SOTK)

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dirancang untuk mendukung **pembagian fungsi administratif dan teknis** secara sistematis.

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023, struktur organisasi Dinas Pendidikan melibatkan unsur struktural yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi teknis dan administrasi, terdiri dari

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta menurut Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari
 - Subbagian Administrasi dan Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar terdiri dari :
 - Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar;
 - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 - Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama;
 - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal terdiri dari :

- Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu PAUD dan Pendidikan Non-formal;
- Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non-formal;

f. Bidang Pengembangan Pendidikan

- Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan
- Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

g. UPT dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas Memimpin, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kepala Dinas Pendidikan tersebut memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;

- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta kehumasan dan kerjasama pada dinas.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, fungsi Sekretaris antara lain:

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas
- f. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas;
- g. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas;
- h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- i. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tatalaksana pelayanan public serta pengelolaan kepegawaian;
- j. penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Subbagian Administrasi dan Umum;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu sekolah dasar, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, serta pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

Fungsi dari Bidang ini diuraikan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- d. fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pendidikan Sekolah Dasar dibantu oleh:

- a. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar;
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Fungsi dari bidang ini diuraikan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama ;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dibantu 3 seksi yaitu :

- a. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non- formal mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal, serta pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal.

Fungsi dari bidang ini diuraikan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non- formal;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Pengelolaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;

- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas fasilitasi penyediaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal dibantu 3 seksi yaitu :

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Seksi Pendidikan Non-formal; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

6. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan

Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengembangan kurikulum dan perizinan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan bahasa dan sastra.

Fungsi dari bidang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian,

- pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Pendidikan dibantu oleh 2 seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan;
- b. Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Sumber daya Dinas Pendidikan Kota Surakarta terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya aset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana diatur dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah tercatat sejumlah 126 pegawai non guru dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025

No	Penempatan	S2		S1		D3		SMA		SMP		SD				Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat	3		4	8	2	4	17	3	1				27	15	42
2	Bidang SD	2	1	5	3	2	2	1	1					10	7	17
3	Bidang SMP	3	1	4	2		1	1						8	4	12
4	Bidang PAUD		2	3	3	2	1	2						7	6	13
5	Bidang Pengembangan	1		3	2			1	2					5	4	9
6	Pengawas SMP		4	1										1	4	5
7	Pengawas SD	1	2											1	2	3
8	Pengawas TK		1		2									0	3	3
9	Penilik				2									0	2	2
10	UPT PLDPI		3	4	3	1		5	2	1		1		12	8	20
	Total	10	14	24	25	7	8	27	8	2	0	1	0	71	55	126

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025

Berdasarkan data tersebut diatas, Jumlah pegawai Dinas Pendidikan sebanyak 126 orang, terdiri dari 71 pegawai laki-laki (56,35%) dan 55 pegawai perempuan (43,65%). Komposisi ini menunjukkan dominasi pegawai laki-laki, namun proporsi gender relatif seimbang untuk mendukung pelaksanaan tugas administratif, teknis, dan fungsional

Dilihat dari kualifikasi pendidikan, pegawai Dinas Pendidikan didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) dan Magister (S2), dengan rincian sebagai berikut:

- S1 : 49 orang (38,9%)
- S2 : 24 orang (19,0%)
- SMA : 35 orang (27,8%)
- D3 : 15 orang (11,9%)
- SMP dan SD : 3 orang (2,4%)

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai ($\pm 58\%$) telah berpendidikan minimal S1, yang mencerminkan kapasitas SDM yang cukup memadai untuk mendukung tugas perencanaan, pengelolaan program, dan pelayanan pendidikan

Distribusi pegawai pada masing-masing unit kerja menunjukkan perbedaan beban dan karakteristik tugas:

- Sekretariat merupakan unit dengan jumlah pegawai terbesar, yaitu 42 orang (33,3%), didominasi lulusan S1 dan SMA, yang mencerminkan kebutuhan tinggi pada fungsi administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian.
- Bidang SD, SMP, dan PAUD memiliki komposisi pegawai relatif seimbang dengan dominasi lulusan S1 dan S2, sesuai dengan kebutuhan teknis pengelolaan satuan pendidikan dan program peningkatan mutu.
- Bidang Pengembangan memiliki jumlah pegawai paling sedikit di antara bidang teknis (9 orang), yang berpotensi memerlukan penguatan SDM.
- Pengawas SD, SMP, dan TK serta Penilik didominasi pegawai berpendidikan S1, namun jumlahnya relatif terbatas, yang berpotensi mempengaruhi intensitas pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan.

- UPT PLDPI memiliki 20 pegawai, dengan variasi latar belakang pendidikan dari SMA hingga S1, mencerminkan kombinasi fungsi teknis dan operasional layanan

2. Sumber Daya Modal/Aset

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang tersebar pada kantor induk Dinas Pendidikan Kota Surakarta, SKB, PLDPI dan Satuan Pendidikan. Adapun rincian data aset pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2. Data Aset Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		Ket
				Baik	Rusak	
1	Tanah	m ²	1	1	0	
2	Mobil	Unit	3	3	0	
3	Sepeda motor	Unit	78	78	0	
4	Mesin ketik elektrik	Unit	2	2	0	
6	Mesin hitung uang	Unit	0	0	0	
7	Almari Arsip	Unit	7	7	0	
8	Rak arsip	Unit	25	25	0	
9	Filling cabine	Unit	10	10	0	
10	Brankas	Unit	2	1	1	
11	Air Conditioner	Unit	58	50	8	
12	LCD Unit	Unit	9	9	0	
14	Kamera	Unit	11	11	0	
15	Kursi Pejabat	Unit	21	21	0	
16	Kursi Susun/Staf	Unit	650	575	75	
17	Laptop	Unit	109	96	13	
18	Meja kerja	Unit	99	99	0	
19	Meja pejabat	Unit	8	8	0	
20	Meja/ kursi tamu	Set	2	2	0	
21	Mesin Penghancur kertas	Unit	1	1	0	
23	Mesin Faksimile	Unit	0	0	0	
25	Printer	Unit	134	100	34	
26	TV	Unit	10	3	0	
27	Sound sistem dan peralatan lainnya	Unit	11	6	5	
28	PABX	Unit	25	15	10	
29	UPS	Unit	7	4	3	
30	Komputer	Unit	61	50	11	
32	Wireless	Unit	2	1	1	
33	Almari Es	Unit	4	3	1	
35	Genset	Unit	2	2	0	
36	Alat komunikasi sosial lainnya	Unit	101	80	21	
37	Alat pemadam portable	Unit	10	10	0	
38	Camera conference	Unit	4	4	0	
39	CCTV	Unit	21	21	0	

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		Ket
				Baik	Rusak	
40	Dispenser	Unit	8	8	0	
41	Handy Talky	Unit	2	2	0	
42	Hard Disk	Unit	14	8	6	
43	Infrared Thermometer	Unit	1	0	1	
44	Kipas Angin	Unit	5	2	3	
45	Loudspeaker	Unit	14	11	4	
46	Meja Resepsionis	Unit	2	2	0	
47	Meja fogging	Unit	4	4	0	
48	Mesin Penghisap debu	Unit	3	3	0	
49	Microphone	Unit	15	8	7	
50	Mimbar podium	Unit	1	1	0	
51	Monitor	Unit	19	14	5	
52	Papan Visual/Papan nama	Unit	39	39	0	
53	Peralatan Komputer	Unit	1	1	0	
54	Sofa	Unit	9	6	3	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2025

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pendidikan secara umum masih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sebagian besar aset berada dalam kondisi baik dan layak pakai, terutama aset strategis seperti tanah, kendaraan dinas, perabot utama perkantoran, sarana rapat, serta sarana keamanan dan keselamatan kerja.

Namun demikian, hasil inventarisasi menunjukkan masih terdapat sarpras dengan kondisi rusak, khususnya pada peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta sarana kerja pegawai. Kerusakan relatif menonjol terdapat pada kursi staf, printer, komputer/laptop, perangkat jaringan dan komunikasi, pendingin ruangan (AC), serta peralatan audio visual. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efisiensi kerja, kenyamanan pegawai, serta kualitas layanan administrasi dan teknis.

Pada aspek TIK, meskipun jumlah perangkat relatif mencukupi, ketersediaan unit layak pakai belum sepenuhnya optimal untuk mendukung sistem kerja berbasis digital dan kebutuhan pelaporan kinerja. Selain itu, kerusakan pada sarana pendukung rapat dan komunikasi berpotensi mempengaruhi efektivitas koordinasi internal dan eksternal.

Secara keseluruhan, kondisi sarpras cukup memadai namun belum optimal, dengan permasalahan utama berupa tingginya jumlah sarpras rusak pada peralatan kerja rutin dan belum optimalnya pemeliharaan serta peremajaan aset. Oleh karena itu, diperlukan prioritas pemeliharaan dan penggantian sarpras rusak, penataan kebutuhan sarpras berbasis kebutuhan riil unit kerja, serta penguatan perencanaan penganggaran pemeliharaan dan pengadaan guna mendukung peningkatan kinerja Dinas Pendidikan.

Tabel 1. 3. Data Nilai Aset Tetap Dinas Pendidikan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Ket
1	Tanah	264.290.483.017	
2	Peralatan dan Mesin	83.596.048.948,00	
3	Gedung dan Bangunan	407.858.265.872	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	421.531.548,00	
5	Aset Tetap Lainnya	34.353.239.393,00	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	532.353.958,00	
7	Akumulasi Penyusutan	-	
Total		791.051.922.736	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2025

Total nilai aset tetap Dinas Pendidikan sebesar Rp 791.051.922.736, yang mencerminkan kapasitas sumber daya pendukung utama dalam penyelenggaraan urusan pendidikan. Struktur nilai aset menunjukkan dominasi pada aset tidak bergerak dan aset strategis pelayanan publik.

Komponen aset terbesar adalah Gedung dan Bangunan sebesar Rp407.858.265.872 (51,56%), yang menunjukkan tingginya ketergantungan pelaksanaan layanan pendidikan pada ketersediaan sarana fisik perkantoran dan fasilitas pendukung. Selanjutnya, Tanah memiliki nilai Rp 264.290.483.017 (33,42%), yang menggambarkan kuatnya basis aset jangka panjang sebagai prasyarat keberlanjutan layanan dan pengembangan fasilitas pendidikan.

Aset Peralatan dan Mesin bernilai Rp 83.596.048.948 (10,57%), berperan penting dalam mendukung operasional, administrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 34.353.239.393 (4,34%) berfungsi sebagai pendukung

kegiatan operasional dan layanan teknis. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Konstruksi Dalam Pengerjaan relatif kecil, masing-masing sebesar 0,05% dan 0,07%, menunjukkan keterbatasan investasi baru dan minimnya proyek pembangunan yang masih berjalan.

Secara keseluruhan, komposisi nilai aset menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan memiliki struktur aset yang kuat pada aset permanen, namun memerlukan perhatian pada optimalisasi pemanfaatan, pemeliharaan, serta peremajaan peralatan dan mesin. Rendahnya nilai konstruksi dalam pengerjaan juga mengindikasikan perlunya perencanaan investasi sarana prasarana yang lebih terarah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan pencapaian kinerja urusan pendidikan

B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kota Surakarta memegang peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yang menjadi fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki daya saing, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Peran ini sejalan dengan Visi Wali Kota Surakarta, yaitu Mewujudkan surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera.

Dalam konteks tersebut, Dinas Pendidikan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian visi daerah melalui pembangunan kualitas masyarakat Kota Surakarta sejak usia dini hingga pendidikan menengah, sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas kota. Peran ini menjadi penghubung antara pelestarian budaya dan penguatan kompetensi modern yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman.

Tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul dan kreatif. Tujuan tersebut sejalan dengan misi Wali Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pendidikan menetapkan sasaran strategis meliputi :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan manak usia dini (PAUD), pendidikan Non-Formaal(PNF) yang disediakan untuk masyarakat surakarta dengan indikator :
 - a. APK 3-6 tahun
 - b. APS 7-12 tahun
 - c. APS 13-15 tahun
 - d. Tingkat partisipasi warga usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
 - e. Presentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan
 - f. Pesentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra jawa/solo
2. Meningkatnya kualitas keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien dengan indikator nilai maturitas kelembagaan

Dengan keterkaitan yang kuat antara tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dengan visi dan misi Wali Kota Surakarta, penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter unggul dan kreatif sehingga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Surakarta sebagai kota yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera.

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah

1) Sekretariat

Tantangan tata kelola dan akuntabilitas kinerja pendidikan

- a. Masih diperlukan penguatan perencanaan berbasis data, pengelolaan anggaran yang efektif, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan secara optimal
- b. Belum optimalnya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dengan rencana kerja yang telah disusun dan pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Belum dilakukan pementauan pada tiap level organisasi atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

2) Pendidikan Anak Usia Dini

Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan PAUD yang ditandai dengan masih rendahnya APK PAUD, dalam hal ini antara lain dipengaruhi oleh :

- a. Masih adanya Anak Usia Dini yang tidak sekolah di satuan pendidikan PAUD
- b. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana PAUD
- c. Belum semua pendidik memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD yang disebabkan karena belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak seusia PAUD (Golden Age)
- e. Belum semua satuan pendidikan PAUD menggunakan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan PAUD
- f. Kompetensi pendidikan formal guru PAUD belum optimal
- g. Masih banyak lembaga PAUD yang belum terakreditasi

3) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Dasar antara lain dipengaruhi :

- a. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar
- b. Belum semua pendidik memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4
- c. Masih adanya Anak Putus Sekolah / Anak Tidak Sekolah
- d. Belum terpenuhinya standar pendidikan nasional yang ditunjukkan dengan hasil Rapor Pendidikan
- e. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan
- f. Kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti
- g. Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan

4) Pendidikan Non Formal

Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal antara lain dipengaruhi :

- A. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal yang memadai
- B. Masih banyaknya program kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang belum sesuai dengan standar pengelolaan/manajemen Pendidikan Non Formal
- C. Belum optimalnya kualitas tutor
- D. PNF belum memiliki baseline data yang akurat sehingga sulit menentukan sasaran yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan kegiatan

5) Pengembangan Pendidikan

Penguatan pendidikan karakter dan budaya lokal yang belum optimal terintegrasi

Integrasi nilai budaya, kearifan lokal, dan penguatan karakter dalam proses pembelajaran belum berjalan secara merata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021–2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pendidikan pada Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Surakarta Berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016–2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021–2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Masyarakat Cerdas Dan Berkarakter Unggul	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren

2. Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 yang yang tercantum dalam Rentra Dinas Pendidikan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021–2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang disediakan untuk Masyarakat Surakarta	APS 7-12 Tahun	Jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dikalikan 100
		APS 13 -15 Tahun	Jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun dikalikan 100
		APK 3-6 Tahun	Jumlah seluruh siswa PAUD 3-6 tahun dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 3-6 tahun dikalikan 100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan DIBAGI Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan
		Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum	Jumlah satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
		muatan lokal	Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal di bagi jumlah satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dikali 100%
		Persentase guru yang tersediakandi satuan pendidikan	Jumlah guru yang tersedia di satuan pendidikan di bagi jumlah guru yang harus disediakan di satuan pendidikan di kalikan 100%
		Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	Persentase satuan Pendidikan yang telah memiliki ijin Operasional
		Persentase satuan pendidikan yangtelah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo	Jumlah satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo dibagi jumlah satuan pendidikan dikali 100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai Maturitas Kelembagaan	Nilai Maturitas Kelembagaan

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025 disusun sebagai upaya strategis untuk mendukung pencapaian visi Wali Kota Surakarta “Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rencana kinerja ini diarahkan untuk menjawab isu strategis pendidikan, khususnya terkait pemerataan layanan, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, fokus rencana kinerja Dinas Pendidikan diarahkan pada peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan mutu dan hasil belajar peserta didik terutama pada aspek literasi dan numerasi, serta penguatan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal sebagai identitas Kota Surakarta. Selain itu, rencana kinerja juga menitikberatkan pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang layak dan adaptif, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan tata kelola pendidikan.

Rencana kinerja ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Pelaksanaan rencana kinerja Tahun 2025 diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara merata, menghasilkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berdaya saing, serta mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan yang profesional dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah

Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)
1	Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif	RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	11,26	%
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	15,38	%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang disediakan untuk Masyarakat Surakarta	APK 3-6 Tahun	65,9	%
		APS 13-15 Tahun	99,61	%
		APS 7-12 Tahun	99,98	%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	94,8	%
		Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		Persentase guru yang tersedia di satuan pendidikan	89,37	%
		Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	100	%
		Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo	100	%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK 3-6 Tahun	65,9	%
		APS 13-15 Tahun	99,61	%
		APS 7-12 Tahun	99,98	%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	94,8	%
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang terakreditasi Minimal B	100	%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pkt A	100	%
		Persentase Guru SD berpendidikan S1/D4	94,84	%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	99,95	%
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	60,82	%
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,38	nilai
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,12	nilai
5	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3	Unit
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang
8	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	Paket
9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	232	Paket
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	Paket
11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	147	Peserta Didik
12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	574	Orang
13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4072	Orang
14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	232	Satuan Pendidikan
15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	230	Satuan Pendidikan
16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	230	Orang
17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	232	Orang
18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	232	Konten Digital

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
19	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen
20	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen
21	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	232	Komunitas
22	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	232	Kegiatan
23	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15700	Paket
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Unit
25	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	232	Orang
26	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	232	Satuan Pendidikan
27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16	Ruang
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Guru SMP berpendidikan S1/D4	97,51	%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	94,84	%
		Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Minimal B	100	%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		Terpenuhinya kebutuhan guru sesuai dengan kebutuhan sesuai standar kualifikasi	72,58	%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Pkt B	84,67	%
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	2,61	nilai
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	2,34	nilai
29	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	Ruang
30	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	Unit
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24	Ruang
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	38	Unit
34	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4	Paket
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2	Paket
36	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	110	Peserta Didik
37	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6416	Orang

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
38	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1958	Orang
39	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	72	Satuan Pendidikan
40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	70	Satuan Pendidikan
41	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	70	Orang
42	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	72	Orang
43	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1	Konten Digital
44	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	72	Dokumen
45	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen
46	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	Komunitas
47	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
48	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	72	Satuan Pendidikan
49	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	Ruang
50	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10922	Paket
51	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	49,67	%
		Presentase Pendidikan Paud yang terakreditasi Minimal B	57,18	%
		Persentase Guru PAUD berpendidikan S1/D4	61,09	%
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	100	%
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	81,32	%
		Rasio pengawas dan penilik PAUD	4,65	%
		Angka Partisipasi Sekolah PAUD 5-6 tahun..	87,3	%
52	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	Unit
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	Unit
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit
55	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2	Paket
56	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	7	Paket
57	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	4	Orang

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
58	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400	Orang
59	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	387	Satuan Pendidikan
60	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	405	Satuan Pendidikan
61	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	7	Unit
62	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen
63	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	42	Unit
64	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Pendidikan Non Formal (PNF) yang terakreditasi	65,69	%
		Persentase Pendidik PNF/Kesetaraan berpendidikan S1/D4	86,55	%
		Persentase pendidik PNF/Kesetaraan bersertifikat pendidik	26,9	%
65	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13	Orang
66	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	80	Satuan Pendidikan
67	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16	Satuan Pendidikan

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
68	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24	Dokumen
69	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen
70	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	Kegiatan
71	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	19	Orang
72	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	%
74	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	%
75	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	247	Orang
76	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	2	Dokumen
77	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
78	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1	Dokumen
79	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	89,37	%
80	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah memiliki Guru layak mengajar	89,37	%
81	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	Dokumen
82	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	Laporan
83	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan yang telah memiliki izin Operasional	100	%
84	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah memiliki ijin Operasional	100	%
85	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
86	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen
87	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan Anak usia dini dan satuan Pendidikan non formal yang telah memiliki ijin Pendidikan	100	%
88	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen
89	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen
90	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo	100	%
91	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan yang telah di bina dalam mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo	100	%
92	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1	Bahasa

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
93	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	48	Peserta Didik
94	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai Maturitas Kelembagaan	42	Angka
95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	92	Angka
		Nilai SPIP	2,74	Angka
		Nilai SAKIP	72,95	Nilai
96	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100	%
97	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen
98	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
99	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan
101	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan
102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
103	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3023	Orang/bulan
104	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	Dokumen
105	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	Laporan
106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan
107	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100	%
108	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen
109	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	260	Laporan
110	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan
111	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	%
112	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25	Dokumen

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
113	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen
114	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	Orang
115	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%
116	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket
117	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket
118	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket
119	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket
120	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket
121	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan
122	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
123	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen
124	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
125	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
126	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
127	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan
128	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
129	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%
130	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	86	Unit
131	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	Unit
132	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	Unit
133	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit
134	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit
135	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%
136	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	Unit
137	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	Unit

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan telah menuangkan sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2025 beserta indikator ketercapaian, dan targetnya dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. PK Kepala Dinas Pendidikan mengalami perubahan target yang sebelumnya menyesuaikan dengan RKPD Tahun 2025 menjadi menyesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya seperti yang telah tercantum dalam RKPD Perubahan Tahun 2025. Berikut PK Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025.

Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Setelah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif	1. RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	11.00	11.26
		2. HLS (Harapan Lama Sekolah)	15.38	15.38
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang disediakan untuk Masyarakat Surakarta	3. APK 3-6 Tahun	65.90	65.90
		4. APS 13-15 Tahun	99.61	99.61
		5. APS 7-12 Tahun	99.98	99.98
		6. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	94.80	94.80
		7. Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	100
		8. Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	89.37	89.37
		9. Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	100	100
		10. Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra jawa/solo	100	100
		11. Nilai Maturitas Kelembagaan	42	42
3	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien			

Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 585.670.630.361,00 dengan perincian dukungan anggaran untuk setiap sasaran sebagai berikut

Tabel 2. 5. Program dan Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum	Setelah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.275.326.448,00	369.706.512.781,00	APBD APBD-P,DAK
2	Program Pengelolaan Pendidikan	182.514.047.565,00	186.144.459.280,00	APBD,DAK,DAU APBD-P,DAK
3	Program Pengembangan kurikulum	200.000.000,00	206.823.500,00	APBD APBD-P
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.669.890.080,00	28.497.815.800,00	APBD, APBD-P,APBD Pergeseran 2
5	Program Pengendalian Perizinan Kependidikan	195.000.000,00	193.070.000,00	APBD APBD-P
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	963.000.000,00	921.949.000,00	APBD APBD-P
Total		577.817.264.093,00	585.670.630.361,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif	1. RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	11.26	11,26	100,00
		2. HLS (Harapan Lama Sekolah)	15.38	15,08	98,05
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang disediakan untuk Masyarakat Surakarta	3. APK 3-6 Tahun	65.90	58,76	89,17
		4. APS 13-15 Tahun	99.61	95,5	95,87
		5. APS 7-12 Tahun	99.98	99,52	99,54
		6. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	94.80	94,17	99,34
		7. Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	100	100
		8. Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	89.37	97,99	109,85
		9. Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	100	100	100
		10. Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra jawa/solo	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	11. Nilai Maturitas Kelembagaan	42	52	123,81

Setiap capaian kinerja diberi predikat dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Nilai	Mean
Sangat Berhasil	$n > 85$	92,5
Berhasil	$70 < n \leq 85$	77,5
Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62,5
Tidak Berhasil	$n < 55$	27,5

n = capaian

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Evaluasi dan analisis capaian masing-masing kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif

a. Progres capaian kinerja tahun 2025

Progres capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan perkembangan pencapaian indikator sasaran strategis yang secara bertahap mengarah pada pemenuhan target akhir tahun, melalui upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, penguatan kualitas proses pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, yang dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan serta didukung oleh penerapan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis urusan pendidikan pada akhir Tahun 2025

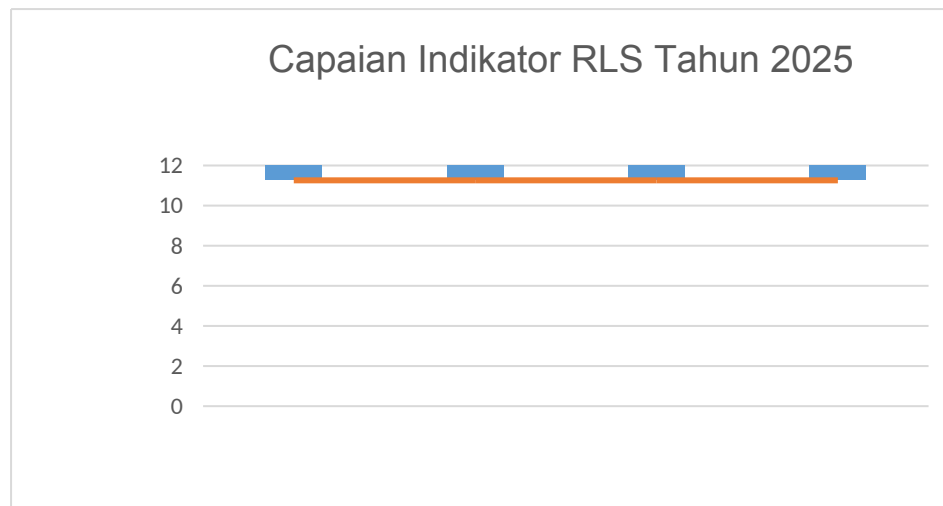
Tabel 3. 3. Progres Capaian Kinerja Tiwulanan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV		
			2025	Target	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Realisasi	Capaian	Predikat	Realisasi	Capaian	Predikat	Realisasi	Capaian	Predikat
1	RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	%	11,26	11	11	11,26	11,26	11,25	102,27	Sangat Berhasil	11,25	102,27	Sangat Berhasil	11,25	99,91	Sangat Berhasil	11,26	100	Sangat Berhasil
2	HLS (Harapan Lama Sekolah)	%	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,07	97,98		15,07	97,98		15,07	97,98		15,08	98,05	

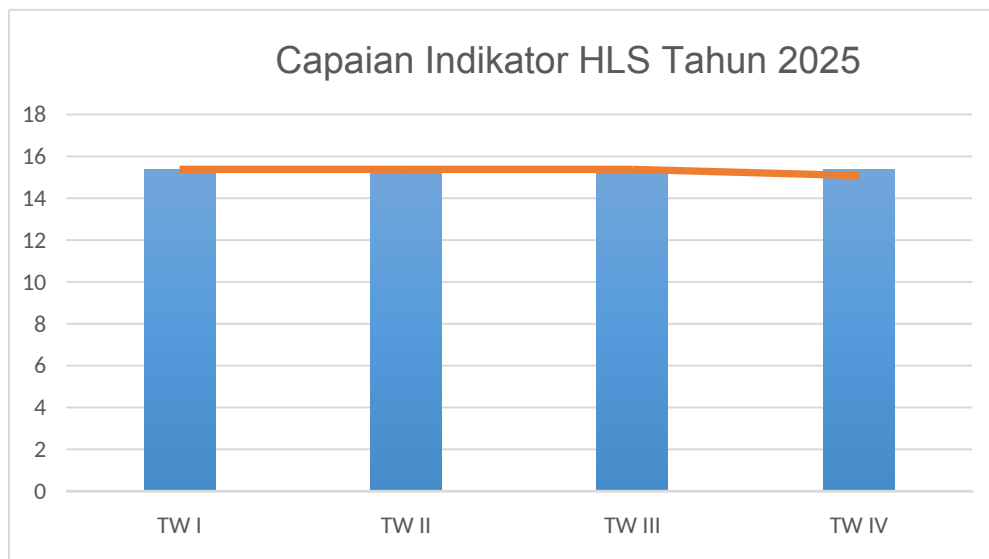
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada akhir triwulan IV, sasaran strategis Perangkat Daerah dengan target

- RLS (Rata Rata Lama Sekolah) sebesar 11,26 % pada tahun 2025 terealisasi sebesar 11,26 sehingga mendapatkan capaian 100%, atau berpredikat Sangat Berhasil.
- HLS (Harapan Lama Sekolah) sebesar 15,38 % pada tahun 2025 terealisasi sebesar 15,08 sehingga mendapatkan capaian 101,99%, atau berpredikat Sangat Berhasil

Pada triwulan I, II dan III realisasi indikator ini 11,26% karena indikator ini merupakan capaian dengan nilai yang dihitung dalam satu tahun sehingga tidak ada perubahan di Triwulan I, Triwulan II, dan triwulan III. Untuk ketercapainnya dapat dilihat di triwulan 4



Gambar 3. 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan



Gambar 3. 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan TW I - TW IV

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3. 4 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan s.d. Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	Tahun	10,74	10,90	10,78	10,92	10,81	11,00	11,00	11,25	11,26	11,26
2	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	14,91	14,88	15,01	14,89	15,10	14,90	15,26	15,07	15,38	15,08

Berdasarkan data capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) periode Tahun 2021–2025, kinerja

urusan pendidikan di Kota Surakarta menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung meningkat. Pada indikator RLS, realisasi capaian dari Tahun 2021 hingga Tahun 2025 secara konsisten telah melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2021 realisasi RLS sebesar 10,90 tahun melebihi target 10,74 tahun, dan terus meningkat hingga mencapai 11,26 tahun pada Tahun 2025, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan penduduk usia sekolah, serta mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pendidikan dalam mendorong penduduk untuk menempuh pendidikan yang lebih lama.

Sementara itu, indikator HLS menunjukkan capaian yang relatif mendekati target namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan pada beberapa tahun. Pada Tahun 2021 dan 2022, realisasi HLS masih sedikit di bawah target, masing-masing sebesar 14,88 tahun dari target 14,91 tahun dan 14,89 tahun dari target 15,01 tahun. Pada Tahun 2024 dan 2025, realisasi HLS juga belum sepenuhnya mencapai target, dengan capaian 15,07 tahun dari target 15,26 tahun dan 15,08 tahun dari target 15,38 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun harapan lama sekolah masyarakat Kota Surakarta mengalami peningkatan, masih terdapat tantangan dalam mendorong ekspektasi keberlanjutan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator RLS dan HLS menunjukkan progres positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Keberhasilan capaian RLS yang melampaui target mencerminkan kinerja yang baik dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan, sedangkan capaian HLS yang mendekati target menjadi dasar bagi perlunya penguatan kebijakan dan program yang mendorong peningkatan minat dan akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada periode selanjutnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

Tabel 3. 5. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Capaian (%)
1	RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	%	10,74	10,9	101,49	10,78	10,92	101,3	10,81	11	101,76	11	11,25	102,27	Sangat Berhasil	11,26	11,26	100	Sangat Berhasil	10,92	100,73
2	HLS (Harapan Lama Sekolah)	%	14,91	14,88	99,8	15,01	14,89	99,2	15,1	14,9	98,68	15,26	15,07	98,75	Sangat Berhasil	15,38	15,08	98,05	Sangat Berhasil	15,49	98,52
Rata-Rata Capaian					100,65			100,25			100,22			100,51				99,02			99,62

Berdasarkan data table di atas, perkembangan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang stabil dan berada pada kategori sangat berhasil. Indikator RLS mengalami tren peningkatan dari 10,74 tahun pada Tahun 2021 menjadi 11,26 tahun pada Tahun 2025, dengan capaian kinerja yang secara konsisten melampaui target setiap tahunnya. Pada Tahun 2025, RLS terealisasi sebesar 11,26 atau mencapai 100% dari target, yang menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan masyarakat serta efektivitas kebijakan perluasan akses pendidikan dasar dan menengah. Bahkan, capaian tersebut telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2026 (10,92 tahun)

Sementara itu, indikator HLS juga menunjukkan peningkatan nilai absolut dari 14,88 tahun pada Tahun 2021 menjadi 15,08 tahun pada Tahun 2025. Meskipun persentase capaian berada sedikit di bawah 100% akibat peningkatan target tahunan yang bersifat progresif, capaian Tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat berhasil dengan persentase 98,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspektasi lama sekolah masyarakat terus meningkat dan akses pendidikan jangka panjang tetap terjaga dengan baik. Proyeksi Tahun 2026 menunjukkan capaian HLS sebesar 98,52%, yang

masih memerlukan penguatan intervensi kebijakan agar target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kedua indikator selama periode 2021–2025 berada pada kisaran 99–100%, yang mencerminkan konsistensi kinerja dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan. Ke depan, penguatan intervensi akan difokuskan pada peningkatan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah guna mendorong optimalisasi capaian HLS serta memastikan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

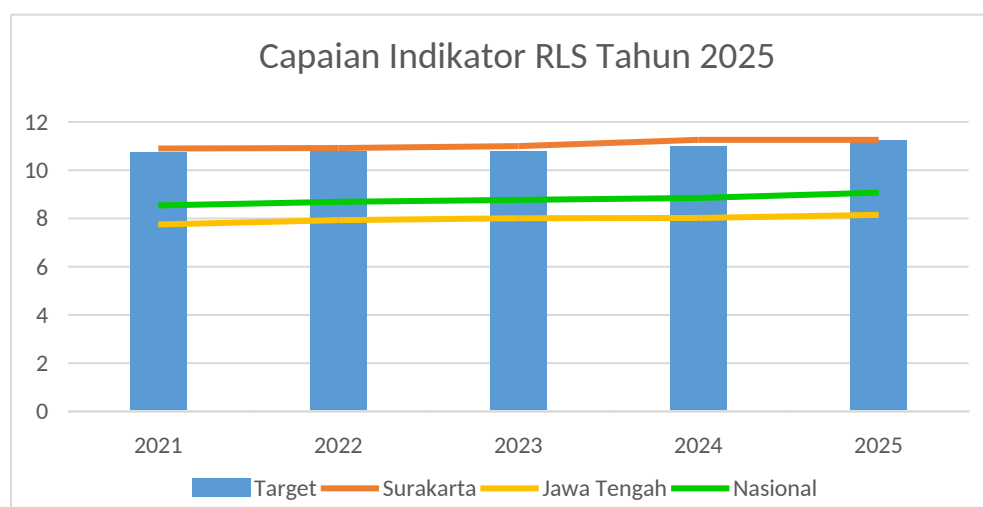
Tabel 3. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Realisasi 2025	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	%	11,26	11,26	100	8,15	9,07
2	HLS (Harapan Lama Sekolah)	%	15,38	15,08	101,99	13,05	13,30

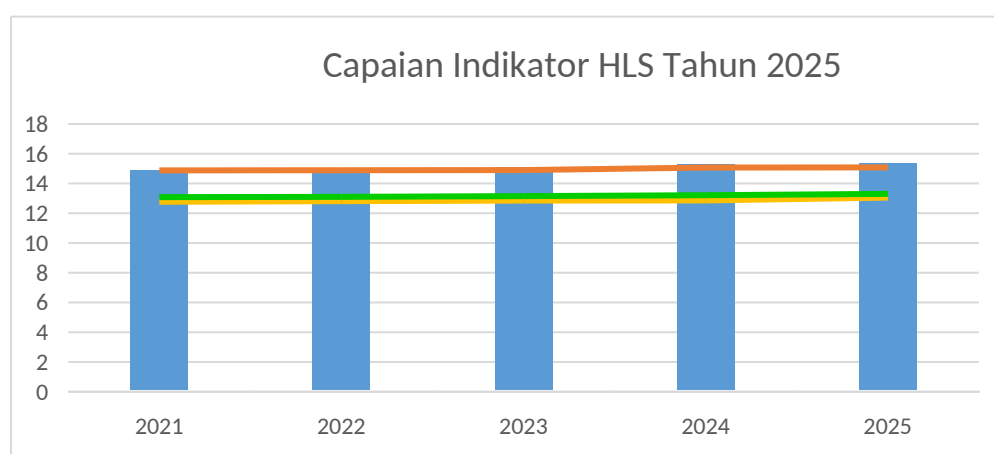
Sumber data BPS Nasional 2025

Berdasarkan data capaian Tahun 2025, indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Dinas Pendidikan Kota Surakarta telah mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 11,26 tahun atau capaian 100 persen, serta menunjukkan kinerja yang sangat baik apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,15 tahun dan capaian Nasional sebesar 9,07 tahun, yang mengindikasikan bahwa keberlanjutan pendidikan penduduk Kota Surakarta berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sementara itu, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 15,08 tahun dari target 15,38 tahun dengan capaian kinerja sebesar 101,99 persen, serta juga melampaui capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,05 tahun dan Nasional sebesar 13,30 tahun, yang mencerminkan tingginya harapan masyarakat Kota Surakarta terhadap keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, capaian indikator RLS dan HLS Tahun 2025 menunjukkan kinerja urusan pendidikan yang sangat baik dan berdaya saing, serta

mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan sumber daya manusia di Kota Surakarta.



Gambar 3. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Gambar 3. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Surakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis sebagai berikut

- 1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan
Ketersediaan satuan pendidikan yang merata pada jenjang SD dan SMP, serta kemudahan akses layanan pendidikan, mendorong keberlanjutan sekolah dan menekan angka putus sekolah
- 2) Optimalisasi program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang mampu menampung penduduk usia sekolah dan usia dewasa yang belum menamatkan pendidikan formal.

- 3) Dukungan kebijakan wajib belajar 12 tahun, termasuk pemberian bantuan pendidikan (BOS, BPMKS) yang meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
- 4) Peningkatan kualitas dan pemerataan satuan pendidikan, terutama pada jenjang SMP sehingga mendorong keberlanjutan sekolah peserta didik hingga jenjang lebih tinggi.
- 5) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang semakin meningkat, didukung oleh peran aktif sekolah, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan RLS dan HLS di Kota Surakarta merupakan hasil sinergi antara perluasan akses, peningkatan mutu layanan pendidikan, dukungan kebijakan dan pembiayaan, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya pendidikan. Ke depan, penguatan intervensi pada jenjang menengah atas dan pendidikan kesetaraan tetap diperlukan guna menjaga tren peningkatan yang berkelanjutan

Hambatan dalam pencapaian target indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 antara lain :

- 1) Masih adanya anak tidak sekolah (ATS) dan putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah, yang berdampak langsung pada stagnasi RLS.
- 2) Kondisi sosial ekonomi keluarga rentan, yang mendorong anak memasuki dunia kerja lebih awal sehingga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,
- 3) Mobilitas penduduk perkotaan yang tinggi, termasuk perpindahan domisili dan data kependudukan yang belum sepenuhnya sinkron, sehingga memengaruhi akurasi intervensi sasaran
- 4) Rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan pada kelompok usia tertentu, khususnya lulusan SMP/ sederajat yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK atau pendidikan kesetaraan
- 5) Terbatasnya partisipasi pendidikan nonformal/kesetaraan, sehingga belum optimal dalam mengembalikan warga belajar ke sistem pendidikan
- 6) Persepsi bahwa pendidikan menengah/tinggi belum menjadi kebutuhan prioritas, terutama pada kelompok masyarakat marginal

- 7) Faktor perkawinan usia dini, yang berkontribusi pada berhentinya pendidikan formal.
- 8) Dampak kesenjangan literasi dan numerasi dasar, yang menyebabkan sebagian peserta didik mengalami kesulitan belajar dan berisiko putus sekolah

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Surakarta melakukan pendataan by name by address, program penjangkauan ATS, penguatan koordinasi kelurahan–sekolah
- 2) Optimalisasi bantuan pendidikan (BPMKS, BOSP), sinergi dengan DTKS dan dinas sosial
- 3) Integrasi data pendidikan dengan Dukcapil dan sistem Dapodik
- 4) Penguatan sosialisasi wajib belajar 12 tahun, pendampingan pemilihan sekolah lanjutan
- 5) Revitalisasi PKBM, peningkatan layanan Paket A/B/C, melalui penyesuaian waktu pembelajaran, penguatan pembinaan PKBM
- 6) Edukasi pencegahan perkawinan anak, kolaborasi dengan Kemenag dan DP3AP2KB
- 7) Program parenting education, penguatan layanan BK dan motivasi belajar
- 8) Penguatan program literasi, remedial terstruktur, peningkatan kompetensi guru

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*).

Selama Tahun 2025, Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
- 2) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas sasaran strategis
- 3) Penguatan monitoring dan evaluasi guna memastikan ketercapaian kinerja secara efektif dan efisien
- 4) Melakukan re-focussin atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja sasaran strategis (nama Perangkat) dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut

Tabel 3. 7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
Program Pengelolaan Pendidikan ...						
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan...						
Sub Kegiatan 1 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemenuhan biaya honorarium tutor kejarpaket (SKB)		166.500.000,00	166.500.000,00	0,00	Keberadaan tutor yang didukung melalui pemberian honor berperan penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran pendidikan kesetaraan pemberian honor Tutor Kejar Paket dinilai efektif karena secara langsung menjamin tersedianya tenaga pendidik nonformal yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan RLS
Sub Kegiatan 2 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Hibah PKBM		50.000.000	50.000.000	0,00	Pemberian hibah berkontribusi tidak langsung terhadap pencapaian IKU Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah melalui penguatan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan secara efektif dan efisien
	Hibah PKBM Pelangi		0	75.000.000	-75.000.000,00	Pemberian hibah berkontribusi tidak langsung terhadap pencapaian IKU Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah melalui penguatan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan secara efektif dan efisien

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Pelaksanaan Kegiatan Jambore Pendidikan Keaksaraan	peningkatan kemampuan literasi dan keterampilan peserta dari satuan pendidikan nonformal	29.480.500	27.692.000	1.788.500,00	Pelaksanaan Jambore Keaksaraan berkontribusi tidak langsung terhadap pencapaian IKU Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah melalui penguatan keberlanjutan layanan pendidikan keaksaraan dan transisi ke pendidikan kesetaraan secara efektif dan efisien
Sub Kegiatan 3 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja Negeri		45.000.000	45.000.000	0,00	Pemberian hibah BOSP-BOP berkontribusi tidak langsung terhadap pencapaian IKU Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah melalui penjaminan keberlangsungan layanan pendidikan dan penurunan risiko putus sekolah secara efektif dan efisien
	BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Negeri		126.600.000	126.600.000	0,00	
	Hibah BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja Swasta		90.000.000	90.000.000	0,00	
	Hibah BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja Swasta		3.438.100.000	3.438.100.000	0,00	
Sub Kegiatan 4 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kegiatan ANBK Pendidikan Non Formal		26.710.000	33.010.000	-6.300.000,00	Terhadap HLS, subkegiatan ini menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang berkelanjutan, terjadwal, dan sesuai standar pada satuan pendidikan, sehingga meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan peserta didik serta memperkuat ekspektasi lama sekolah anak di masa depan.

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
						Keberlangsungan proses belajar yang terjamin menjadi faktor utama dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarkelas dan antarkenjang.
	Pelaksanaan Kegiatan Penangann Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah		0	71.461.000	-71.461.000,00	Terhadap RLS, subkegiatan ini berkontribusi secara tidak langsung melalui pencegahan putus sekolah dan peningkatan keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan jenjang pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan proses belajar pada jenjang pendidikan formal dan nonformal pada akhirnya meningkatkan akumulasi lama pendidikan penduduk usia ≥15 tahun
	Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah		71.982.500	0	71.982.500,00	
	Peenyelenggaraan Kegiatan UK Pendidikan Non Formal		24.455.600	18.155.600	6.300.000,00	
Kegiatan 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					0,00	
Sub Kegiatan 1 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Asesemen Nasional		0	53.664.000	-53.664.000,00	
	Penyelenggaraan Ujian Sekolah		0	40.360.000	-40.360.000,00	
Sub Kegiatan 1 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			37.244.447.000	37.244.470.000	-23.000,00	Menjamin keberlangsungan operasional satuan pendidikan dan menekan beban biaya pendidikan

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
						sehingga menjaga partisipasi sekolah
Sub Kegiatan 2 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			655.025.000	505.492.260	149.532.740,00	Meningkatkan mutu tata kelola sekolah yang mendukung keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan.
Sub Kegiatan 3 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		49.918.100.000	49.959.122.318	-41.022.318,00	Menjamin keberlangsungan operasional satuan pendidikan dan menekan beban biaya pendidikan sehingga menjaga partisipasi sekolah
		Total	91.886.400.600,00	91.944.627.178,00	-58.226.578,00	

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

1) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah didukung oleh keterpaduan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Program Pengelolaan Pendidikan, khususnya kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, berperan signifikan dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan formal. Penyelenggaraan proses belajar yang berjalan secara konsisten dan terstandar meningkatkan partisipasi peserta didik dan memperkuat ekspektasi lama sekolah, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan HLS.

Selain itu, kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, melalui penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, secara langsung menunjang peningkatan RLS dengan memberikan akses pendidikan bagi penduduk usia ≥ 25 tahun yang belum menamatkan pendidikan formal. Dukungan kegiatan Fasilitasi dan penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah (ATS/APS) turut menjaga keberlanjutan pendidikan dan mencegah penurunan capaian RLS dan HLS.

Dukungan operasional melalui pemberian BOSP , BOP dan BPMKS juga menjadi faktor penunjang keberhasilan, karena mampu menekan beban biaya pendidikan masyarakat dan menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada seluruh jenjang

2) Program/Kegiatan yang Menjadi Faktor Kegagalan atau Kendala Pencapaian Kinerja

Di sisi lain, terdapat beberapa program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala sehingga berdampak pada belum optimalnya pencapaian kinerja RLS dan HLS.

Pada kegiatan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, tantangan masih dijumpai berupa keterbatasan partisipasi warga belajar usia dewasa dan anak yang mengalami putus sekolah, keterikatan waktu kerja peserta, serta mobilitas penduduk perkotaan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan dampak program terhadap peningkatan RLS belum sepenuhnya optimal meskipun kegiatan telah dilaksanakan.

Selain itu, pada kegiatan Pencegahan Anak Putus Sekolah, kendala pendataan sasaran ATS/APS dan faktor sosial ekonomi keluarga masih mempengaruhi efektivitas intervensi, sehingga berdampak pada keberlanjutan pendidikan peserta didik dan pencapaian HLS.

Pada kegiatan yang bersifat pendukung, seperti pembinaan kelembagaan dan manajemen satuan pendidikan, dampak terhadap RLS dan HLS bersifat tidak langsung dan jangka menengah, sehingga belum sepenuhnya tercermin dalam capaian kinerja tahun berjalan.



Penyelenggaraan kegiatan rutin Festival Pendidikan Non Formal (PNFest) dan bersamaan dengan peluncuran aplikasi Jelajah Kursus Solo. Program ini memfasilitasi siswa dan calon siswa Pendidikan Non Formal untuk mencari informasi terkait Pendidikan Non Formal dan selanjutnya dapat menyalurkan kemampuannya.

	Diseminasi informasi Pendidikan Non Formal ke wilayah (Kelurahan Banyuanyar) sebagai bentuk pencegahan Anak Putus Sekolah.
	Diseminasi informasi Pendidikan Non Formal ke wilayah sebagai bentuk tindak lanjut penanganan dan pencegahan Anak Putus Sekolah.
	Dilakukan penyisiran siswa ATS kesekolah maupun wilayah tempat tinggal sebagai tindak lanjut pencegahan dan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah

Sasaran Dinas Pendidikan : Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang disediakan untuk Masyarakat Surakarta

a. Progres Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, target dan realisasi per triwulan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 8. Progres Capaian Kinerja Tiwulan Tahun 2025

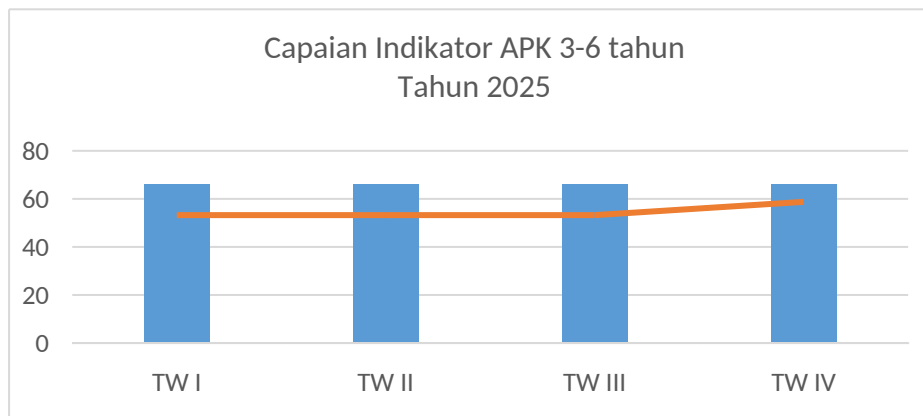
No	Indikator	Satuan	Tar get	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV		
			2025	Tar get	Tar get	Tar get	Tar get	Realisasi	Capaian	Predikat	Realisasi	Capaian	Predikat	Realisasi	Capaian	Predikat	Realisasi	Capaian	Predikat
1	APK 3-6 Tahun	%	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	53,24	80,79	Sangat Berhasil	53,24	80,79	Sangat Berhasil	53,24	80,79	Sangat Berhasil	58,76	89,17	Sangat Berhasil

No	Indikator	Satuan	Tar get	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV		
			2025	Tar get	Tar get	Tar get	Tar get	Realisasi	Capaian	Predikat	Realisasi	Capaian	Predikat	Realisasi	Capaian	Predikat	Realisasi	Capaian	Predikat
2	APS 7-12 Tahun	%	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,9	99,92		99,9	99,92		99,90	99,92		99,52	99,54	
3	APS 13-15 Tahun	%	99,61	99,61	99,61	99,61	99,61	99,96	100,35		99,96	100,35		99,96	100,35		95,50	95,87	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	92,55	97,63		92,55	97,63		92,55	97,63		94,17	99,34	
5	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100	100		100	100,00	
6	Persentase guru yang tersedian di satuan pendidikan	%	89,37	89,37	89,37	89,37	89,37	85,5	95,67		85,5	95,67		85,50	95,67		97,99	109,65	
7	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	%	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100	100		100	100,00	
8	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra jawa/solo	%	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100	100		100	100,00	

Berdasarkan data capaian indikator kinerja urusan pendidikan Tahun 2025, seluruh indikator menunjukkan kinerja dengan predikat “Sangat Berhasil” pada setiap triwulan, yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.

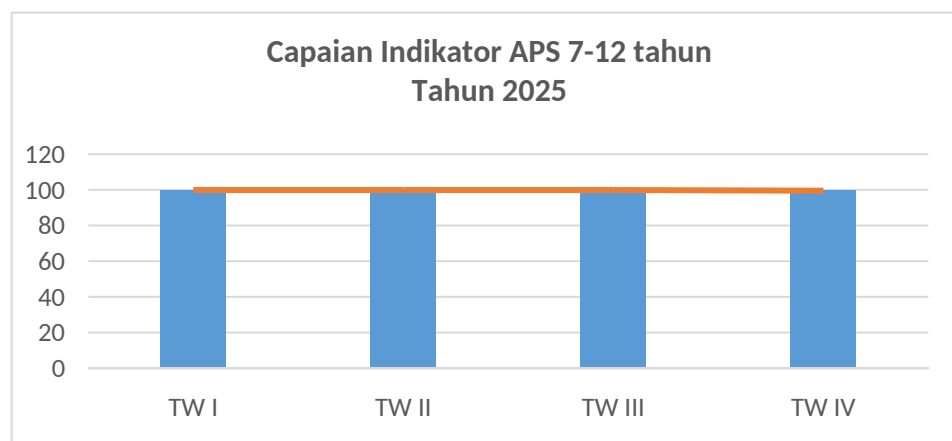
- **Indikator APK usia 3–6 tahun** capaian TW IV sebesar 58,76% dari target 65,9% (capaian 89,17%, predikat Sangat Berhasil). Meskipun belum mencapai target tahunan, tren menunjukkan peningkatan dibanding TW I–III (53,24%). Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat anak usia PAUD yang belum terlayani optimal, namun intervensi pada semester II mulai memberikan dampak positif. Perlu penguatan perluasan akses PAUD dan edukasi orang tua untuk mendorong partisipasi usia dini. Capaian indikator ini juga merupakan capaian dengan nilai yang dihitung dalam satu tahun sehingga tidak

ada perubahan di Triwulan I-III sehingga untuk ketercapainnnya dapat dilihat di triwulan IV



Gambar 3. 5. Capaian Kinerja Indikator APK 3-6 Tahun 2025

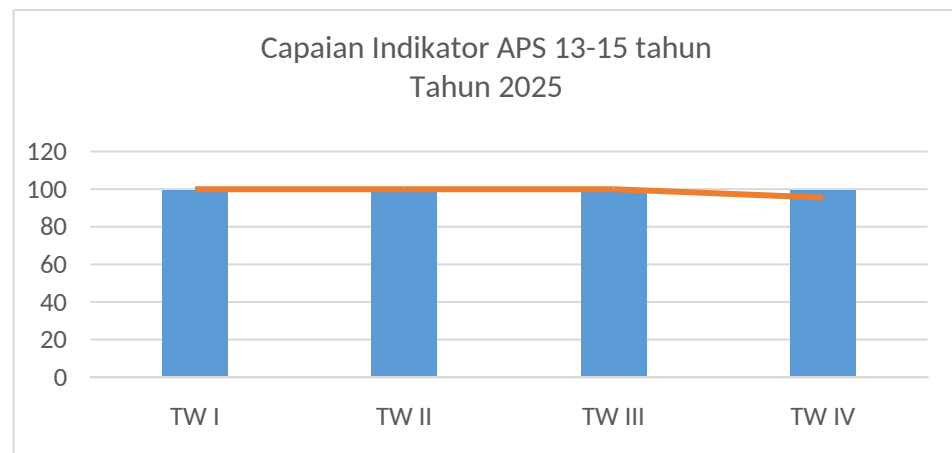
- **Indikator APS usia 7–12 tahun**, realisasi TW IV sebesar 99,52% (capaian 99,54%, Sangat Berhasil). Angka ini menunjukkan partisipasi pendidikan dasar hampir universal dan stabil sepanjang tahun. Penurunan kecil dari TW I–III tidak signifikan terhadap kinerja keseluruhan. Capaian indikator ini juga merupakan capaian dengan nilai yang dihitung dalam satu tahun sehingga tidak ada perubahan di Triwulan I-III sehingga untuk ketercapainnnya dapat dilihat di triwulan IV



Gambar 3. 6. Capaian Kinerja Indikator APS 7-12 Tahun

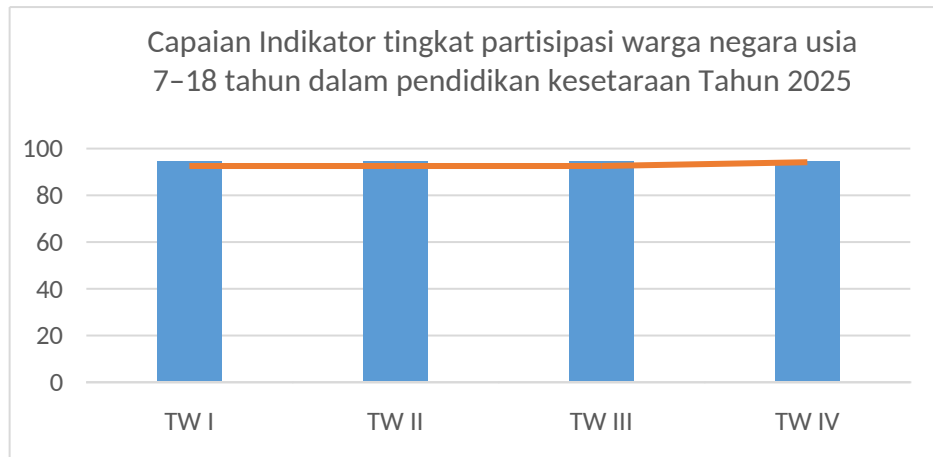
- **Indikator APS usia 13–15 tahun**, realisasi TW IV sebesar 95,50% dengan capaian 95,87% (Sangat Berhasil). Walaupun terjadi penurunan dibanding TW I–III (99,96%), tingkat partisipasi masih sangat tinggi dan mendekati target. Fluktuasi kemungkinan

dipengaruhi mobilitas siswa atau perpindahan domisili. Keberlanjutan pendidikan jenjang SMP relatif terjaga secara konsisten menunjukkan capaian mendekati target dengan stabilitas kinerja yang tinggi, mencerminkan keberhasilan menjaga partisipasi pendidikan dasar. Capaian indikator ini juga merupakan capaian dengan nilai yang dihitung dalam satu tahun sehingga tidak ada perubahan di Triwulan I-III sehingga untuk ketercapainnya dapat dilihat di triwulan IV



Gambar 3. 7. Capaian Kinerja Indikator APS 13-15 Tahun

- **Indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7–18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan**, realisasi TW IV sebesar 94,17% (capaian 99,34%, Sangat Berhasil), meningkat dibanding TW I–III (92,55%). Hal ini menunjukkan efektivitas penjangkauan warga belajar melalui pendidikan kesetaraan dan optimalisasi PKBM pada semester II. Capaian indikator ini juga merupakan capaian dengan nilai yang dihitung dalam satu tahun sehingga tidak ada perubahan di Triwulan I-III sehingga untuk ketercapaiannya dapat dilihat di triwulan IV.



Gambar 3. 8. Capaian Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan

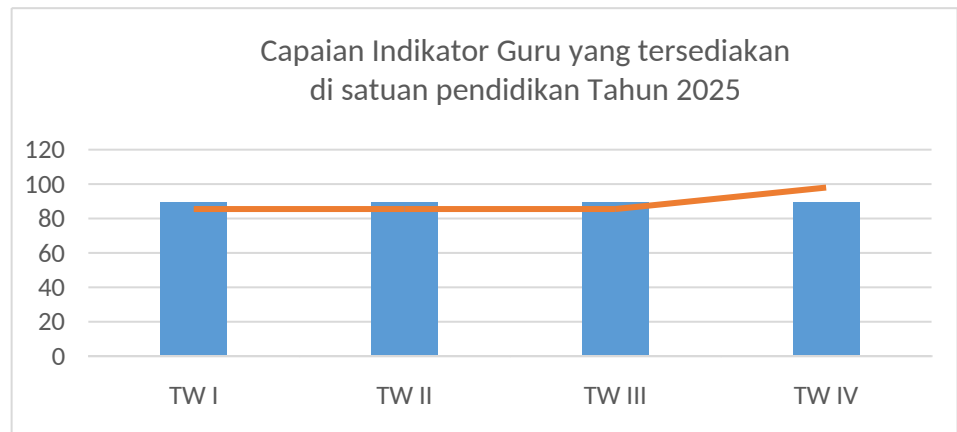
- **Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal**, realisasi konsisten 100% sepanjang tahun (Sangat Berhasil). Seluruh satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai kebijakan daerah. Kinerja ini mencerminkan kepatuhan. Capaian indikator ini juga merupakan capaian dengan nilai yang dihitung dalam satu tahun sehingga tidak ada perubahan di Triwulan I-III sehingga untuk ketercapainnya dapat dilihat di triwulan IV.



Gambar 3. 9. Capaian Indikator satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Tahun 2025

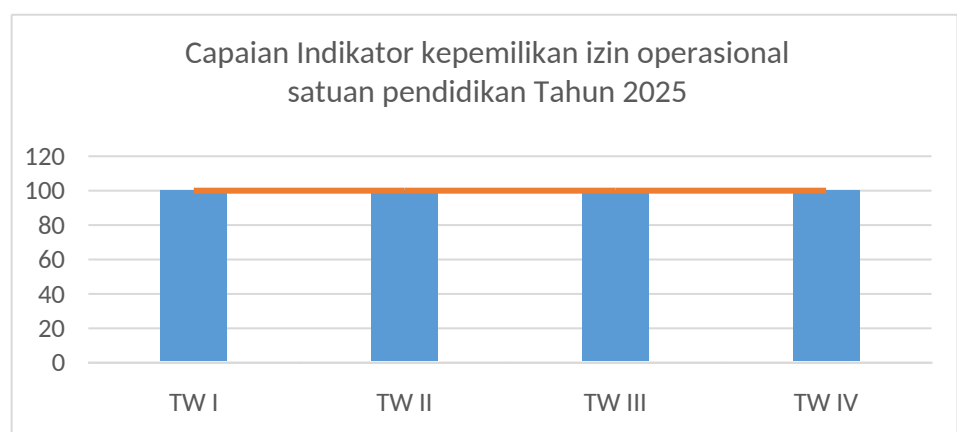
- **Indikator Persentase Guru yang Tersedia di Satuan Pendidikan**, realisasi TW IV sebesar 97,99% dengan capaian 109,65% (Sangat Berhasil). Terjadi peningkatan signifikan dibanding TW I-III (85,5%). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi dan pemenuhan kebutuhan guru pada semester II, sehingga rasio ketersediaan guru

melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator ini juga merupakan capaian dengan nilai yang dihitung dalam satu tahun sehingga tidak ada perubahan di Triwulan I-III sehingga untuk ketercapainnnya dapat dilihat di triwulan IV.



Gambar 3. 10. Capaian Indikator Guru yang tersediakan

- **Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional**, realisasi stabil **100%** sepanjang tahun (Sangat Berhasil). Seluruh satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan legalitas operasional, menunjukkan tata kelola perizinan yang tertib dan terpantau. Capaian indikator ini juga merupakan capaian dengan nilai yang dihitung dalam satu tahun sehingga tidak ada perubahan di Triwulan I-III sehingga untuk ketercapainnnya dapat dilihat di triwulan IV.



Gambar 3. 11. Capaian Indikator Guru yang tersediakan

- **Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa/Solo**, realisasi konsisten 100% (Sangat Berhasil). Capaian ini menunjukkan keberhasilan implementasi

penguatan muatan lokal berbasis kearifan lokal serta komitmen satuan pendidikan dalam pelestarian budaya daerah. Capaian indikator ini juga merupakan capaian dengan nilai yang dihitung dalam satu tahun sehingga tidak ada perubahan di Triwulan I-III sehingga untuk ketercapainnnya dapat dilihat di triwulan IV.



Gambar 3. 12. Capaian Indikator Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa/Solo

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

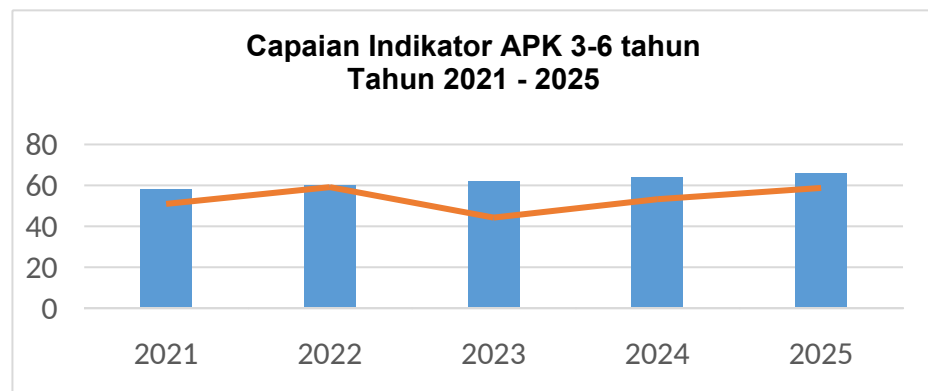
Tabel 3. 9. Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	APK 3-6 Tahun	%	57,9	50,96	59,9	59,14	61,9	44,26	63,9	53,24	65,9	58,76
2	APS 7-12 Tahun	%	99,52	99,5	99,55	99,47	99,58	99,98	99,98	99,9	99,98	99,52
3	APS 13-15 Tahun	%	98,1	100	98,2	98,84	98,3	99,44	99,61	99,96	99,61	95,5
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,34	15,44	15,65	94,2	15,91	94,1	94,8	222,83	94,8	94,17
5	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
6	Persentase guru yang tersedian di satuan pendidikan	%	n/a	n/a	86,53	86,39	87,48	85,3	88,43	85,50	89,37	97,99
7	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	95	100	95	100	100
8	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra jawa/solo	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100

a. APK Usia 3–6 Tahun

Capaian APK usia 3–6 tahun menunjukkan tren peningkatan bertahap namun belum mencapai target pada seluruh periode

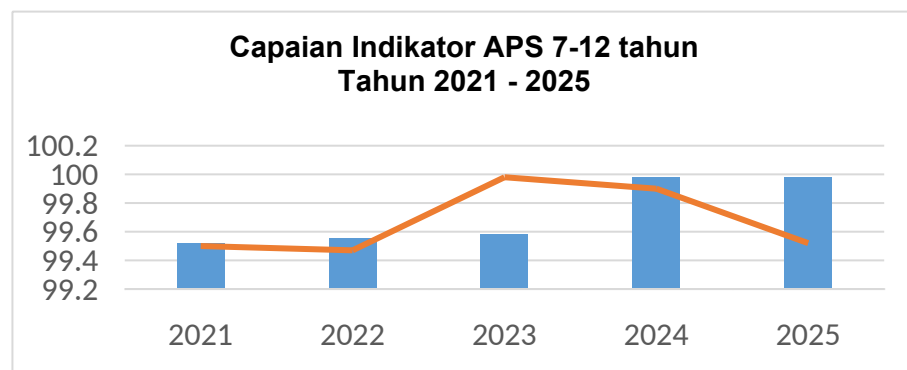
pengukuran. Realisasi tahun 2025 sebesar 58,76% masih di bawah target 65,9%, meskipun mengalami kenaikan dibanding tahun 2024. Fluktuasi capaian dipengaruhi oleh masih terbatasnya partisipasi PAUD formal dan nonformal, faktor sosial ekonomi masyarakat, serta optimalisasi pendataan peserta didik yang belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan akses layanan PAUD dan pendampingan pemanfaatan BOP PAUD secara berkelanjutan.



Gambar 3. 13. Perbandingan Capaian APK 3-6 tahun Tahun 2021 - 2025

b. APS Usia 7–12 Tahun

Capaian indikator APS usia 7–12 tahun menunjukkan kinerja sangat baik dan stabil, dengan capaian mendekati 100% pada seluruh tahun. Realisasi tahun 2025 sebesar 99,52% meskipun sedikit di bawah target, tetap mencerminkan keberhasilan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar serta efektivitas kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan SD.

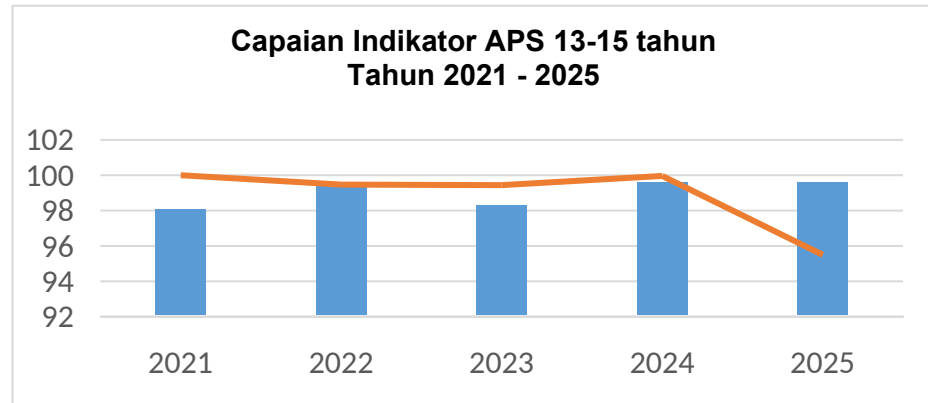


Gambar 3. 14. Perbandingan Capaian APS 7-12 tahun Tahun 2021 - 2025

c. APS Usia 13–15 Tahun

Capaian indikator APS usia 13–15 tahun secara umum melampaui target hingga tahun 2024, namun pada tahun 2025 realisasi menurun

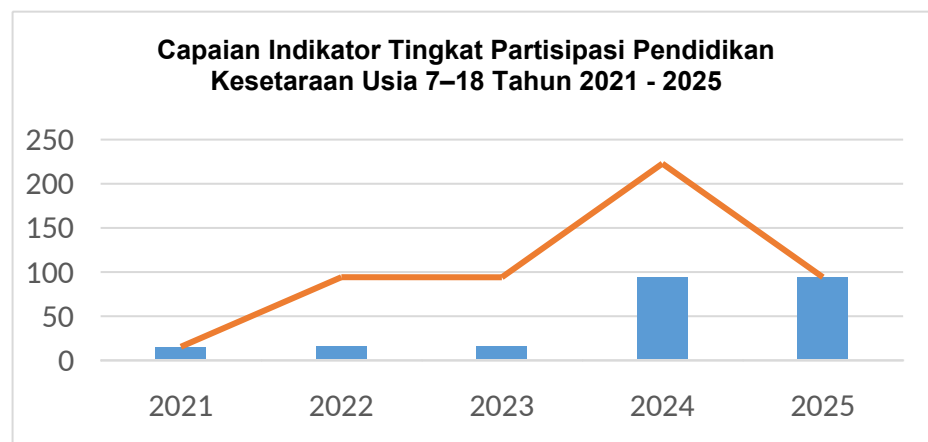
menjadi 95,50% dari target 99,61%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan partisipasi pendidikan pada jenjang SMP, antara lain faktor putus sekolah, mobilitas penduduk, dan peralihan ke jalur pendidikan nonformal atau pendidikan kesetaraan.



Gambar 3. 15. Perbandingan Capaian APS 13-15 tahun Tahun 2021 - 2025

d. Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan Usia 7–18 Tahun

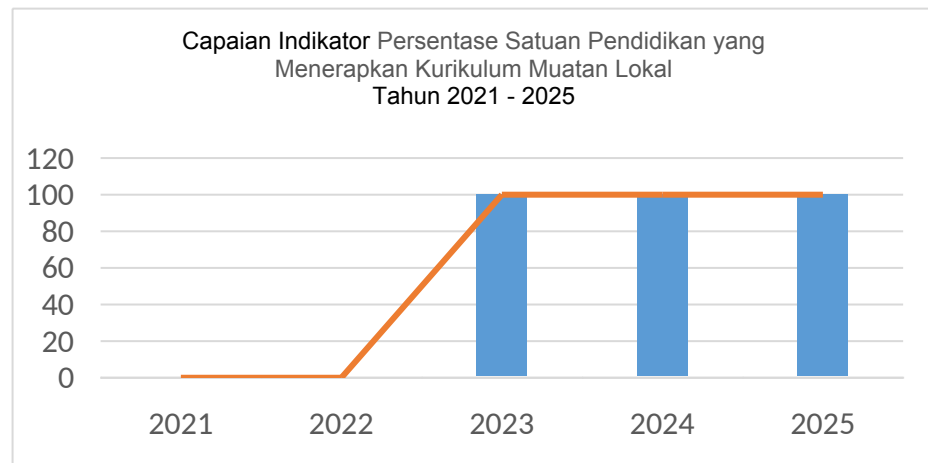
Capaian indikator ini menunjukkan peningkatan signifikan realisasi sejak tahun 2022, bahkan melebihi target pada tahun 2024 (222,83%). Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya partisipasi warga belajar pendidikan kesetaraan serta intensifikasi pendataan peserta didik nonformal. Namun, lonjakan capaian yang sangat tinggi juga mengindikasikan adanya perubahan basis data dan metode pendataan, sehingga diperlukan pengendalian kualitas data agar konsistensi dan validitas indikator tetap terjaga. Pada tahun 2025, capaian berada pada kisaran yang lebih stabil yaitu 94,17%.



Gambar 3. 16. Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun 2021 - 2025

e. Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

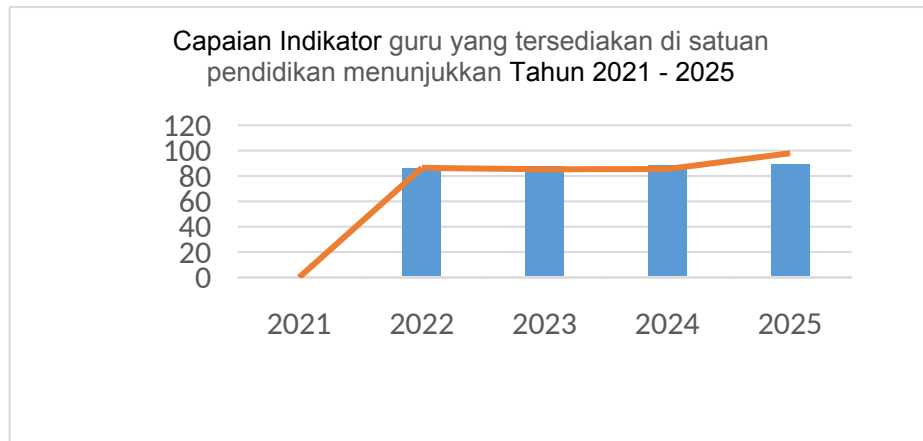
Capaian indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal sejak tahun 2023 hingga 2025, indikator ini telah mencapai 100% secara konsisten, menunjukkan keberhasilan kebijakan implementasi kurikulum muatan lokal pada seluruh satuan pendidikan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pembinaan satuan pendidikan serta komitmen pelestarian kearifan lokal melalui sistem pendidikan.



Gambar 3. 17. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Tahun 2021 - 2025

f. Persentase Guru yang Tersediakan di Satuan Pendidikan

Capaian indikator persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan menunjukkan tren peningkatan signifikan, khususnya pada tahun 2025 dengan realisasi **97,99%**, melampaui target **89,37%**. Capaian ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan pemenuhan dan redistribusi guru, optimalisasi penugasan, serta peningkatan akurasi pemetaan kebutuhan guru pada satuan pendidikan.



Gambar 3. 18. Perbandingan Capaian Indikator guru yang tersedia di satuan pendidikan Tahun 2021 - 2025

g. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional

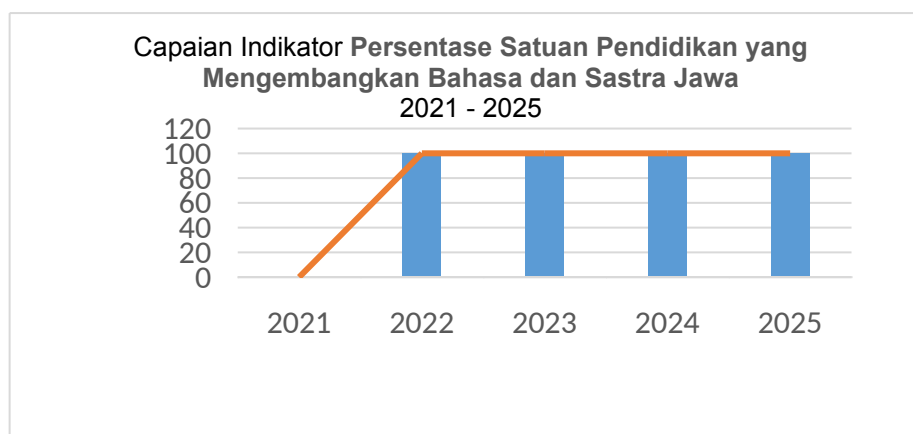
Indikator ini menunjukkan perbaikan kinerja **yang konsisten**, dari realisasi 95% pada tahun 2023–2024 menjadi 100% pada tahun 2025, sesuai target. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan terhadap regulasi perizinan serta efektivitas fasilitasi dan pembinaan perizinan oleh perangkat daerah.



Gambar 3. 19. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Satuan Pendidikan Yang Telah Memiliki Izin Operasional 2021 - 2025

h. Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa

Indikator pengembangan bahasa dan sastra Jawa/Surakarta menunjukkan kinerja optimal dan berkelanjutan, dengan capaian 100% sejak tahun 2022 hingga 2025. Capaian ini menunjukkan keberhasilan integrasi muatan budaya lokal dalam penyelenggaraan pendidikan.



Gambar 3. 20. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa 2021 - 2025

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 Dengan Target RPJMD Tahun 2021–2026

Tabel 3. 10. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

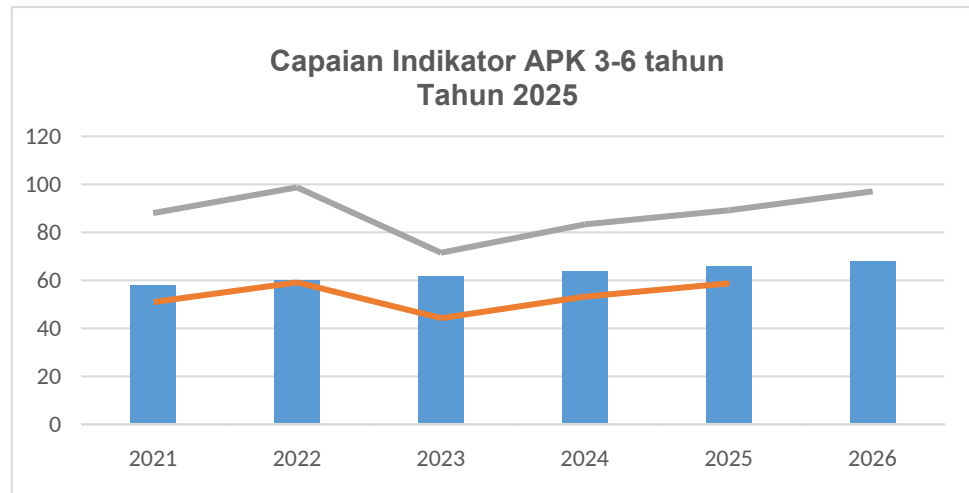
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Capaian (%)
1	APK 3-6 Tahun	%	57,9	50,96	88,01	59,9	59,14	98,73	61,9	44,26	71,50	63,9	53,24	83,32	Berhasil	65,9	58,76	89,17	Sangat Berhasil	67,9	97,05
2	APS 7-12 Tahun	%	99,52	99,5	99,98	99,55	99,47	99,92	99,58	99,98	100,40	99,98	99,9	99,92	Sangat Berhasil	99,98	99,52	99,54	Sangat Berhasil	99,67	100,31
3	APS 13-15 Tahun	%	98,1	100	101,94	98,2	98,84	100,65	98,3	99,44	101,16	99,61	99,96	100,35	Sangat Berhasil	99,61	95,50	95,87	Sangat Berhasil	98,6	101,02
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,34	15,44	100,65	15,65	94,2	601,92	15,91	94,1	591,45	94,8	222,83	235,05	Sangat Berhasil	94,8	94,17	99,34	Sangat Berhasil	16,92	560,28
5	Persentase satuan pendidikan yang telah	%	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a	0,00	1000	100,00	100	100	100	100,00	Sangat Berhasil	100	100	100,00	Sangat Berhasil	100	

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Capaian (%)
	menerapkan kurikulum muatan lokal																				
6	Persentase guru yang tersedia di satuan pendidikan	%	n/a	n/a	0,00	86,53	86,39	99,84	87,48	85,3	97,51	88,43	85,5	96,69	Sangat Berhasil	89,37	97,99	109,65	Sangat Berhasil	90,32	98,95
7	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	%	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a	0,00	100	95	95,00	100	95	95,00	Sangat Berhasil	100	100	100,00	Sangat Berhasil	100	100
8	Persentase satuan pendidikan yang telah membangun bahasa dan sastra jawa/solo	%	n/a	n/a	0,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	Sangat Berhasil	100	100	100,00	Sangat Berhasil	100	100
Rata-Rata Capaian					97,65			183,51			157,13			113,79				99,19			62,13

Secara umum, kinerja urusan pendidikan menunjukkan capaian sangat positif dan konsisten, dengan mayoritas indikator berada pada kategori “Sangat Berhasil” sejak tahun 2024 hingga 2025, serta mendukung pencapaian target akhir RPJMD 2026.

1. Indikator APK Usia 3–6 Tahun

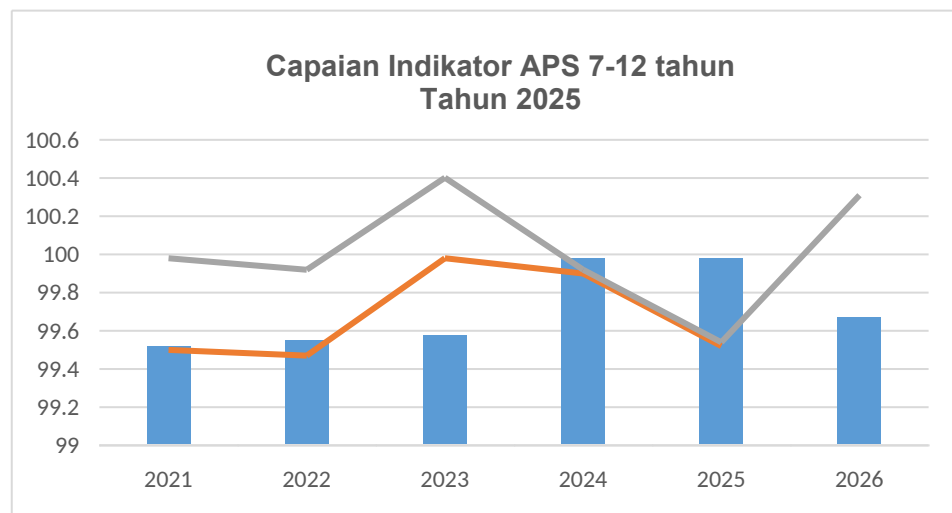
Capaian APK 3-6 tahun menunjukkan tren peningkatan bertahap, meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target tahunan. Pada tahun 2025, capaian sebesar 89,17% dikategorikan Sangat Berhasil, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan layanan PAUD, namun masih dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga dan preferensi pengasuhan nonformal. Target akhir RPJMD 2026 sebesar 97,05% menunjukkan ruang perbaikan yang realistis dan terukur.



Gambar 3. 21. Perbandingan realisasi APK 3-6 Tahun sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021-2026

2. Indikator APS Usia 7–12 Tahun

Indikator APS 7-12 tahun menunjukkan kinerja sangat stabil dan konsisten mendekati 100% sepanjang periode pengukuran. Capaian tahun 2025 sebesar 99,54% dan proyeksi akhir RPJMD 100,31% menegaskan keberhasilan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar serta efektivitas pemerataan akses pendidikan



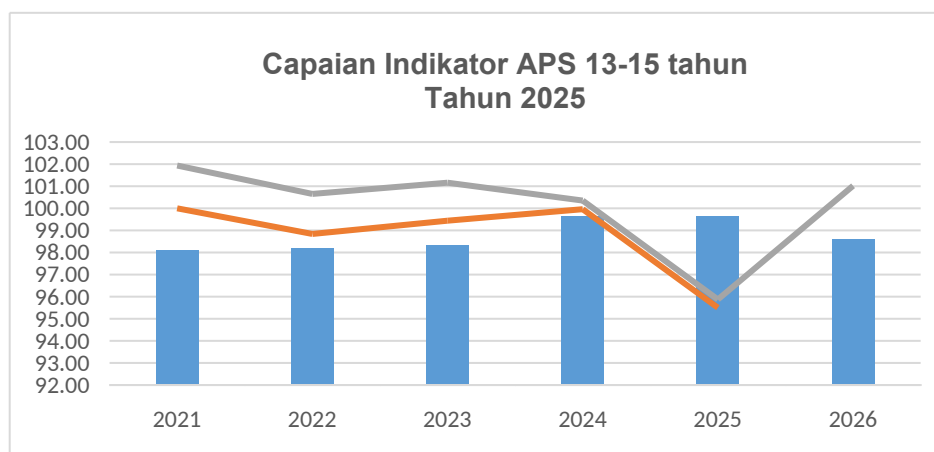
Gambar 3. 22. Perbandingan realisasi APS 7-12 Tahun sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021-2026

3. Indikator APS Usia 13–15 Tahun

Capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja sangat baik dan relatif stabil di atas target, dengan capaian berturut-turut sebesar 101,94 persen (2021), 100,65 persen (2022), 101,16 persen (2023), dan 100,35 persen

(2024) dengan predikat Sangat Berhasil. Pada Tahun 2025, realisasi APS mencapai 95,50 persen dari target 99,61 persen atau capaian 95,87 persen, yang meskipun mengalami penurunan tetap berada dalam kategori Sangat Berhasil. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi dan mobilitas penduduk usia sekolah, serta pembaruan data kependudukan.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator APS usia 13–15 tahun menunjukkan kinerja yang positif dan berada pada jalur yang mendukung pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 98,6 persen. Proyeksi capaian akhir RPJMD sebesar 101,02 persen mengindikasikan bahwa dengan penguatan intervensi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah pertama, target RPJMD berpotensi tercapai bahkan terlampaui.

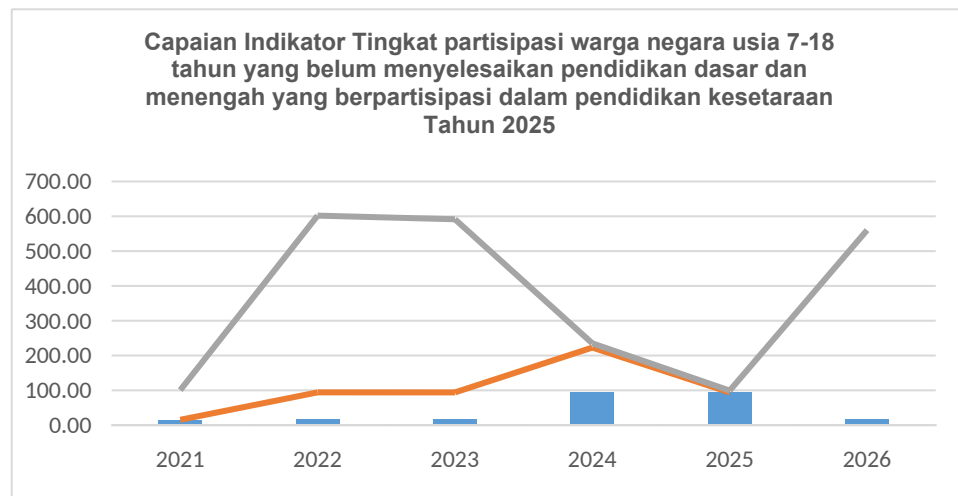


Gambar 3. 23. Perbandingan realisasi APS 13-15 Tahun sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

4. Indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

Selama periode 2021–2025, capaian indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan tren kinerja yang sangat baik dan konsisten berada pada kategori Sangat Berhasil. Pada Tahun 2025, realisasi indikator mencapai 94,17 persen dari target 94,8 persen atau setara dengan capaian kinerja sebesar 99,34 persen, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan perluasan akses layanan pendidikan nonformal. Namun demikian, tingginya capaian (di atas 200% pada beberapa tahun) juga menunjukkan adanya dinamika basis data dan

metode penghitungan, sehingga diperlukan penguatan konsistensi dan validasi data untuk menjaga akurasi indikator.



Gambar 3. 24. Perbandingan realisasi Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

5. Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

Pada periode 2021–2022, indikator ini belum ditetapkan sebagai target kinerja sehingga capaian tercatat 0,00%. Mulai tahun 2023, indikator ditetapkan secara penuh dengan target 100% dan berhasil direalisasikan 100% secara konsisten hingga tahun 2025, dengan predikat “Sangat Berhasil”. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai kebijakan daerah.

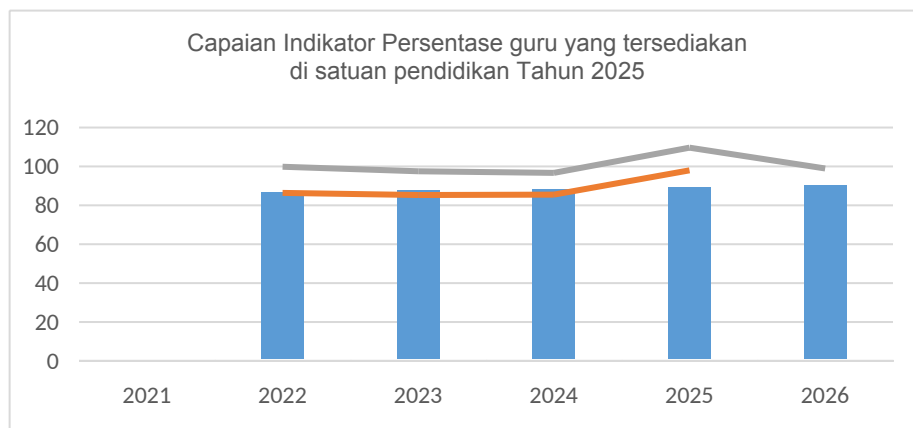
Capaian yang stabil dan berkelanjutan tersebut mencerminkan efektivitas pembinaan kurikulum, kesiapan satuan pendidikan, serta sinergi antara kebijakan daerah dan implementasi di tingkat sekolah. Target akhir RPJMD 2026 sebesar 100% dinilai realistis dan berkelanjutan, dengan fokus tindak lanjut pada penguatan mutu implementasi, monitoring berkala, dan integrasi muatan lokal dalam pembelajaran kontekstual.



Gambar 3. 25. Perbandingan realisasi Indikator Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

6. Indikator Persentase Guru yang Tersediakan Di Satuan Pendidikan

Indikator persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan mulai diukur secara efektif sejak tahun 2022, dengan capaian 99,84%, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Pada tahun 2023–2024, capaian relatif stabil pada kisaran 96–98%, menunjukkan bahwa kebutuhan guru secara umum telah terpenuhi, namun masih terdapat tantangan distribusi dan pemenuhan guru sesuai kualifikasi serta mata pelajaran tertentu. Pada tahun 2025, capaian meningkat signifikan menjadi 109,65%, melampaui target yang ditetapkan, dengan predikat “Sangat Berhasil”, yang mencerminkan efektivitas kebijakan penataan dan pemenuhan kebutuhan guru. Dengan capaian tersebut, target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 90,32% dinilai sangat realistis dan berkelanjutan, dengan fokus tindak lanjut pada penguatan pemerataan distribusi, penyesuaian kebutuhan riil satuan pendidikan, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya pendidik agar tetap efisien dan tepat sasaran.



Gambar 3. 26. Perbandingan realisasi Indikator Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal dengan RPJMD

7. Indikator Perizinan Operasional Satuan Pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin operasional mulai diukur secara efektif sejak tahun 2023, menunjukkan kepatuhan regulatif yang optimal, dengan capaian 100% sejak tahun 2025 dan berlanjut hingga target akhir RPJMD. Hal ini menandakan efektivitas fasilitasi perizinan dan pembinaan satuan pendidikan dengan pemanfaatan mekanisme verifikasi administratif dan pendampingan berkelanjutan



Gambar 3. 27. Perbandingan realisasi Indikator Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional Tahun 2025 dengan RPJMD

8. Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Mengembangkan Bahasa Dan Sastra Jawa/Solo

Capaian indikator Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra jawa/solo telah mencapai 100% secara konsisten sejak tahun 2022, 2025 dan berlanjut hingga target akhir RPJMD mencerminkan keberhasilan integrasi nilai budaya lokal dalam penyelenggaraan pendidikan di kota Surakarta



Gambar 3. 28. Perbandingan Capaian Persentase Satuan Pendidikan Yang Telah Mengembangkan Bahasa Dan Sastra Jawa/Solo Tahun 2022-2025 Dengan RPJMD

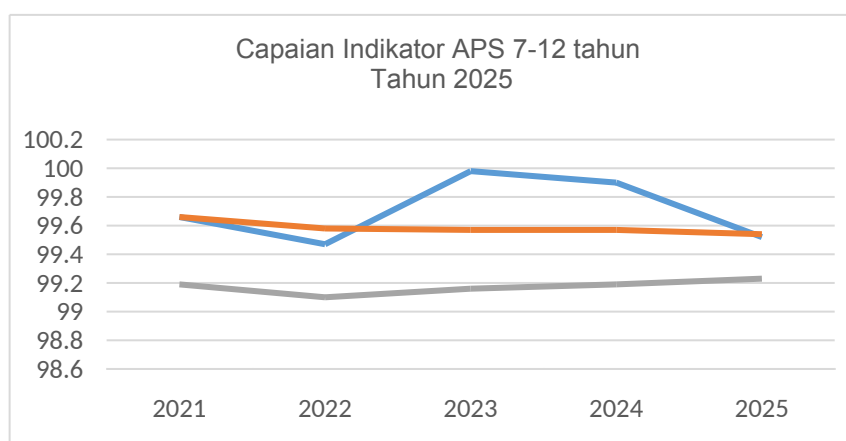
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tabel 3. 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Realisasi 2025	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	APS 7-12	%	99,98	99,52	99,54	99,54	99,23
2	APS 13 - 15	%	99,61	95,50	95,87	97,05	96,30

1. Indikator APS 7-12 tahun

Capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan terjaganya akses pendidikan dasar di Kota Surakarta. Dari target sebesar 99,98 persen, realisasi mencapai 99,52 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,54 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia sekolah dasar telah terlayani oleh sistem pendidikan formal. Jika dibandingkan secara regional, capaian APS 7–12 Tahun Kota Surakarta berada setara dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,54 persen serta lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang tercatat sebesar 99,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan dasar usia 7–12 tahun di Kota Surakarta telah terjaga secara optimal dan berada di atas capaian nasional.



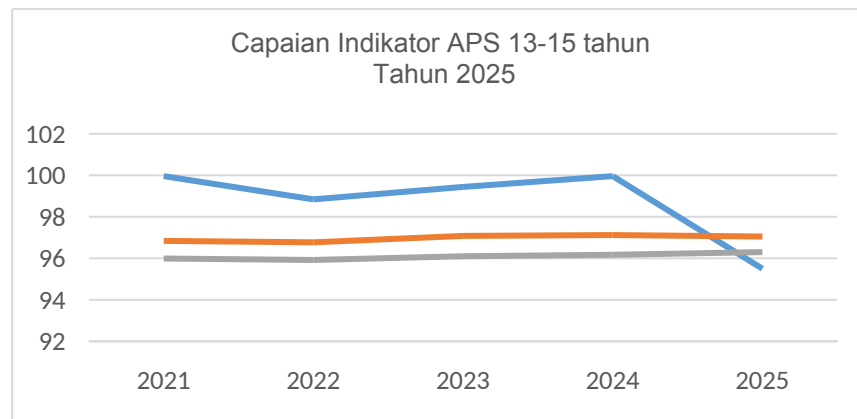
Gambar 3. 29. Perbandingan Realisasi APS 7-12 Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun Kota Surakarta selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat

baik dan konsisten. Pada tahun 2021–2025, APS Kota Surakarta berada pada kisaran 99,47–99,98 persen dan secara umum sebanding bahkan lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2023 dan 2024, APS Kota Surakarta melampaui capaian provinsi dan nasional, sedangkan pada tahun 2025 capaian Kota Surakarta sebesar 99,52 persen relatif setara dengan Provinsi Jawa Tengah (99,54 persen) dan lebih tinggi dari nasional (99,23 persen). Kondisi ini menunjukkan efektivitas upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menjaga akses dan pemerataan pendidikan dasar, meskipun tetap diperlukan penguatan monitoring dan validasi data untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya

2. Indikator APS 13-15 tahun

Capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik namun masih memerlukan penguatan. Dari target sebesar 99,61 persen, realisasi yang dicapai sebesar 95,50 persen dengan tingkat capaian kinerja 95,87 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia SMP telah berpartisipasi dalam pendidikan formal, namun masih terdapat kelompok sasaran yang belum sepenuhnya terlayani. Dibandingkan dengan capaian regional, APS 13–15 Tahun Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,05 persen dan juga lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 96,30 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika transisi peserta didik dari jenjang SD ke SMP, mobilitas penduduk, serta potensi putus sekolah pada usia remaja awal. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat pemantauan keberlanjutan sekolah, optimalisasi pendataan peserta didik usia SMP, serta sinergi dengan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait guna menjaga dan meningkatkan partisipasi pendidikan menengah pertama secara berkelanjutan.



Gambar 3. 30. Perbandingan Realisasi APS 13-15 Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun di Kota Surakarta selama periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan nilai capaian yang secara umum lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Pada tahun 2025, capaian APS 13–15 tahun Kota Surakarta tercatat sebesar 95,50 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,05 persen dan nasional sebesar 96,30 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat, sehingga diperlukan penguatan strategi pencegahan putus sekolah, optimalisasi pendataan peserta didik, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna menjaga keberlanjutan capaian APS pada tahun-tahun berikutnya

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan maupun ketidaktercapaian target kinerja disusun sebagai bagian dari upaya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang bersifat pendorong maupun penghambat, serta merumuskan alternatif solusi dan tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis pada periode berikutnya.

➤ Indikator APK 3–6 Tahun

Capaian indikator APK usia 3–6 tahun pada Tahun 2025 sebesar 89,17% dengan predikat **Sangat Berhasil**, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian didukung oleh :

1. Ketersediaan layanan PAUD,
2. Pelaksanaan pendampingan BOP PAUD, serta
3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini.

Adapun faktor penghambat :

1. Kondisi sosial ekonomi keluarga,
2. Preferensi/kecenderungan orang tua terhadap pengasuhan di rumah,
3. Dinamika mobilitas penduduk.

Sebagai tindak lanjut :

1. Dinas Pendidikan telah melakukan penguatan sosialisasi layanan PAUD,
2. Pendampingan satuan PAUD penerima BOP
3. Koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan partisipasi PAUD.

➤ **Indikator APS 7–12 Tahun**

Indikator APS usia 7–12 tahun pada Tahun 2025 mencapai 99,54% dengan predikat **Sangat Berhasil**. Keberhasilan ini didukung oleh :

1. Pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar,
2. Ketersediaan satuan pendidikan yang merata dan memadai,
3. Pemantauan partisipasi peserta didik melalui sistem pendataan dan pemutakhiran data peserta didik.
4. Dukungan program afirmasi bagi peserta didik

Hambatan yang muncul bersifat minimal dan lebih dipengaruhi oleh :

1. Mobilitas penduduk
2. Pembaruan data administrasi kependudukan.
3. Kondisi sosial ekonomi keluarga

Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Pemutakhiran data peserta didik secara berkala,
2. Pendampingan satuan pendidikan penerima BOSP
3. Penguatan koordinasi dengan sekolah,
4. Sinergi dengan perangkat daerah terkait.

➤ **Indikator APS 13–15 Tahun**

Capaian APS usia 13–15 tahun sebesar 95,87% dengan predikat **Sangat Berhasil** menunjukkan tingginya partisipasi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama, meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target. Faktor pendorong keberhasilan meliputi :

1. Tersedianya layanan pendidikan menengah pertama yang merata dan memadai,
2. Kebijakan pencegahan putus sekolah
3. Dukungan program afirmasi pendidikan.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain

1. Kondisi sosial ekonomi keluarga,
2. Potensi putus sekolah
3. Peserta didik yang berpindah domisili.

Sebagai tindak lanjut,

1. Dilakukan penguatan pendampingan peserta didik berisiko putus sekolah,
2. Optimalisasi peran sekolah, serta
3. Peningkatan akurasi pendataan.

➤ **Indikator Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan Usia 7–18 Tahun**

Capaian indikator partisipasi pendidikan kesetaraan mencapai 99,34%, menunjukkan realisasi yang sangat tinggi dibandingkan target, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Faktor pendorong keberhasilan meliputi :

1. Optimalisasi layanan PKBM
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan lembaga penyelenggara, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan
3. Meningkatnya partisipasi warga belajar pada satuan pendidikan kesetaraan
4. Dukungan pendataan sasaran yang lebih akurat dan Validasi data peserta didik nonformal
5. Tingginya capaian juga dipengaruhi oleh karakteristik indikator yang berbasis persentase terhadap target yang relatif kecil.

Hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan :

1. Rendahnya partisipasi dan keberlanjutan warga belajar akibat faktor ekonomi dan mobilitas kerja.

2. Keterbatasan tutor baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi di satuan pendidikan nonformal (PKBM) dan sarana prasarana pada PKBM serta dukungan pembelajaran berbasis TIK yang masih terbatas.
3. Pendanaan penyelenggaraan yang relatif terbatas, sehingga mempengaruhi kualitas layanan, intensitas pembelajaran, serta insentif bagi tutor pendidikan kesetaraan.
4. Koordinasi dan sinergi lintas sektor yang belum optimal, khususnya dalam menjangkau sasaran warga belajar putus sekolah, anak tidak sekolah, dan kelompok rentan.
5. Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan yang masih rendah, sehingga belum sepenuhnya dipandang sebagai jalur pendidikan yang setara dan memiliki peluang melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja

Tindak lanjut yang dilakukan adalah :

1. Penguatan pengelolaan layanan pendidikan kesetaraan (PKBM),
2. Peningkatan kualitas pendataan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna menjamin keberlanjutan layanan pendidikan kesetaraan.

➤ **Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal**

Capaian indikator ini sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil**. Keberhasilan didukung oleh :

1. Adanya kepatuhan satuan pendidikan terhadap kebijakan / regulasi daerah,
2. Kesiapan satuan pendidikan,
3. Pendampingan, pembinaan, monitoring dan implementasi kurikulum lokal secara berkelanjutan.

Kendala penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan :

1. Kesiapan satuan pendidikan yang belum merata, terutama dalam penyusunan dokumen kurikulum muatan lokal dan perangkat pembelajaran pendukung.
2. Keterbatasan pendidik yang kompeten dalam mengampu muatan lokal sesuai potensi dan kearifan lokal Kota Surakarta.

3. Belum optimalnya pendampingan dan supervisi, sehingga implementasi muatan lokal belum berjalan konsisten di seluruh satuan pendidikan.
4. Variasi pemahaman terhadap kebijakan kurikulum, khususnya dalam mengintegrasikan muatan lokal ke dalam Kurikulum Merdeka.
5. Keterbatasan sarana, bahan ajar, dan modul muatan lokal yang terstandar dan kontekstual.

Upaya Tindak Lanjut:

1. Penguatan kebijakan dan sosialisasi penerapan kurikulum muatan lokal kepada seluruh satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan, bimtek, dan komunitas belajar guru muatan lokal.
3. Pendampingan dan supervisi berkelanjutan terhadap satuan pendidikan dalam penyusunan dan implementasi kurikulum muatan lokal.
4. Pengembangan dan penyediaan bahan ajar muatan lokal yang kontekstual dengan potensi budaya, seni, dan kearifan lokal Kota Surakarta.
5. Penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perangkat daerah terkait dan pelaku budaya, untuk mendukung keberlanjutan implementasi muatan lokal

➤ **Indikator Persentase Guru yang Tersedia di Satuan Pendidikan**

Capaian indikator ketersediaan guru sebesar 109,65% dengan predikat Sangat Berhasil. Keberhasilan didukung oleh :

1. Optimalisasi penataan dan redistribusi guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
2. Pemenuhan kebutuhan guru melalui redistribusi, pengangkatan ASN/PPPK

3. Pemanfaatan guru tidak tetap

Hambatan yang dihadapi antara lain

1. Keterbatasan formasi dan distribusi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Sebagai solusi :

1. Dilakukan pemetaan kebutuhan guru,
2. Penataan dan Pendistribusian, serta

3. Koordinasi dengan instansi terkait.

➤ **Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional**

Indikator ini mencapai 100% dengan predikat Sangat Berhasil, Keberhasilan didukung oleh :

1. Fasilitasi perizinan, pendampingan administrasi satuan pendidikan, serta
2. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

Kendala yang muncul :

1. Umumnya pada awal periode disebabkan oleh proses pemenuhan persyaratan administratif.

Tindak lanjut dilakukan melalui :

1. Monitoring kepatuhan perizinan dan
2. Pembinaan administrasi, tata kelola dan fasilitasi perizinan satuan pendidikan
3. Pendampingan intensif dan percepatan layanan perizinan.

➤ **Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa/Solo**

Capaian indikator ini sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Keberhasilan didukung oleh :

1. Kebijakan daerah dalam pelestarian budaya lokal melalui pendidikan
2. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum.
3. Implementasi muatan lokal di seluruh satuan pendidikan

Hambatan relatif tidak signifikan.

1. Belum optimalnya integrasi Bahasa dan Sastra Jawa dalam kurikulum dan pembelajaran
2. Keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran yang kontekstual dan menarik
3. Rendahnya penggunaan Bahasa Jawa di lingkungan sekolah dan keluarga

Upaya tindak lanjut diarahkan pada :

- a. Penguatan kualitas pembelajaran dan pelestarian budaya lokal secara berkelanjutan.

- b. Penguatan implementasi kurikulum muatan lokal melalui penyusunan panduan, modul ajar, dan integrasi dalam pembelajaran tematik
- c. Pengembangan dan penyediaan bahan ajar, media digital, serta konten lokal Bahasa dan Sastra Jawa berbasis kearifan lokal Surakarta
- d. Pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa melalui program budaya sekolah, hari berbahasa Jawa, dan pelibatan orang tua.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Method*).

Selama Tahun 2025, telah dilakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

1. Man (Sumber Daya Manusia)

Optimalisasi penugasan pegawai sesuai kompetensi dan beban kerja, penguatan koordinasi dan sinergi antarbidang, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pembelajaran internal dan pendampingan teknis guna mendukung pencapaian kinerja secara efektif.

2. Method (Metode dan Tata Kelola)

Penyederhanaan metode dan mekanisme pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan perencanaan berbasis data kinerja, serta peningkatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien

3. Money (Anggaran)

Pengendalian dan rasionalisasi anggaran melalui penajaman prioritas program dan kegiatan, pengurangan belanja yang kurang berdampak langsung pada kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran, efisien, dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator : APK 3-6 tahun

Nama Program : Program Pengelolaan Pendidikan

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.02.2.03 Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			12.381.484.300,00	13.222.980.200,00	841.495.900,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.02.2.03.0002 Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		1 Unit	200.000.000,00	185.000.000,00	-15.000.000,00	Menyediakan lingkungan belajar PAUD yang layak dan memenuhi SPM sehingga meningkatkan kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anak usia 3–6 tahun dan memperluas daya tampung layanan PAUD
	Pembangunan Toilet PAUD Anak Indonesia		200.000.000,00	185.000.000,00	-15.000.000,00	
1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD		2 paket	150.445.000,00	150.445.000,00	-	Menjamin keberlangsungan layanan PAUD yang layak untuk menjaga partisipasi anak usia 3–6 tahun
	Pengadaan Mebel PAUD		150.445.000,00	150.445.000,00	-	
1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			86.400.000,00	86.400.000,00	-	Menjamin ketersediaan pendidik PAUD agar layanan berjalan dan APK usia 3–6 tahun terjaga.
	Pembayaran Honorarium Guru PAUD (SKB)	4 orang	86.400.000,00	86.400.000,00	-	
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		400 orang	1.121.064.800,00	802.633.600,00	-318.431.200,00	Meningkatkan mutu layanan PAUD yang mendorong minat orang tua menyekolahkan anak usia 3–6 tahun.
	Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut		114.353.300,00	-	-114.353.300,00	
	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian		57.403.000,00	11.848.000,00	-45.555.000,00	
	Fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi guru PAUD		416.742.900,00	-	-416.742.900,00	
	Peningkatan Kompetensi PTK PAUD		75.280.000,00	101.045.000,00	25.765.000,00	
	Peningkatan Pemenuhan Standar Kualifikasi Akademik S1 GURU PAUD Kota Surakarta		438.111.100,00	681.820.100,00	243.709.000,00	
	Penyelenggaraan Kegiatan Monev Sertifikasi, Non Sertifikasi dan Insentif PAUD Tahun 2025		19.174.500,00	7.920.500,00	-11.254.000,00	
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		387 Satuan pendidikan	250.674.500,00	595.674.500,00	345.000.000,00	Memperkuat tata kelola dan daya tarik PAUD guna meningkatkan akses dan partisipasi anak usia 3–6 tahun.
	BIMTEK KELAS ORANG TUA SEBAGAI SALAH SATU LAYANAN ESENSIAL DALAM IMPLEMENTASI PAUD HI UNTUK PPS			50.000.000,00	50.000.000,00	
	Bimtek Penyusunan Modul Ajar Yang Menyenangkan bagi Anak PAUD			-	-	
	Bimtek Transformasi Peran Orang Tua pada Implementasi PAUD HI untuk Percepatan Penurunan Stunting (PPS)		66.133.500,00	75.000.000,00	8.866.500,00	
	Hibah kepada KB & TK AT Bintangku			75.000.000,00	75.000.000,00	
	Hibah kepada Pos PAUD Bina Pergiwati Kemlayan			20.000.000,00	20.000.000,00	
	Lomba Gebyar PAUD		96.220.000,00	114.872.700,00	18.652.700,00	
	Lomba Stratifikasi PAUD Sehat		88.321.000,00	75.801.800,00	-12.519.200,00	
	Pentas Seni PAUD Kecamatan Banjarsari			30.000.000,00	30.000.000,00	
	Pentas Seni PAUD Kecamatan Jebres			30.000.000,00	30.000.000,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Pentas Seni PAUD Kecamatan Laweyan			30.000.000,00	30.000.000,00	
	Pentas Seni PAUD Kecamatan Pasar Kliwon			30.000.000,00	30.000.000,00	
	Pentas Seni PAUD Kecamatan Serengan			30.000.000,00	30.000.000,00	
	Penyusunan Perwali terkait Penguatan Raperda PAUD			35.000.000,00	35.000.000,00	
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD		405 satuan pendidikan	9.223.200.000,00	9.223.200.000,00	-	Menjamin operasional PAUD tanpa hambatan biaya sehingga mempertahankan dan meningkatkan APK usia 3-6 tahun.
	BOP PAUD Kinerja		225.000.000,00	225.000.000,00	-	
	BOP PAUD Negeri Reguler		451.800.000,00	451.800.000,00	-	
	Hibah BOP Reguler Swasta		8.546.400.000,00	8.546.400.000,00	-	
1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah		7 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Menjaga kelayakan sarana PAUD untuk mendukung keberlangsungan layanan dan APK usia 3-6 tahun.
	PEMELIHARAAN MEBEL PAUD			50.000.000,00	50.000.000,00	
	Pengadaan Mebel PAUD		50.000.000,00	-	-50.000.000,00	
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		1 dok	74.700.000,00	74.700.000,00	-	Meningkatkan efektivitas layanan PAUD yang berdampak pada peningkatan APK usia 3-6 tahun
	Pendampingan BOP PAUD		74.700.000,00	74.700.000,00	-	
1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		42 unit	125.000.000,00	125.000.000,00	-	Menjamin keamanan dan kenyamanan PAUD guna menjaga kehadiran anak usia 3-6 tahun.
	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Suku Cadang Komputer, Laptop, Printer PAUD Negeri		25.301.000,00	19.558.100,00	-5.742.900,00	
	Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan PAUD Negeri		99.699.000,00	105.441.900,00	5.742.900,00	
1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		1 unit	350.000.000,00	350.000.000,00	-	Meningkatkan kapasitas dan kelayakan PAUD untuk memperluas partisipasi anak usia 3-6 tahun.
	Rehabilitasi Hall Utama dan Area Bermain Sedang / Berat TK Negeri Pembina Banjarsari		350.000.000,00	-	-350.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas TK Negeri Pembina Banjarsari			350.000.000,00	350.000.000,00	
1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		7 paket	-	829.927.100,00	829.927.100,00	Mendukung peningkatan mutu pembelajaran PAUD yang berdampak pada peningkatan APK usia 3-6 tahun.
	Pengadaan Alat Praktik dan Sarpras SKB (DIF)			579.949.100,00	579.949.100,00	
	Pengadaan APE PAUD (DAK Fisik)			249.978.000,00	249.978.000,00	
1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		7 unit	750.000.000,00	750.000.000,00	-	Mendukung peningkatan kapasitas layanan PAUD yang berdampak pada peningkatan APK usia 3-6 tahun.
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sedang / Berat TK Negeri Bhineka			750.000.000,00	750.000.000,00	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sedang / Berat TK Negeri Pembina Bhineka		750.000.000,00	-	-750.000.000,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
		Total	12.381.484.300,00	13.222.980.200,00	841.495.900,00	

Secara agregat, program ini berkontribusi langsung dan signifikan terhadap peningkatan APK 3–6 tahun melalui perluasan daya tampung, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan keberlanjutan operasional satuan PAUD. Kenaikan anggaran pada perubahan menunjukkan respons terhadap kebutuhan riil lapangan untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi anak usia dini

Indikator : APS 7-12 tahun

Nama Program : Program Pengelolaan Pendidikan

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Pendidikan dasar sekolah dasar

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.02.2.01 Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			81.738.663.180,00	82.044.882.758,00	306.219.578,00	Menjamin penyediaan layanan pendidikan dasar yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh anak usia sekolah sehingga berkaitan langsung dengan ketercapaian IKU APS 7-12 tahun
1.01.02.2.01.0001 Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			11.756.006.000,00	11.856.006.000,00	100.000.000,00	Menambah daya tampung dan membuka akses pendidikan dasar sehingga berkaitan langsung dengan ketercapaian IKU APS 7-12 tahun
	DED Pembangunan SDN Purwotomo (Silpa DAU 2023/2024)	Unit		100.000.000,00	100.000.000,00	
	DED SDN Purwotomo (Silpa DAU 2023/2024)	Unit		-	-	
	Operasional Pindah Tempat Belajar Sementara	Keg		99.600.000,00	99.600.000,00	
	Pembangunan Lanjutan SDN Begalon (DAU Pendidikan)	Unit	3.149.585.000,00	3.120.985.000,00	-28.600.000,00	
	Pembangunan Lanjutan SDN Madyotaman (DAU Pendidikan)	Unit	1.436.101.000,00	1.438.301.000,00	2.200.000,00	
	Pembangunan SDN Sekip (DAU Pendidikan)	Unit	7.170.320.000,00	7.097.120.000,00	-73.200.000,00	
1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				207.000.000,00	207.000.000,00	Mendukung kualitas layanan dan manajemen sekolah. kegiatan ini berdampak pada peningkatan tata kelola, dan iklim pembelajaran yang menopang APK
	Rehab Ruang Guru SD Mangkuyudan	Ruang		-	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDN Mangkuyudan (Silpa DAU 2023/2024)	Ruang		520.000,00	520.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDN Mangkuyudan (Silpa DAU 2023/2024)	Ruang		206.480.000,00	206.480.000,00	
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			600.000.000,00	600.000.000,00	-	Meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan minat bersekolah. Kegiatan berdampak pada peningkatan mutu dan iklim pembelajaran yang menopang APK.

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Rehabilitasi ruang perpustakaan sekolah	Ruang	600.000.000,00	-	-600.000.000,00	
	Rehabilitasi ruang perpustakaan sekolah (APBD)	Ruang		600.000.000,00	600.000.000,00	
1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah			350.000.000,00	648.760.000,00	298.760.000,00	Meningkatkan kenyamanan dan kelayakan sarana belajar Kegiatan berdampak pada iklim pembelajaran yang nyaman yang menopang APK.
	Pengadaan mebel SD (Bankeu)	Paket		-	-	
	Pengadaan Mebel Sekolah (SILPA DAU 2023/2024)	Paket		298.760.000,00	298.760.000,00	
	Pengadaan meubeler sekolah dasar	Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			3.724.447.000,00	3.724.447.000,00	-	Menjamin operasional sekolah dan mengurangi hambatan biaya sehingga berkaitan langsung dengan ketercapaian IKU APS 7-12 tahun
	Bahan Material dan Bangunan		970.000.000,00	919.719.720,00	-50.280.280,00	
	Belanja ATK BOSP SD Negeri		280.174.500,00	284.537.300,00	4.362.800,00	
	Belanja ATK Operasional Kegiatan BOSP		13.319.000,00	13.319.000,00	-	
	BOSP SD Negeri		158.957.600,00	158.957.600,00	-	
	Hibah BOSP SD Swasta		441.775.400,00	441.775.400,00	-	
	Kegiatan FGD		27.300.000,00	27.300.000,00	-	
	Pemeliharaan SD Negeri			10.569.000,00	10.569.000,00	
	Penyediaan Alat Olahraga SD Negeri		138.692.500,00	128.022.500,00	-10.670.000,00	
	Penyediaan Alat-Alat dan Bahan Kebersihan SD Negeri		337.646.500,00	322.931.500,00	-14.715.000,00	
	Penyediaan Alat-Alat Listrik SD Negeri		144.906.500,00	145.916.980,00	1.010.480,00	
	Penyediaan Cetak BOSP SD Negeri		461.800.000,00	461.800.000,00	-	
	Penyediaan Copy Penggandaan BOSP SD Negeri dan Kegiatan Bidang SD		285.800.000,00	298.908.000,00	13.108.000,00	
	Penyediaan Makan Minum Kegiatan BOSP/BOS		32.850.000,00	33.600.000,00	750.000,00	
	Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/ Bimtek/Desk Kegiatan BOS/BOSP	Keg	23.205.000,00	23.205.000,00	-	
	Rapat Kegiatan Persiapan dan Evaluasi BOS/BOSP	Keg	37.950.000,00	43.200.000,00	5.250.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Bidang Pendidikan	Keg		23.205.000,00	23.205.000,00	
	Tukang		300.000.000,00	-	-300.000.000,00	
	Upah Tukang SD			351.480.000,00	351.480.000,00	
	Workshop Penguatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOSP	Keg	23.205.000,00	21.600.000,00	-1.605.000,00	
	Workshop Sistem ARKAS Tahun Anggaran 2025	Keg	23.660.000,00	14.400.000,00	-9.260.000,00	
	Workshop Tentang Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 Satuan Pendidikan	Keg	23.205.000,00	-	-23.205.000,00	
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			666.000.000,00	725.640.000,00	59.640.000,00	Menekan potensi putus sekolah
	Belanja sewa angkutan barang kegiatan Lomba MAPSI/MAPKRIS			1.776.000,00	1.776.000,00	
	Penyelenggaraan Lomba FLS2N		9.426.000,00	-	-9.426.000,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Penyelenggaraan Lomba FLS3N			9.360.000,00	9.360.000,00	
	Penyelenggaraan Lomba KSN/OSN		7.899.000,00	14.100.000,00	6.201.000,00	
	Penyelenggaraan Lomba Mapkat		7.500.000,00	7.500.000,00	-	
	Penyelenggaraan Lomba Mapkris		16.428.000,00	25.500.000,00	9.072.000,00	
	Penyelenggaraan Lomba Mapsi		86.754.000,00	85.920.000,00	-834.000,00	
	Penyelenggaraan Lomba OSN			38.400.000,00	38.400.000,00	
	Penyelenggaraan lomba-lomba KSN/OSN,KOSN/O2S N,FLS2N,MAPSI,MAP KRIS,dan MAPKATH		489.168.000,00	-	-489.168.000,00	
	Penyelenggaraan lomba-lomba OSN/O2SN,FLS3N,M APSI,MAPKRIS,dan MAPKATH			533.484.000,00	533.484.000,00	
	Penyelenggaran Lomba KOSN/O2SN		48.825.000,00	9.600.000,00	-39.225.000,00	
1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			20.000.000,00	20.000.000,00	-	Menjamin ketersediaan layanan pendidikan dasar.
	Fasilitasi Layanan Kepegawaian		20.000.000,00	-	-20.000.000,00	
	Pengembang Teknologi Untuk Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik di Satuan Pendidikan			20.000.000,00	20.000.000,00	
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			2.336.952.000,00	135.600.000,00	- 2.201.352.000,00	Meningkatkan mutu pembelajaran dan kepercayaan masyarakat.
	Fasilitasi dan Pendampingan Kebijakan Pendidikan			-	-	
	FASILITASI KEPEGAWAIAN		48.600.000,00	48.600.000,00	-	
	FASILITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU PENGGERAK		1.950.000,00	1.960.000,00	10.000,00	
	Fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi guru SD		2.216.152.000,00	14.790.000,00	- 2.201.362.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi dan Non Sertifikasi		15.000.000,00	-	-15.000.000,00	
	MONITORING DAN EVALUASI SERTIFIKASI DAN NON SERTIFIKASI		-	15.000.000,00	15.000.000,00	
	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR		55.250.000,00	55.250.000,00	-	
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			655.025.000,00	505.492.260,00	-149.532.740,00	Memperkuat tata kelola dan iklim sekolah inklusif
	Hibah DPKS		120.000.000,00	120.000.000,00	-	
	Hibah IPPK		75.000.000,00	-	-75.000.000,00	
	Hibah PGRI		150.000.000,00	150.000.000,00	-	
	Honor Narasumber Pembinaan Kelembagaan Sekolah		10.800.000,00	34.200.000,00	23.400.000,00	
	Honor Tim Pelaksana		82.000.000,00	41.000.000,00	-41.000.000,00	
	Manajemen Berbasis Sekolah		36.400.000,00	20.160.000,00	-16.240.000,00	
	Pemanfaatan Media Pembelajaran		14.400.000,00	-	-14.400.000,00	
	Pendampingan Sekolah Sehat			22.850.000,00	22.850.000,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar		31.850.000,00	14.400.000,00	-17.450.000,00	
	Pengenalan Pencegahan Penyakit Menular Pada Satuan Pendidikan			-	-	
	Peningkatan Kompetensi Dalam Pembelajaran Paradigma Baru		36.750.000,00	13.269.500,00	-23.480.500,00	
	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Manajerial Sekolah		22.750.000,00	-	-22.750.000,00	
	Penyelenggaraan HARDIKNAS			55.702.760,00	55.702.760,00	
	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif		47.775.000,00	16.150.000,00	-31.625.000,00	
	Workshop Pemanfaatan TIK dalam manajemen Sekolah pada program guru pendidik		27.300.000,00	17.760.000,00	-9.540.000,00	
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			49.918.100.000,00	49.959.122.318,00	41.022.318,00	Menjaga keterjangkauan biaya dan mencegah putus sekolah sehingga berkaitan langsung dengan ketercapaian IKU APS 7-12 tahun
	BOSP-BOS Kinerja SD Negeri		1.460.000.000,00	1.627.500.000,00	167.500.000,00	
	BOSP-BOS Reguler SD Negeri		22.933.800.000,00	22.974.822.318,00	41.022.318,00	
	Hibah BOSP-BOS Kinerja SD Swasta (DAK NON FISIK)		762.500.000,00	595.000.000,00	-167.500.000,00	
	Hibah BOSP-BOS Reguler SD Swasta (DAK NON FISIK)		24.661.800.000,00	24.661.800.000,00	-	
	Operasional Penunjang Pengelolaan Dana BOS SD		100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			28.800.000,00	28.800.000,00	-	Menjamin efektivitas dan akuntabilitas pendanaan pendidikan. Kegiatan ini berdampak pada peningkatan tata kelola dan iklim pembelajaran yang menopang APK
	Sosialisasi Juknis, Permen, Evaluasi BOS		28.800.000,00	28.800.000,00	-	
1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			20.961.700,00	20.961.700,00	-	Mendukung pembelajaran adaptif dan menarik. Kegiatan ini berdampak pada mutu dan iklim pembelajaran yang menopang APK
	Pemanfaatan Platfrom Pendidikan		20.961.700,00	20.961.700,00	-	
1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			20.854.700,00	20.854.700,00	-	Meningkatkan kualitas dan akses pembelajaran
	Bimbingan Teknis tentang konten pembelajaran digital		20.854.700,00	20.854.700,00	-	
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			25.060.000,00	25.060.000,00	-	Menjamin keterpaduan pelaksanaan layanan pendidikan. Kegiatan ini berdampak pada mutu dan iklim pembelajaran yang menopang APK
	Koordinasi , Perencanaan, Supervis, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan pada Satuan Pendidikan		25.060.000,00	25.060.000,00	-	
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			55.000.000,00	55.000.000,00	-	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kegiatan ini berdampak pada iklim pembelajaran yang menopang APK.
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Kebijakan		55.000.000,00	55.000.000,00	-	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Pendidikan					
1.01.02.2.01.0041 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			24.939.700,00	24.939.700,00	-	Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar Kegiatan ini berdampak pada peningkatan mutu dan iklim pembelajaran yang menopang APK.
	Pelatihan dan Pembekalan Tentang Metode Pembelajaran Inovatif dan Penggunaan Teknologi Dalam Pembelajaran			24.939.500,00	24.939.500,00	
	Pembulatan			200	200	
	Penguatan Literasi Numerasi Pendidikan		24.939.700,00	-	-24.939.700,00	
1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			74.261.000,00	74.261.000,00	-	Menciptakan lingkungan sekolah aman dan inklusif sehingga berkaitan langsung dengan ketercapaian IKU APS 7-12 tahun
	Monitoring dan Evaluasi TPPK Pada Satuan Pendidikan		27.100.000,00	25.155.000,00	-1.945.000,00	
	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan		47.161.000,00	49.106.000,00	1.945.000,00	
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			6.878.705.080,00	6.878.705.080,00	-	Mengurangi hambatan ekonomi dan mendorong partisipasi sekolah sehingga berkaitan langsung dengan ketercapaian IKU APS 7-12 tahun
	Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) (DAU PENDIDIKAN)		6.773.150.000,00	6.773.150.000,00	-	
	Pendampingan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta		105.555.080,00	105.555.080,00	-	
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Meningkatkan kelayakan dan kapasitas sekolah dasar sehingga berkaitan langsung dengan ketercapaian IKU APS 7-12 tahun
	Rehab pagar sekolah, toilet/jamban		1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Paket 1 Laweyan - Serengan			331.838.500,00	331.838.500,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Paket 2 Banjarsari - Jebres			441.821.500,00	441.821.500,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Paket 3 Pasar Kliwon			226.340.000,00	226.340.000,00	
1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			27.466.000,00	27.466.000,00	-	Meningkatkan mutu layanan dan pembelajar Kegiatan ini berdampak pada peningkatan mutu dan iklim pembelajaran yang menopang APK
	Bimtek penyusunan modul ajar kurikulum merdeka		27.466.000,00	-	-27.466.000,00	
	Bimtek Penyusunan Perangkat Ajar Pada Satuan Pendidikan			27.466.000,00	27.466.000,00	
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			175.690.000,00	255.050.000,00	79.360.000,00	Menjamin keberlangsungan pendidikan dan kelulusan siswa sehingga berkaitan langsung dengan ketercapaian IKU APS 7-12 tahun

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Minimum Nasional			-	-	
	Penyelenggaraan Asesmen Nasional			53.664.000,00	53.664.000,00	
	Penyelenggaraan Asesment Kompetensi Minimum Nasional (ANBK)		53.690.000,00	-	-53.690.000,00	
	Penyelenggaraan Ujian Sekolah			40.360.000,00	40.360.000,00	
	Penyelenggaraan Ujian Sekolah, Penulisan Ijasah, dan Pendistribusi Ijasah			40.800.000,00	40.800.000,00	
	Penyelenggaraan Ujian Sekolah, Penulisan Ijasah, dan Pendistribusi Ijasah		122.000.000,00	120.226.000,00	-1.774.000,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		2.150.000.000,00	4.271.300.000,00	2.121.300.000,00	Menambah dan memperbaiki daya tampung ruang belajar sehingga berkaitan langsung dengan ketercapaian IKU APS 7-12 tahun
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (APBD)			2.001.300.000,00	2.001.300.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Paket 1 (SILPA DAU 2023/2024)			1.059.909.200,00	1.059.909.200,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Paket 2 (SILPA DAU 2023/2024)			1.060.090.800,00	1.060.090.800,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Tegalrejo (DAU Pendidikan)		150.000.000,00	150.000.000,00	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		1.230.395.000,00	980.417.000,00	-249.978.000,00	Meningkatkan kualitas dan daya tarik pembelajaran Kegiatan ini berdampak pada peningkatan mutu dan iklim pembelajaran yang menopang APK.
	Belanja peralatan TIK sekolah			5.876.000,00	5.876.000,00	
	Belanja peralatan TIK sekolah		400.000.000,00	394.124.000,00	-5.876.000,00	
	Hibah pengadaan TIK SD NDM (DAU Pendidikan)			28.516.000,00	28.516.000,00	
	Pengadaan TIK SD (DAK Fisik)		645.041.000,00	395.063.000,00	-249.978.000,00	
	Pengadaan TIK SD (DAU Pendidikan)		185.354.000,00	156.838.000,00	-28.516.000,00	
	Total		245.215.989.540,00	246.134.648.274,00	918.658.734,00	

Pencapaian IKU Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 7–12 tahun didukung secara signifikan oleh kegiatan-kegiatan dominan yang berorientasi pada perluasan akses, peningkatan daya tampung, serta keterjangkauan layanan pendidikan dasar. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah, pengelolaan Dana BOS, bantuan perlengkapan peserta didik, serta penyelenggaraan proses belajar menjadi faktor utama dalam menjaga dan meningkatkan partisipasi pendidikan dasar.

Selain itu, penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif turut berperan dalam menekan potensi putus sekolah. Kegiatan

pendukung lainnya memperkuat kualitas layanan dan keberlanjutan partisipasi, sehingga secara keseluruhan program pengelolaan pendidikan sekolah dasar telah selaras dan efektif dalam mendukung pencapaian target APK usia 7–12 tahun

Indikator : APS 13-15 tahun

Nama Program : Program Pengelolaan Pendidikan

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Dasar sekolah menengah pertama

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			48.844.348.400,00	50.310.066.697,00	1.465.718.297,00	Program ini memastikan tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata, terjangkau, dan berkelanjutan sehingga berdampak langsung mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium		2 ruang	240.000.000,00	240.000.000,00	-	Meningkatkan mutu pembelajaran SMP Kegiatan ini berdampak pada peningkatan mutu dan iklim pembelajaran mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
	Pembangunan Laboratorium SMPN 5 SURAKARTA (DAU PENDIDIKAN)		240.000.000,00	216.850.000,00	-23.150.000,00	
	Pembangunan Laboratorium SMPN 5 SURAKARTA (DAU PENDIDIKAN)			23.150.000,00	23.150.000,00	
1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir		1 unit	478.080.000,00	-	-478.080.000,00	Fasilitas penunjang operasional sekolah yang mendukung kenyamanan lingkungan belajar Kegiatan ini berdampak pada iklim pembelajaran
	Pembangunan Gedung Parkir SMPN 5 (DAU PENDIDIKAN)		478.080.000,00	-	-478.080.000,00	
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3 unit	2.368.080.000,00	3.742.665.000,00	1.374.585.000,00	Meningkatkan kelayakan dan kapasitas layanan sekolah SMP dalam memperluas akses dan daya tampung peserta didik usia 13–15 tahun sehingga berkaitan langsung peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
	Pembangunan Lapangan SMP (DAU PENDIDIKAN)		1.420.000.000,00	-	-1.420.000.000,00	
	Pembangunan Lapangan SMPN 22 (APBD)			544.000,00	544.000,00	
	Pembangunan Lapangan SMPN 22 (DAU PENDIDIKAN)			1.417.431.000,00	1.417.431.000,00	
	Pembangunan Lapangan SMPN 22 SKA (DAU PENDIDIKAN)			3.150.000,00	3.150.000,00	
	PEMBANGUNAN MASJID BARU SMP (DAU PENDIDIKAN)		948.080.000,00	-	-948.080.000,00	
	Pembangunan Masjid Baru SMPN 5 (APBD)			946.540.000,00	946.540.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMPN 27 (Silpa DAU 2023/2024)			1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		24 ruang	2.776.580.000,00	4.141.580.000,00	1.365.000.000,00	Menambah dan menjaga kapasitas ruang belajar sehingga mendukung peningkatan partisipasi sekolah usia 13–15 tahun sehingga berkaitan langsung peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
	DED SMPN 15 (Silpa DAU 2023/2024)			55.000.000,00	55.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Khusus Olahraga (Silpa DAU 2023/2024)			200.000.000,00	200.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Khusus Olahraga eks SMP 5 (Silpa DAU 2023/2024)			-	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 2 & 4 SURAKARTA (DAU PENDIDIKAN)		1.668.500.000,00	-	-1.668.500.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 2 (DAU PENDIDIKAN)			1.117.250.000,00	1.117.250.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 4 (DAU PENDIDIKAN)			541.250.000,00	541.250.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SMPN 9 (DAU PENDIDIKAN)		1.108.080.000,00	1.118.080.000,00	10.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Tahap 2 SMPN 14 (Silpa DAU 2023/2024)			1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	
1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		1 unit	-	200.000.000,00	200.000.000,00	Meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan minat bersekolah. Kegiatan berdampak pada peningkatan mutu dan iklim pembelajaran yang menopang APS
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMPN 17 (Silpa DAU 2023/2024)			200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		38 unit	7.000.000.000,00	5.950.000.000,00	-1.050.000.000,00	Meningkatkan kelayakan lingkungan sekolah dan keberlanjutan layanan pendidikan SMP sehingga berkaitan langsung peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
	Pembangunan Lapangan SMPN 22 (DAU PENDIDIKAN)		50.000.000,00	-	-50.000.000,00	
	Rehab Sarpras Utilitas SMPN		2.000.000.000,00	-	-2.000.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMPN 20 (APBD)			546.850.000,00	546.850.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP Khusus Olahraga (APBD)		3.500.000.000,00	3.496.850.000,00	-3.150.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMPN 1 (APBD)		1.450.000.000,00	1.330.000.000,00	-120.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMPN 2 (APBD)			570.000.000,00	570.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMPN 20 (APBD)			3.150.000,00	3.150.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP Khusus Olahraga (APBD)			3.150.000,00	3.150.000,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah		4 paket	450.000.000,00	747.536.037,00	297.536.037,00	Meningkatkan kenyamanan belajar sehingga mendukung keberlanjutan kehadiran peserta didik.
	Pengadaan Mebel SMP		450.000.000,00	450.000.000,00	-	
	Pengadaan Mebel SMPN (Bankeu)			-	-	
	Pengadaan Mebel SMPN (Silpa DAU 2023/2024)			297.536.037,00	297.536.037,00	
1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		10922 paket	1.636.059.000,00	1.826.162.000,00	190.103.000,00	Menunjang operasional sekolah dan mengurangi hambatan biaya pendidikan peserta didik usia 13–15 tahun sehingga berkaitan langsung peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
	Hibah BOSP SMP Swasta		900.000.000,00	676.700.000,00	-223.300.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		736.059.000,00	-	-736.059.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (APBD)			120.996.000,00	120.996.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAU PENDIDIKAN)			665.478.000,00	665.478.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMPN 13 (Silpa DAU 2023/2024)			362.988.000,00	362.988.000,00	
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		110 peserta didik	1.179.697.300,00	909.809.160,00	-269.888.140,00	Meningkatkan keterikatan siswa terhadap sekolah dan menekan potensi putus sekolah
	Penyediaan Transport dan Akomodasi Kontingen dan Pendamping ke Tingkat Provinsi		156.228.900,00	61.719.000,00	-94.509.900,00	
	Penyelenggaraan FLS2N		131.673.700,00	-	-131.673.700,00	
	Penyelenggaraan FLS3N			89.682.400,00	89.682.400,00	
	Penyelenggaraan GSI		141.319.000,00	91.105.900,00	-50.213.100,00	
	Penyelenggaraan KREASSO		351.191.700,00	400.000.000,00	48.808.300,00	
	Penyelenggaraan MAPKAT		23.750.000,00	-	-23.750.000,00	
	Penyelenggaraan MAPKRIS		26.866.100,00	-	-26.866.100,00	
	Penyelenggaraan MAPSI		132.800.000,00	166.181.800,00	33.381.800,00	
	Penyelenggaraan O2SN		137.344.100,00	77.793.160,00	-59.550.940,00	
	Penyelenggaraan OPSI		25.250.000,00	-	-25.250.000,00	
	Penyelenggaraan OSN		53.273.800,00	23.326.900,00	-29.946.900,00	
1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		6416 orang	30.888.500,00	30.888.500,00	-	Menjamin ketersediaan layanan pembelajaran yang berkualitas Kegiatan berdampak pada peningkatan mutu dan iklim pembelajaran yang menopang APS
	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru untuk menjadi Guru Pembimbing Khusus			145.000,00	145.000,00	
	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru untuk menjadi Guru Pembimbing Khusus		18.653.700,00	18.508.300,00	-145.400,00	
	Pendampingan Penilaian Kinerja		12.234.800,00	12.235.200,00	400	
1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1958 orang	2.382.923.200,00	142.949.600,00	-2.239.973.600,00	Meningkatkan profesionalisme pendidik yang berdampak pada mutu layanan pendidikan. Kegiatan berdampak pada peningkatan mutu dan iklim pembelajaran yang menopang APS

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian		15.864.000,00	14.928.700,00	-935.300,00	
	Fasilitasi dan Pendampingan Kebijakan Pendidikan Sekolah Menengah			-	-	
	Fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi guru SMP		2.239.973.600,00	-	-2.239.973.600,00	
	MONITORING EVALUASI SERTIVIKASI DAN NON SERTIFIKASI		29.142.800,00	29.123.000,00	-19.800,00	
	Pendampingan Pengawas Sekolah Ke Satuan Pendidikan		11.349.000,00	11.826.200,00	477.200,00	
	Penilaian PAK		16.350.800,00	16.757.000,00	406.200,00	
	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah/Guru		47.526.100,00	47.256.500,00	-269.600,00	
	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data PTK		3.600.000,00	3.600.000,00	-	
	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data PTK		19.116.900,00	19.458.200,00	341.300,00	
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		72 satuan pendidikan	804.368.000,00	1.104.630.400,00	300.262.400,00	Memperkuat tata kelola sekolah, sistem penerimaan peserta didik, dan layanan inklusif. Kegiatan berdampak pada peningkatan mutu, tata kelola dan iklim pembelajaran yang menopang APS
	Hibah BMPS		60.000.000,00	60.000.000,00	-	
	Honorarium Kegiatan Assesment ABK SPMB			16.000.000,00	16.000.000,00	
	Pelaksanaan Asesment ABK SPMB			8.107.600,00	8.107.600,00	
	Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Didik Baru (SPMB)			250.460.000,00	250.460.000,00	
	Penerapan MBS dan PBD Jenjang SMP		4.368.000,00	13.815.000,00	9.447.000,00	
	Penyelenggaraan Sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)			900.000,00	900.000,00	
	Penyelenggaraan ANBK			6.182.400,00	6.182.400,00	
	Penyelenggaraan Sosialisasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS)			900.000,00	900.000,00	
	Penyelenggaraan Sosialisasi Penulisan Ijazah			8.265.400,00	8.265.400,00	
	Sarapan Bersama Gizi Seimbang untuk Minum TTD bagi Remaja Putri jenjang SMP/ sederajat (Stunting)		740.000.000,00	740.000.000,00	-	
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		70 orang	13.207.850.000,00	12.876.150.000,00	-331.700.000,00	Menjaga keterjangkauan biaya pendidikan dan mencegah putus sekolah usia 13–15 tahun. sehingga berkaitan langsung peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
	BOSP-BOS Kinerja SMP Negeri		963.750.000,00	58.750.000,00	-905.000.000,00	
	Hibah BOSP-BOS Kinerja SMP Swasta (DAK NON FISIK)		-	350.000.000,00	350.000.000,00	
	Hibah BOSP-BOS Reguler SMP Swasta (DAK NON FISIK)		12.244.100.000,00	12.467.400.000,00	223.300.000,00	
1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		70 orang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pendanaan sekolah. Kegiatan berdampak pada peningkatan mutu, tata kelola dan iklim pembelajaran yang menopang APS

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Pendampingan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Dana BOS Jenjang SMP		14.886.400,00	15.000.000,00	113.600,00	
	Sosialisasi JUKNIS BOS dan ARKAS		113.600,00	-	-113.600,00	
1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		72 orang	2.135.000,00	71.885.400,00	69.750.400,00	Mendukung inovasi pembelajaran dan minat belajar peserta didik Kegiatan berdampak pada peningkatan mutu, tata kelola dan iklim pembelajaran yang menopang APS
	Bimtek Digitalisasi Pembelajaran		2.135.000,00	-	-2.135.000,00	
	Pembinaan Penggunaan 3D printing dalam Pembelajaran berbasis STEM			71.885.400,00	71.885.400,00	
1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		1 konten digital	2.880.000,00	900.000,00	-1.980.000,00	Meningkatkan kualitas dan fleksibilitas pembelajaran SMP.
	Pengembangan konten digital untuk pembelajaran pendidikan		2.880.000,00	900.000,00	-1.980.000,00	
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		72 dokumen	9.784.000,00	900.000,00	-8.884.000,00	Pendampingan PIP mencegah putus sekolah peserta didik dari keluarga rentan sehingga menjaga APS usia 13–15 tahun.
	Pendampingan Proses Pengusulan dan pencairan PIP Jenjang SMP		9.784.000,00	900.000,00	-8.884.000,00	
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		1 dokumen	-	900.000,00	900.000,00	Meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak peserta didik. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan kapasitas pendidik
	Pendampingan Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan			900.000,00	900.000,00	
1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1 komunitas	4.863.000,00	-	-4.863.000,00	Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan kapasitas pendidik Kegiatan berdampak pada peningkatan mutu, tata kelola dan iklim pembelajaran yang menopang APS
	Capacity Building Komunitas Belajar untuk peningkatan Literasi Numerasi		4.863.000,00	-	-4.863.000,00	
1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1 keg	-	900.000,00	900.000,00	Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif sehingga menekan risiko putus sekolah usia 13–15 tahun.
	Pendampingan Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan			900.000,00	900.000,00	
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		72 satuan pendidikan	3.279.400.400,00	2.995.200.000,00	-284.200.400,00	Menjamin keberlangsungan pendidikan dan kehadiran peserta didik SMP sehingga berkaitan langsung peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
	Pelaksanaan Asessment ABK PPDB		35.225.000,00	-	-35.225.000,00	
	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)		229.017.000,00	-	-229.017.000,00	
	Pendampingan E-Raport		110.000,00	-	-110.000,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Penyediaan Makan Minum Siswa SMP Khusus Olahraga (SKO)		2.995.200.000,00	2.995.200.000,00	-	
	Penyelenggaraan ANBK (Assesment Nasional Berbasis Komputer)		11.625.000,00	-	-11.625.000,00	
	Penyelenggaraan Sosialisasi Penulisan Ijazah		8.223.400,00	-	-8.223.400,00	
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru		2 ruang	7.709.160.000,00	8.709.160.000,00	1.000.000.000,00	enambah daya tampung SMP sehingga memperluas akses pendidikan usia 13–15 tahun. sehingga berkaitan langsung peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
	Pembangunan dan Rehab Ruang Kelas SMPN 11 (DAU PENDIDIKAN)		1.446.160.000,00	-	-1.446.160.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 11 (DAU PENDIDIKAN)			1.415.010.000,00	1.415.010.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 11 (DAU PENDIDIKAN)			3.150.000,00	3.150.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 12 (DAU PENDIDIKAN)			538.922.900,00	538.922.900,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 14 (DAU PENDIDIKAN)			1.115.077.100,00	1.115.077.100,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 & 22 SURAKARTA (DAU PENDIDIKAN)		4.011.000.000,00	-	-4.011.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 (DAU PENDIDIKAN)			990.500.000,00	990.500.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 22 (DAU PENDIDIKAN)			3.455.500.000,00	3.455.500.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 7 & 14 SURAKARTA (DAU PENDIDIKAN)		2.252.000.000,00	-	-2.252.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 7 (DAU PENDIDIKAN)			1.191.000.000,00	1.191.000.000,00	
1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		10922 orang	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	-	Bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu secara langsung mencegah putus sekolah dan meningkatkan APS usia 13–15 tahun. sehingga berkaitan langsung peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun
	Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) jenjang SMP (DAU PENDIDIKAN)		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	
	Penyelenggaraan Pendampingan BPMKS		50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		2 paket	216.600.000,00	1.552.850.600,00	1.336.250.600,00	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya tarik sekolah. Kegiatan berdampak pada peningkatan mutu, tata kelola dan iklim pembelajaran yang menopang APS
	Pengadaan Sarana Prasarana SMP Khusus Olahraga (DIF)			398.712.400,00	398.712.400,00	
	Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 27 (Silpa DAU 2023/2024)			60.538.500,00	60.538.500,00	
	Pengadaan Alat Olahraga SMP Khusus Olahraga (Silpa DAU 2023/2024)			516.999.700,00	516.999.700,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Pengadaan Alat Praktik LAB IPA (DAK FISIK)		216.600.000,00	216.600.000,00	-	
	Pengadaan Printer 3D (APBD)			180.000.000,00	180.000.000,00	
	Pengadaan Printer 3D (Silpa DAU 2023/2024)			180.000.000,00	180.000.000,00	
		Total	48.844.348.400,00	50.310.066.697,00	1.465.718.297,00	

Peningkatan APS usia 13–15 tahun terutama didukung oleh kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruang belajar, pengelolaan Dana BOS, bantuan pendidikan (BPMKS), pendampingan PIP, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Kegiatan lainnya berperan sebagai pendukung mutu dan tata kelola layanan pendidikan SMP.

Indikator : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

Nama Program : Program Pengelolaan Pendidikan

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			6.636.908.700,00	6.989.425.630,00	352.516.930,00	Program ini memastikan tersedianya layanan pendidikan Kesetaraan yang merata, terjangkau, dan berkelanjutan sehingga berdampak langsung mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan
1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		13 orang	166.500.000,00	166.500.000,00	-	menjamin ketersediaan tutor sehingga berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan belajar warga belajar usia 7-18 tahun dan meningkatkan partisipasi warga belajar kesetaraan
	Pemenuhan biaya honorarium tutor kejar paket (SKB)		166.500.000,00	166.500.000,00	-	
1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		16 satuan pendidikan	620.899.300,00	673.381.130,00	52.481.830,00	penguatan kapasitas dan keberlanjutan lembaga kesetaraan
	Hibah kepada FK PKBM		50.000.000,00	50.000.000,00	-	
	Hibah Kepada PKBM Pelangi			75.000.000,00	75.000.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Jambore Pendidikan Kesetaraan		29.480.500,00	27.692.000,00	-1.788.500,00	
	Pelaksanaan Kegiatan PNFest		479.282.300,00	455.725.730,00	-23.556.570,00	
	Pembuatan Aplikasi Jelajah Kursus Solo (JKS) Dinas Pendidikan		62.136.500,00	64.963.400,00	2.826.900,00	
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		16 satuan pendidikan	3.699.700.000,00	3.699.700.000,00	-	menjamin keterjangkauan biaya dan keberlanjutan partisipasi warga belajar sehingga berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan belajar warga belajar usia 7-18 tahun
	BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja Negeri		45.000.000,00	45.000.000,00	-	
	BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Negeri		126.600.000,00	126.600.000,00	-	
	Hibah BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja Swasta (DAK NON FISIK)		90.000.000,00	90.000.000,00	-	
	Hibah BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Swasta (DAK NON FISIK)		3.438.100.000,00	3.438.100.000,00	-	
1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		24 dok	25.031.700,00	49.000.300,00	23.968.600,00	Menjamin keterpaduan dan efektifitas pelaksanaan layanan pendidikan. Kegiatan ini berdampak pada mutu dan iklim pembelajaran yang menopang keberlangsungan layanan belajar warga belajar usia 7-18 tahun
	Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kinerja LKP			23.968.600,00	23.968.600,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Satuan Pendidikan dan Kesetaraan		25.031.700,00	25.031.700,00	-	
1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		1 dok	40.850.000,00	40.850.000,00	-	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Pelaksanaan Pendampingan BOP Kesetaraan		34.350.000,00	25.700.000,00	-8.650.000,00	
	Pelaksanaan Pendampingan BOP Kesetaraan		6.500.000,00	15.150.000,00	8.650.000,00	
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 keg	10.331.200,00	9.311.200,00	-1.020.000,00	menciptakan lingkungan belajar aman bagi warga belajar kesetaraan. Kegiatan ini berdampak pada mutu dan iklim pembelajaran yang menopang keberlangsungan layanan belajar warga belajar usia 7–18 tahun
	Sosialisasi Pendampingan Perundungan Kekerasan		10.331.200,00	9.311.200,00	-1.020.000,00	
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	19 orang	200.000.000,00	-	-200.000.000,00	peningkatan kompetensi penyelenggara layanan
	Penyelenggaraan BIMTEK Peningkatan Kompetensi Pengelola PKBM dan Tutor		200.000.000,00	-	-200.000.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		273.596.500,00	272.603.000,00	-993.500,00	meningkatkan keikutsertaan dan keberlanjutan belajar warga usia 7–18 tahun sehingga berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan belajar warga belajar usia 7–18 tahun
	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Pelatihan Desain Grafis bagi masyarakat surakarta (SKB)	1 keg	17.000.000,00	17.000.000,00	-	
	Kegiatan ANBK Pendidikan NonFormal	1 keg	26.710.000,00	33.010.000,00	6.300.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah	1 keg		71.461.000,00	71.461.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah		71.982.500,00	-	-71.982.500,00	
	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Keterampilan Menjahit bagi masyarakat surakarta (SKB)	1 keg	30.449.800,00	29.977.800,00	-472.000,00	
	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Keterampilan Merias Wajah bagi masyarakat surakarta (SKB)	1 keg	34.999.900,00	34.999.900,00	-	
	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Keterampilan Tata Boga bagi masyarakat surakarta (SKB)	1 keg	24.999.700,00	24.999.700,00	-	
	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Membuat Hantaran bagi masyarakat surakarta (SKB)	1 keg	24.999.000,00	24.999.000,00	-	
	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Pelatihan Desain Grafis bagi masyarakat surakarta (SKB)		18.000.000,00	18.000.000,00	-	
	Penyelenggaraan Kegiatan UK Pendidikan Non Formal	1 keg	24.455.600,00	18.155.600,00	-6.300.000,00	
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 unit	1.600.000.000,00	2.078.080.000,00	478.080.000,00	meningkatkan kapasitas dan daya tampung layanan kesetaraan yang berdampak langsung dalam keberlangsungan layanan belajar warga belajar usia 7–18 tahun

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
	Penyediaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor / Tempat Pendidikan		100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	Rehabilitasi sedang/berat SKB SURAKARTA (DAU)		1.500.000.000,00	1.978.080.000,00	478.080.000,00	
		Total	6.636.908.700,00	6.989.425.630,00	352.516.930,00	

Pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan secara umum berkontribusi langsung terhadap peningkatan indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan. Kontribusi utama ditunjukkan melalui penyediaan dan pembiayaan pendidik serta tenaga kependidikan kesetaraan, pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, penyelenggaraan proses belajar warga belajar, penanganan serta pendataan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah, serta pemberian bantuan operasional dan hibah kepada PKBM negeri maupun swasta. Kegiatan tersebut secara langsung memperluas akses, menjaga keterjangkauan biaya, dan menjamin keberlanjutan layanan pendidikan kesetaraan.

Sementara itu, kegiatan pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola dan tutor, sosialisasi kebijakan, serta pemeliharaan sarana prasarana berperan sebagai dukungan tidak langsung melalui penguatan mutu, tata kelola, dan kelayakan layanan pendidikan kesetaraan. Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dan mendukung pencapaian IKU pendidikan kesetaraan sesuai target kinerja dinas.

Indikator : Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

Nama Program : Program Pengembangan Kurikulum

Nama Kegiatan : 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			200.000.000,00	206.823.500,00	6.823.500,00	Berpengaruh langsung terhadap peningkatan persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal melalui penguatan kebijakan, model, dan implementasi kurikulum
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			155.000.000,00	164.663.500,00	9.663.500,00	Mendukung langsung penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar melalui penetapan dan penguatan substansi kurikulum
1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		247 orang	45.000.000,00	72.813.500,00	27.813.500,00	Berpengaruh langsung dalam meningkatkan kesiapan satuan pendidikan menerapkan kurikulum muatan lokal melalui peningkatan kompetensi pendidik
	Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Batik			26.953.500,00	26.953.500,00	
	Bimbingan Teknis Penyusunan Model Pembelajaran Muatan Lokal		45.000.000,00	45.860.000,00	860.000,00	
1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar		2 dok	110.000.000,00	91.850.000,00	-18.150.000,00	Mendukung langsung penerapan kurikulum muatan lokal melalui penyediaan model pembelajaran yang aplikatif.
	Penyusunan Model - Model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Dasar Jenjang SD		60.000.000,00	46.900.000,00	-13.100.000,00	
	Penyusunan Model - Model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Dasar Jenjang SMP		50.000.000,00	44.950.000,00	-5.050.000,00	
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			45.000.000,00	42.160.000,00	-2.840.000,00	Mendukung langsung penerapan kurikulum muatan lokal melalui penyediaan model pembelajaran yang aplikatif.
1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		1 dok	45.000.000,00	42.160.000,00	-2.840.000,00	Mendukung langsung perluasan penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan PAUD dan pendidikan nonformal.
	Penyusunan Model - Model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		45.000.000,00	42.160.000,00	-2.840.000,00	
		Total	200.000.000,00	206.823.500,00	6.823.500,00	

Indikator : Persentase Guru yang Tersediakan Di Satuan Pendidikan

Nama Program : Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nama Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			28.669.890.080,00	28.497.815.800,00	-172.074.280,00	Berpengaruh langsung terhadap peningkatan persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan melalui pemetaan, pemenuhan, dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			28.669.890.080,00	28.497.815.800,00	-172.074.280,00	Mendukung langsung pemenuhan kebutuhan guru pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3 dok	375.000.000,00	301.969.200,00	-73.030.800,00	Berpengaruh langsung dalam memastikan ketersediaan guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan melalui pemetaan dan perencanaan kebutuhan
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pokok Pendidikan		125.000.000,00	-	-125.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		60.000.000,00	145.409.200,00	85.409.200,00	
	Pemeliharaan Aplikasi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		65.000.000,00	50.450.000,00	-14.550.000,00	
	Penetapan Calon Kepala Sekolah			106.110.000,00	106.110.000,00	
	Penetapan Calon Kepala Sekolah dari Guru Penggerak		125.000.000,00	-	-125.000.000,00	
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3 dok	28.294.890.080,00	28.195.846.600,00	-99.043.480,00	Berpengaruh langsung terhadap pemerataan dan pemenuhan guru di seluruh satuan pendidikan
	Monitoring dan Evaluasi TKPK GTT dan PTT pada Satuan Pendidikan Negeri		75.000.000,00	69.500.000,00	-5.500.000,00	
	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor Upah TKPK GTT dan PTT Dinas Pendidikan dan Upah ke 13			2.845.740.000,00	2.845.740.000,00	
	Pembayaran Jasa Tenaga Alih Daya (OC) GTT PTT		6.721.778.088,00	7.919.230.000,00	1.197.451.912,00	
	Pembayaran Jasa Tenaga Alih Daya (OC) Keamanan		1.536.502.500,00	1.934.650.588,00	398.148.088,00	
	Pembayaran Jasa TKPK GTT dan PTT Dinas Pendidikan		19.831.609.492,00	15.305.739.512,00	-4.525.869.980,00	
	Pemeliharaan Aplikasi Absensi TKPK		30.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	
	Penataan Pengawas Sekolah		50.000.000,00	36.250.000,00	-13.750.000,00	
	Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah		50.000.000,00	59.736.500,00	9.736.500,00	
	Total		28.669.890.080,00	28.497.815.800,00	-172.074.280,00	

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendukung pencapaian IKU Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan melalui penguatan perencanaan, pemetaan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar, PAUD, serta pendidikan nonformal/kesetaraan. Kegiatan perhitungan dan pemetaan PTK, didukung pengelolaan dan pemeliharaan sistem data, menjadi dasar penyusunan kebijakan pemenuhan kebutuhan guru yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, kegiatan penataan pendistribusian PTK, termasuk monitoring dan evaluasi GTT/PTT serta pemenuhan hak kepegawaian melalui pembayaran jasa, berkontribusi langsung dalam menjaga keberlangsungan ketersediaan guru pada satuan pendidikan. Penataan pengawas sekolah serta proses penetapan dan serah terima jabatan kepala sekolah turut memperkuat tata kelola satuan pendidikan, sehingga penugasan dan pemanfaatan guru dapat berjalan lebih efektif dan merata.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program ini berperan signifikan dalam memastikan ketercukupan dan pemerataan guru pada satuan pendidikan, baik dari aspek jumlah maupun keberlanjutan penugasan, sehingga secara langsung mendukung peningkatan capaian IKU Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan.

Indikator : Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Memiliki Izin Operasional

Nama Program : Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Nama Kegiatan : 1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			195.000.000,00	193.070.000,00	-1.930.000,00	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan persentase satuan pendidikan yang memiliki izin operasional melalui penataan proses perizinan, penilaian kelayakan, serta pengendalian dan pengawasan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Program ini memastikan seluruh satuan pendidikan memenuhi ketentuan perizinan secara tertib dan akuntabel
1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100%	105.000.000,00	130.060.000,00	25.060.000,00	Kegiatan ini berpengaruh langsung terhadap IKU melalui pelaksanaan penilaian kelayakan dan penerbitan izin operasional satuan pendidikan dasar, serta pengendalian dan pengawasan kepatuhan izin. Pelaksanaan kegiatan mendorong peningkatan jumlah satuan pendidikan dasar berizin operasional.
1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 dok	75.000.000,00	102.060.000,00	27.060.000,00	Berpengaruh langsung melalui proses verifikasi kelayakan sebagai dasar penerbitan izin operasional satuan pendidikan dasar.
	Pengusulan Perizinan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP		75.000.000,00	102.060.000,00	27.060.000,00	
1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 dok	30.000.000,00	28.000.000,00	-2.000.000,00	Berpengaruh langsung dalam memastikan kepatuhan dan validitas izin operasional PAUD dan pendidikan nonformal.
	Pemantauan dan Pengawasan Pengusulan Perizinan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP		30.000.000,00	28.000.000,00	-2.000.000,00	
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100%	90.000.000,00	63.010.000,00	-26.990.000,00	egiatan ini mendukung pencapaian IKU secara langsung melalui penilaian kelayakan, penerbitan izin operasional, serta pengawasan berkelanjutan terhadap PAUD dan pendidikan nonformal. Dukungan sistem informasi perizinan turut memperkuat efektivitas dan ketertiban proses perizinan.
1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 dok	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Berpengaruh langsung sebagai tahapan penilaian awal penerbitan izin operasional PAUD dan pendidikan nonformal
	Sistem Informasi Pengusulan Perizinan		50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 dok	40.000.000,00	38.010.000,00	-1.990.000,00	Berpengaruh langsung dalam memastikan kepatuhan dan validitas izin operasional PAUD dan pendidikan nonformal.
	Pemantauan dan Pengawasan Pengusulan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal		40.000.000,00	38.010.000,00	-1.990.000,00	
	Total		780.000.000,00	772.280.000,00	-7.720.000,00	

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan mendukung pencapaian IKU Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional melalui penilaian kelayakan, penerbitan izin, serta pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat. Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan dan dukungan sistem informasi perizinan memastikan proses perizinan berjalan tertib, akuntabel, dan tepat waktu sehingga meningkatkan kepatuhan satuan pendidikan terhadap ketentuan izin operasional.

Indikator : Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Mengembangkan Bahasa Dan Sastra Jawa/Solo

Nama Program : Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Nama Kegiatan : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Murni (rp)	Anggaran Perubahan (rp)	Efisiensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan IKU OPD
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		1	963.000.000,00	921.949.000,00	-41.051.000,00	Program ini berkaitan langsung dengan IKU karena menjadi payung intervensi peningkatan kapasitas, praktik pembelajaran, dan apresiasi Bahasa dan Sastra Jawa di satuan pendidikan. Seluruh kegiatan dalam program diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan persentase satuan pendidikan yang aktif mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa.
1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	963.000.000,00	921.949.000,00	-41.051.000,00	Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap IKU melalui pembinaan dan penguatan implementasi Bahasa dan Sastra Jawa di sekolah. Pelaksanaan kegiatan mendorong satuan pendidikan tidak hanya menggunakan, tetapi juga mengembangkan model dan praktik pembelajaran Bahasa Jawa secara berkelanjutan

1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota		1 bahasa	330.000.000,00	188.949.000,00	-141.051.000,00	Subkegiatan ini mendukung langsung pencapaian IKU dengan memastikan keberlanjutan penggunaan dan pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa di lingkungan satuan pendidikan melalui pendekatan pembelajaran dan komunitas literasi.
	Diseminasi Model Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah		151.005.000,00	72.449.000,00	-78.556.000,00	
	Diseminasi Model Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah Jenjang SD		88.795.000,00	59.150.000,00	-29.645.000,00	
	Diseminasi Model Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah Jenjang SMP		60.200.000,00	22.750.000,00	-37.450.000,00	
	Pembinaan Komunitas Literasi Bahasa dan Sastra Jawa di Sekolah		30.000.000,00	34.600.000,00	4.600.000,00	
1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		1 keg	633.000.000,00	733.000.000,00	100.000.000,00	Subkegiatan ini berkontribusi langsung terhadap IKU melalui peningkatan minat, partisipasi, dan komitmen satuan pendidikan dalam pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa.
	Festival Tunas Bahasa Ibu		633.000.000,00	733.000.000,00	100.000.000,00	Berpengaruh langsung dan dominan terhadap IKU karena mendorong keterlibatan aktif satuan pendidikan, memperluas partisipasi sekolah, serta memperkuat komitmen pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa secara institusional.
		Total	3.852.000.000,00	3.687.796.000,00	-164.204.000,00	

Program Pengembangan Bahasa dan Sastra mendukung pencapaian IKU persentase satuan pendidikan yang mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa melalui pembinaan, revitalisasi, dan peningkatan apresiasi Bahasa dan Sastra Daerah pada jenjang SD dan SMP. Kegiatan pembinaan dan diseminasi model pembelajaran memperkuat kapasitas satuan pendidikan dalam penerapan Bahasa Jawa sebagai muatan lokal, sedangkan pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu meningkatkan partisipasi dan komitmen sekolah. Efisiensi dan penyesuaian anggaran tidak mengurangi ketercapaian output, sehingga tetap berdampak positif terhadap peningkatan jumlah dan persentase satuan pendidikan pengembang Bahasa dan Sastra Jawa di Kota Surakarta.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

1. Indikator APK PAUD 3–6 Tahun

Pencapaian kinerja APK PAUD 3–6 Tahun ditunjang secara signifikan oleh peningkatan akses dan daya tampung satuan PAUD, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, serta pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik PAUD, yang mendorong meningkatnya partisipasi anak usia dini dalam layanan pendidikan

Pencapaian kinerja ini di dukung program pengelolaan pendidikan melalui kegiatan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- i. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- ii. Pengadaan Mebel PAUD
- iii. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- iv. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- v. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- vi. Pengelolaan Dana BOP PAUD
- vii. Pemeliharaan Mebel Sekolah
- viii. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- ix. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- x. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- xi. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
- xii. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Adapun potensi kegagalan atau belum optimalnya capaian kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan satuan PAUD di wilayah tertentu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, serta faktor sosial ekonomi keluarga yang berdampak pada keberlanjutan partisipasi anak. Meskipun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan tetap memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan APK PAUD dan mendukung pencapaian IKU dinas.

	Pemenuhan Kualifikasi S1 Guru PAUD melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pemenuhan kualifikasi S1 Guru PAUD di Surakarta dilakukan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A, yang mengakui pengalaman kerja, diklat, dan pendidikan nonformal sebagai SKS, memungkinkan studi lebih cepat (2-4 semester) tanpa meninggalkan tugas mengajar. Program ini diselenggarakan oleh LPTK seperti FKIP UNS dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
	Pentas Seni PAUD per kecamatan. Pentas Seni PAUD di Surakarta yang dilaksanakan per kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas anak usia dini.
	Kegiatan Gebyar PAUD 2025 di Taman Balekambang Surakarta, Rabu (11/06/2025) Dinas Pendidikan Kota Solo sukses menyelenggarakan 'Gebyar PAUD 2025' pada Rabu, (11/06/2025). Acara digelar meriah dan penuh makna di Taman Balekambang Solo ini bertujuan untuk membangun kreativitas anak-anak PAUD se Kota Surakarta

2. APS 7-12 tahun

Pencapaian kinerja APS usia 7–12 tahun ditunjang secara signifikan oleh pemenuhan layanan pendidikan dasar, khususnya melalui penyediaan dan pemerataan guru, penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), serta pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah dasar, yang secara langsung meningkatkan akses, keberlanjutan, dan kenyamanan peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja dinas :

Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Sub Kegiatan

- a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- d. Pengadaan Mebel Sekolah
- e. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- f. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- g. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- h. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- i. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- j. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- k. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- l. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- m. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- n. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- o. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- p. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- q. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- r. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- s. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- t. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- u. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- v. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- w. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Adapun potensi kegagalan atau belum optimalnya capaian APS dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti mobilitas penduduk, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta kasus anak tidak sekolah dan putus sekolah, yang memerlukan penanganan lintas sektor. Meskipun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan tetap berkontribusi positif dalam menjaga dan meningkatkan APS usia 7–12 tahun di Surakarta.



3. APS 13-15 tahun

Pencapaian kinerja APS usia 13–15 tahun ditunjang secara signifikan oleh penyelenggaraan pendidikan menengah pertama, khususnya melalui pemenuhan dan pemerataan guru SMP, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta peningkatan kualitas dan kelayakan sarana prasarana SMP, yang mendorong keberlanjutan partisipasi peserta didik pada jenjang pendidikan wajib belajar.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja dinas :

Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sub kegiatan ;

- a. Pembangunan Laboratorium
- b. Pembangunan Fasilitas Parkir
- c. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- g. Pengadaan Mebel Sekolah

- h. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- i. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- j. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- k. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- l. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- m. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- n. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- o. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- p. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- q. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- r. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- s. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- t. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- u. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- v. Pembangunan Ruang Kelas Baru
- w. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- x. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Adapun potensi kegagalan atau belum optimalnya capaian APS dipengaruhi oleh risiko putus sekolah pada masa transisi SD ke SMP, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta rendahnya motivasi belajar sebagian peserta didik. Program pencegahan anak putus sekolah dan penguatan pendampingan peserta didik berperan penting, namun membutuhkan penguatan lintas sektor agar dampaknya terhadap APS usia 13–15 tahun lebih optimal.

	KREASSO (Kreasi Anak Sekolah Solo) 2025 diselenggarakan pada 24-25 September 2025 di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Surakarta, menampilkan pentas seni, pameran inovasi, dan lomba robotik/coding dari pelajar TK hingga SMA/SMK. Acara tahunan yang didukung Pemkot dan Dinas Pendidikan Solo ini bertujuan mewadahi kreativitas, bakat, dan karakter berbudaya
	Dinas Pendidikan Kota Surakarta menyelenggarakan kegiatan Diklat Pembelajaran Mendalam yang diikuti oleh para kepala sekolah dan guru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Surakarta. Kegiatan ini berlangsung selama enam hari, mulai dari tanggal 10 hingga 15 September 2025. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan materi dan pendampingan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, strategi pedagogi yang berpihak pada siswa, serta praktik refleksi untuk perbaikan berkelanjutan dalam kegiatan belajar-mengajar

4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Pencapaian indikator partisipasi pendidikan kesetaraan ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan nonformal/kesetaraan, khususnya melalui penyaluran BOP Kesetaraan, penyediaan tutor kejar paket, serta penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah, yang secara langsung memperluas akses layanan pendidikan bagi warga usia 7–18 tahun di luar sistem pendidikan formal. Dukungan pembiayaan operasional dan ketersediaan pendidik menjadi faktor kunci keberlangsungan

keikutsertaan peserta didik dalam program kesetaraan. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja dinas :

Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sub kegiatan ;

- a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- c. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- d. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- e. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- f. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- g. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- h. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- i. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Adapun belum optimalnya capaian indikator dipengaruhi oleh rendahnya motivasi belajar dan keberlanjutan kehadiran peserta didik, keterbatasan efektivitas pendataan anak tidak sekolah, serta kendala sosial ekonomi keluarga. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan yang belum setara dengan pendidikan formal turut membatasi peningkatan partisipasi, sehingga program yang ada lebih berperan sebagai upaya pencegahan penurunan partisipasi daripada pendorong peningkatan signifikan



PNFFest (Pendidikan Non Formal Festival) dan peluncuran Jelajah Kursus Solo adalah Program Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk meningkatkan keterampilan (skill) dan daya saing masyarakat melalui jalur pendidikan informal. Keduanya merupakan program strategis

	untuk mempertemukan masyarakat dengan berbagai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Solo
	Bidang PAUD PNF Dinas Pendidikan Surakarta, menggelar rapat koordinasi terkait ujian pendidikan kesetaraan dan manajemen ijazah yang dihadiri oleh seluruh elemen terkait pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 pukul 09.30 – 10.45 WIB. Hasil rapat koordinasi ini diharapkan seluruh PKBM dapat melaksanakan ujian pendidikan kesetaraan dan manajemen ijazah dengan lebih baik. Rapat koordinasi ini juga memacu seluruh PKBM di Kota Surakarta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayahnya

5. Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

Pencapaian indikator persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal ditunjang oleh :

Program pengembangan kurikulum muatan lokal

Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- a. Sub kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- b. Sub kegiatan Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar

Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- a. Sub kegiatan Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Namun demikian, belum optimalnya capaian indikator dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman dan kesiapan pendidik, variasi kapasitas satuan pendidikan, serta belum meratanya ketersediaan perangkat ajar muatan lokal.

	Penyelenggaraan mulok bahasa jawa senin 16 Juni 2025 bertempat di Aula Lt 3 Dinas Pendidikan Kota surakarta
	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Muatan Lokal (Mulok) Bahasa Jawa di Surakarta tahun 2025 menjadi agenda penting dalam revitalisasi bahasa dan budaya daerah, dengan Surakarta sebagai pusat kegiatan, terutama melalui Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)

6. Persentase Guru yang Tersediakan Di Satuan Pendidikan

Pencapaian indikator persentase guru yang tersedia di satuan pendidikan ditunjang oleh :

Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Sub kegiatan :

- a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Namun demikian, belum optimalnya capaian indikator dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi guru antar satuan pendidikan, keterbatasan formasi pengangkatan, serta dinamika pensiun dan mutasi yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan guru baru. Selain itu, keterbatasan kewenangan daerah dalam penetapan formasi dan penempatan guru menyebabkan pemenuhan kebutuhan guru di beberapa satuan pendidikan masih belum sesuai standar.

 Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Surakarta	Selasa, 22 Juli 2025, telah dilaksanakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Acara ini dihadiri oleh 44 Kepala Sekolah dari berbagai sekolah dasar negeri di Kota Surakarta
	Monev Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Monev Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penataan, distribusi yang merata, serta validasi data PTK di sekolah

7. Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional

Pencapaian indikator didukung oleh :

Program Pembinaan dan Pengawasan Satuan Pendidikan

Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan

Oleh Masyarakat

Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

- a. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan sub kegiatan :

- a. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- b. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Namun capaian belum optimal akibat kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, kesiapan sarana prasarana yang bervariasi, serta keterbatasan kapasitas pengelola satuan pendidikan dalam memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan.

	Koordinasi Tim survei perizinan/perpanjangan satuan pendidikan 14 april 2025
	Pada tanggal 25 September 2025, kegiatan pemantauan dan pengawasan perizinan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan PNF (Pendidikan Non Formal) dilaksanakan di Ruang Manarul Ilmi. Acara ini dihadiri oleh 135 orang peserta. Kegiatan ini bertujuan utama untuk melakukan update data perizinan satuan pendidikan, sehingga informasi yang dimiliki oleh lembaga terkait dapat akurat dan terkini.

8. Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa/Solo

Pencapaian indikator ini didukung oleh :

Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan

- a. Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota (konservasi, dan revitalisasi bahasa daerah, diseminasi model pembelajaran Bahasa Jawa di SD dan SMP, pembinaan komunitas literasi)
- b. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Festival Tunas Bahasa Ibu) yang mendorong implementasi muatan lokal di satuan pendidikan

Namun capaian belum sepenuhnya optimal karena belum meratanya penerapan di seluruh satuan pendidikan, keterbatasan kompetensi guru muatan lokal, serta perbedaan kesiapan sekolah dalam pengembangan pembelajaran Bahasa dan Sastra Jawa.



Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 resmi digelar di Graha Saba Buana, Surakarta, pada Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan menjadi ajang tahunan yang bertujuan menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa daerah di kalangan generasi muda

	Tuan Rumah, Pemecahan Rekor MURI, dan Juara Umum Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Festival Tunas Bahasa Ibu
---	---

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam program dan kegiatan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Dinas Pendidikan diimplementasikan pada 1 program, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Upaya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Perangda diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan :

- Sub Kegiatan Perlengkapan Peserta Didik dengan aktivitas Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) jenjang SD, anggaran Rp 6.773.150.000
- Sub Kegiatan Perlengkapan Peserta Didik dengan aktivitas Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) jenjang SMP, anggaran Rp 5.000.000.000,00
- Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan aktivitas penyelenggaraan lomba jenjang SD, anggaran Rp 725.640.000,00
- Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan aktivitas penyelenggaraan lomba jenjang SMP, anggaran Rp 909.809.160,00

Gambar 3. 31. Program/Kegiatan Responsif Gender

No	Aktivitas	Output	Output	Satuan	Anggaran Perubahan (Rp)**	Isu Gender			Tujuan aktivitas Responsif Gender
						Data Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung	
1	Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15.700	Paket	6.773.150.000	• APS 7-12 tahun tahun 2023 99,47% • Jumlah siswa Perempuan jenjang SD/MI tahun 2023 sejumlah 29.685 siswa • Jumlah siswa Laki-laki jenjang SD/MI tahun 2023 sejumlah 30.343 siswa • Jumlah Penerima	• Marginalitas Masih terdapat masyarakat miskin dan rentan risiko sosial di Kota Surakarta yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penunjang pembelajaran anak	Penerima BPMKS harus merupakan penduduk miskin dan rentan risiko sosial Kota Surakarta yang dibuktikan dengan SK	Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan personal penunjang pembelajaran siswa (seperti seragam, tas, sepatu,

No	Aktivitas	Output	Output	Satuan	Anggaran Perubahan (Rp)**	Isu Gender			Tujuan aktivitas Responsif Gender
						Data Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung	
						BPMKS jenjang SD tahun 2023 sejumlah 15.617 siswa yang terdiri dari perempuan sejumlah 7.677 siswa laki laki sejumlah 7.940 siswa	mereka • Partisipasi Angka partisipasi jenjang SMP belum mencapai target SPM yakni 100%, adanya gap APS dikarenakan APS Perempuan 13-15 tahun yang belum 100% • Manfaat Belum semua siswa dari keluarga miskin dan rentan risiko sosial menerima bantuan BPMKS	Walikota sehingga perlu pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan risiko sosial untuk memastikan penerima BPMKS tepat sasaran	maupun alat tulis) khususnya siswa dari keluarga miskin dan rentan risiko sosial di Kota Surakarta yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya pada tujuan ke 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Juga penyediaan BOSP bagi operasional sekolah jenjang SD
2	Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) jenjang SMP	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1500	Paket	5.000.000.000,00	• Jumlah sekolah jenjang SMP 77 sekolah terdiri atas 28 negeri dan 44 swasta • Jumlah siswa SMP 30.455 terdiri atas 19254 siswa sekolah negeri dan 11.201 siswa sekolah swasta • Berdasarkan jenis kelamin, jumlah siswa SMP terdiri atas 14.841 perempuan dan 15.614 laki-laki	• Marginalitas Masih terdapat masyarakat miskin dan rentan risiko sosial di Kota Surakarta yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penunjang pembelajaran anak mereka • Partisipasi Angka partisipasi jenjang SMP belum mencapai target SPM yakni 100%, adanya gap APS dikarenakan APS Perempuan 13-15 tahun yang belum 100% • Manfaat Belum semua siswa dari keluarga miskin dan rentan risiko sosial menerima bantuan BPMKS	Penerima BPMKS harus merupakan penduduk miskin dan rentan risiko sosial Kota Surakarta yang dibuktikan dengan SK Walikota sehingga perlu pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan risiko sosial untuk memastikan penerima BPMKS tepat sasaran	Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan personal penunjang pembelajaran siswa (seperti seragam, tas, sepatu, maupun alat tulis) khususnya siswa dari keluarga miskin dan rentan risiko sosial di Kota Surakarta yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya pada tujuan ke 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan

No	Aktivitas	Output	Output	Satuan	Anggaran Perubahan (Rp)**	Isu Gender			Tujuan aktivitas Responsif Gender
						Data Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung	
									kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	147	Siswa	725.640.000,00	- Jumlah siswa Perempuan jenjang SD/MI tahun 2023 sejumlah 28.579 siswa - Jumlah siswa Laki-laki jenjang SD/MI tahun 2023 sejumlah 29.754 siswa - Jumlah Siswa jenjang SD/MI tahun 2023 yang mengikuti kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN), Laki laki : 22 Siswa Perempuan : 28 Siswa - Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Laki laki : 209 Siswa Perempuan : 150 Siswa - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN), Laki laki : 107 Siswa Perempuan : 114 Siswa - Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI), Laki laki : 290 Siswa Perempuan : 250 Siswa - Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen (MAPKRIS), Laki laki : 54 Siswa Perempuan : 66 Siswa - dan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik (MAPKATH), Laki laki : 48 Siswa Perempuan : 57 Siswa	- Akses : Aksesibilitas peserta didik dalam kegiatan minat, bakat, dan kreativitas siswa belum optimal - Kontrol /Kewenangan: Keterbatasan sekolah dalam mengadakan kegiatan pengembangan terkait minat, bakat, dan kreativitas siswa - Partisipasi : Kesenjangan minat, bakat, dan kreativitas siswa laki-laki dan perempuan	Kepedulian akan pentingnya mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik baik akademis maupun non akademis masih minim	Mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa jenjang sekolah dasar baik akademis maupun non akademis melalui kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN), Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI), Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen (MAPKRIS), dan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik (MAPKATH).
4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Target Kinerja:	500	Peserta didik	909.809.160,00	- Jumlah sekolah jenjang SMP 77 sekolah terdiri atas 28 negeri dan 49 swasta - Jumlah siswa SMP 29.877 terdiri atas 18.733 siswa sekolah negeri dan 11.144 siswa sekolah swasta - Berdasarkan jenis kelamin, jumlah siswa SMP terdiri atas 14.552 perempuan dan 15.325 laki-laki - Jumlah Siswa jenjang SMP/MTs tahun 2023 yang mengikuti kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN), Laki laki : 22 Siswa Perempuan : 28 Siswa - Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Laki laki : 208	Akses Aksesibilitas peserta didik dalam kegiatan minat, bakat, dan kreativitas siswa belum optimal Partisipasi Kesenjangan minat, bakat, dan kreativitas siswa laki-laki dan perempuan Kontrol/wewenang Keterbatasan sekolah dalam mengadakan kegiatan pengembangan terkait minat, bakat, dan kreativitas siswa	Kepedulian akan pentingnya mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik baik akademis maupun non akademis masih minim	Mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa jenjang sekolah menengah pertama baik akademis maupun non akademis melalui kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Festival dan

No	Aktivitas	Output	Output	Satuan	Anggaran Perubahan (Rp)**	Isu Gender			Tujuan aktivitas Responsif Gender
						Data Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung	
						Siswa Perempuan : 150 Siswa • Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN), Laki laki : 107 Siswa Perempuan : 114 Siswa • Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI), Laki laki : 337 Siswa Perempuan : 150 Siswa • Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen (MAPKRIS), Laki laki : 26 Siswa Perempuan : 34 Siswa • Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik (MAPKATH), Laki laki : 25 Siswa Perempuan : 20 Siswa • Lomba Gala Siswa Indonesia (GSI) Laki laki : 54 Siswa Perempuan : 0 Siswa			Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN), Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI), Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen (MAPKRIS), dan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik (MAPKATH).

*) Diambil dari Rencana Aksi pada analisis GAP

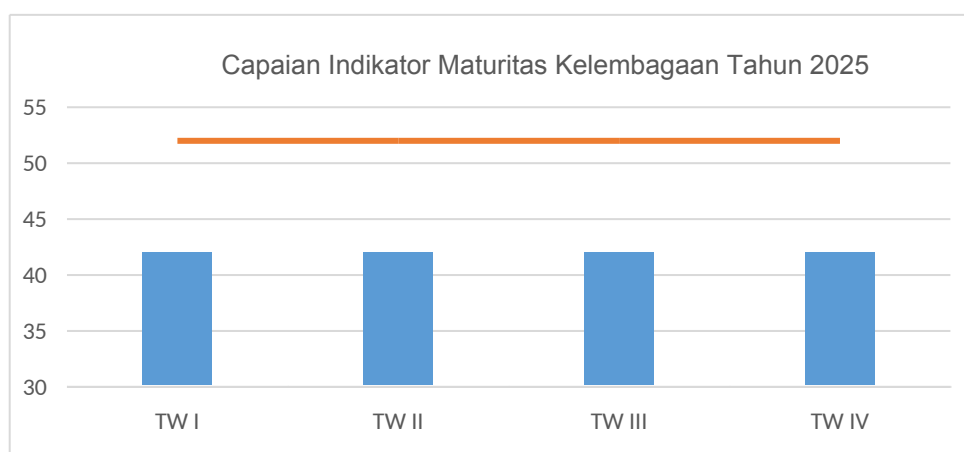
Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien merupakan landasan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan secara terintegrasi, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja dilakukan melalui penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Dengan perencanaan yang tepat sasaran dan pengendalian kinerja yang konsisten, diharapkan capaian kinerja perangkat daerah dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien.

Melalui sasaran ini, perangkat daerah didorong untuk meningkatkan kualitas indikator kinerja, ketepatan penetapan target, serta keandalan data kinerja, sehingga hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan

[illegible]

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada akhir triwulan IV, sasaran strategis Dinas Pendidikan dengan target sebesar 42 pada tahun 2025 terealisasi sebesar 52 sehingga mendapatkan capaian 123,81%, atau berpredikat Sangat Berhasil.



Gambar 3. 32. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Pada Triwulan I – IV berjalan tidak terdapat perubahan terhadap target maupun realisasi kinerja, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kinerja telah disusun secara konsisten dan pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan stabilitas perencanaan serta pengendalian kinerja yang relatif baik.

Tidak adanya perubahan realisasi antar triwulan dikarenakan adanya pengukuran kinerja dilakukan secara periodik sesuai dengan karakteristik indikator yang bersifat tahunan atau berbasis hasil akhir (outcome), sehingga capaian kinerja baru dapat diukur secara utuh pada akhir tahun anggaran. Namun, kedepannya kondisi tersebut akan tetap diimbangi dengan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan agar potensi deviasi kinerja dapat diantisipasi lebih dini.

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 13. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2021 - 2025

No	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Maturitas Kelemba	Angka	38	41	39	49	40	53	41	52	42	52

	gaan											
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

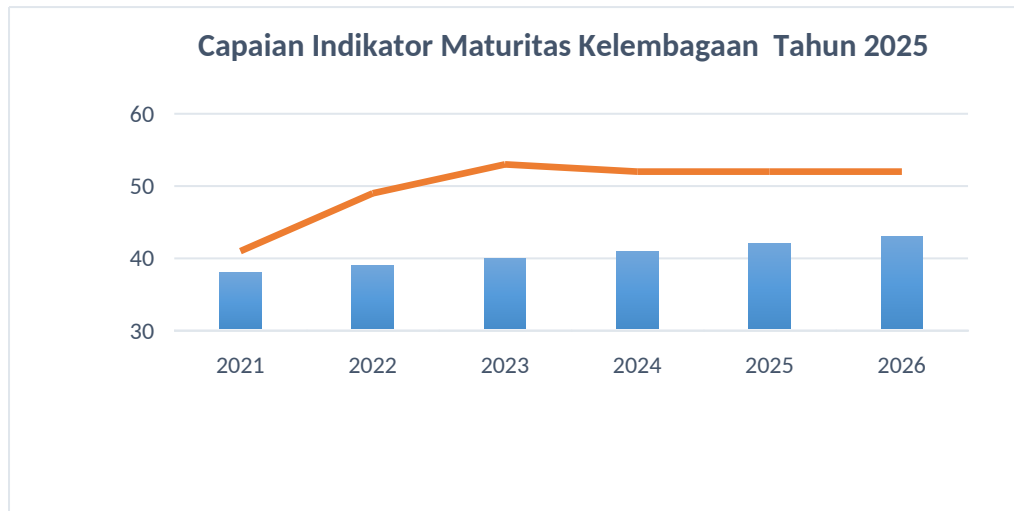
Berdasarkan data capaian Nilai Maturitas Kelembagaan periode Tahun 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan capaian kinerja yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 dan 2022, realisasi nilai maturitas melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan adanya perbaikan tata kelola kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan penguatan organisasi dibandingkan dengan kondisi awal perencanaan.

Pada Tahun 2023 dan 2024, target nilai maturitas ditetapkan secara lebih progresif sejalan dengan peningkatan level kematangan kelembagaan yang diharapkan. Realisasi Tahun 2024 kembali melampaui target, yang mengindikasikan bahwa upaya penguatan kelembagaan telah berjalan efektif dan memberikan hasil yang terukur. Untuk Tahun 2025, target dan realisasi yang kembali tercapai dan melampaui target menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas kelembagaan serta keberlanjutan implementasi perbaikan tata kelola organisasi sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 Dengan Target RPJMD Tahun 2021–2026

Tabel 3. 14. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Capaian (%)
1	Nilai Maturitas Kelembagaan	Angka	38	41	107,89	39	49	125,64	40	53	132,5	41	52	126,83	Sangat Berhasil	42	52	123,81	Sangat Berhasil	43	82,69
	Rata-Rata Capaian				107,89			125,64			132,5			126,83				123,81			82,69



Gambar 3. 33. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

Berdasarkan data capaian Tahun 2021–2025, Nilai Maturitas Kelembagaan menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik dan konsisten, dimana realisasi kinerja setiap tahun selalu melampaui target yang ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja berada di atas 100 persen, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2023 sebesar **132,50%**, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan penguatan tata kelola kelembagaan dan konsistensi implementasi perbaikan sistem kerja organisasi.

Pada Tahun 2024 dan 2025, capaian kinerja memperoleh predikat “Sangat Berhasil”, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan kematangan kelembagaan telah berjalan optimal dan berkelanjutan. Penetapan target yang meningkat secara bertahap setiap tahun juga menggambarkan perencanaan kinerja yang progresif dan berbasis pada hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tidak dibandingkan karena tidak adanya Nilai Maturitas Kelembagaan pada level Provinsi dan Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan data tahun 2021–2025, capaian Nilai Maturitas Kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Surakarta menunjukkan kinerja sangat baik dan konsisten melampaui target setiap tahunnya. Target indikator ditetapkan secara bertahap meningkat, namun realisasi tumbuh lebih cepat dan signifikan, dengan selisih capaian yang cukup tinggi pada setiap periode.

Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola kelembagaan, sistem kerja, serta dukungan manajerial dan regulasi internal telah berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Maturitas Kelembagaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Organisasi Dinas Pendidikan secara konsisten melakukan penataan kelembagaan, penyempurnaan struktur organisasi, serta penegasan tugas dan fungsi (tupoksi) unit kerja, sehingga proses kerja menjadi lebih jelas, efektif, dan terukur.
2. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Penerapan SPIP yang semakin matang mendorong meningkatnya kepatuhan terhadap prosedur, pengelolaan risiko, serta pengendalian kinerja organisasi secara sistematis.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Adanya pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi aparatur, khususnya terkait perencanaan, pelaporan kinerja, dan reformasi birokrasi, berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai maturitas kelembagaan.
4. Komitmen Pimpinan dan Budaya Kinerja
Dukungan pimpinan dalam mendorong budaya kerja berbasis kinerja, inovasi, dan akuntabilitas menjadi faktor kunci yang mempercepat pencapaian target di atas ekspektasi.
5. Sinergi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Keterpaduan antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja), pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala mendukung peningkatan kualitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Analisis ketidaksesuaian target (target relatif rendah). Meskipun indikator selalu tercapai, terdapat kondisi di mana target yang ditetapkan relatif lebih rendah dibandingkan kemampuan aktual organisasi, yang disebabkan oleh:

1. Pendekatan kehati-hatian dalam penetapan target tahunan.
2. Penyesuaian target dengan tahapan RPJMD dan pedoman penilaian nasional.
3. Antisipasi terhadap perubahan regulasi dan kebijakan penilaian maturitas kelembagaan.

Namun kondisi ini tidak mengindikasikan kegagalan, melainkan menunjukkan kapasitas kelembagaan yang berkembang lebih cepat dari perencanaan awal.

Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan capaian Nilai Maturitas Kelembagaan, Dinas Pendidikan Kota Surakarta telah dan terus melakukan langkah-langkah berikut :

1. Penyempurnaan Regulasi dan SOP Internal
2. Melakukan reviu dan pembaruan SOP secara berkala agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan organisasi.
3. Penguatan Manajemen Risiko
4. Mengintegrasikan identifikasi dan mitigasi risiko dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
5. Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi
6. Memperkuat sistem monev kinerja dan kelembagaan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.
7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Mengembangkan sistem informasi pendukung tata kelola dan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*).

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Maturitas Kelembagaan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, administrasi umum perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2025 pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta, diketahui :

- Pagu Anggaran Murni : Rp 363.915.929.463,00
- Pagu Anggaran Perubahan : Rp 368.381.558.593,00
- Selisih : + Rp4.465.629.130,00

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara agregat program mengalami penambahan anggaran sebesar 1,21%, yang terutama dipengaruhi oleh sub kegiatan yang bersifat mandatory dan tidak elastis, khususnya belanja gaji, tunjangan ASN, dan kebutuhan pemeliharaan aset.

Namun demikian, pada level kegiatan dan subkegiatan operasional, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yang signifikan, terutama pada aktivitas penunjang tata kelola, perencanaan, dan administrasi umum.

Selama Tahun 2025, Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1) Efisiensi pada Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Pada kegiatan 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, tercatat:

- Pagu murni : Rp 271.800.000,00
- Pagu perubahan : Rp 233.976.030,00
- Efisiensi : Rp 37.823.970,00 (16,17%)

Efisiensi ini bersumber dari:

- Optimalisasi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan perubahan RKA-SKPD;
- Integrasi kegiatan evaluasi dan pelaporan kinerja;

2) Efisiensi penggunaan sumber daya juga tercermin pada kegiatan 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pagu : Rp 297.617.500,00
- Pagu perubahan : Rp 286.155.540,00
- Efisiensi : Rp 11.461.960,00 (4,01%)

Efisiensi diperoleh melalui:

- Penyesuaian kebutuhan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai;
- Optimalisasi metode pelaksanaan diklat dan evaluasi berbasis internal
- Pemanfaatan SDM internal tanpa mengurangi kualitas output dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja

3) Efisiensi pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pagu : Rp 2.157.766.000,00
- Pagu perubahan : Rp 1.996.553.850,00
- Efisiensi : Rp 161.212.150,00 (8,07%)

Efisiensi dicapai melalui:

- Pengurangan belanja rapat koordinasi dan konsultasi;
- Digitalisasi administrasi dan dukungan SPBE;

- Penyesuaian kebutuhan bahan logistik dan operasional kantor.
- 4) Efisiensi pada kegiatan 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pagu : Rp 407.000.000,00
 - Pagu perubahan : Rp 359.445.610,00
 - Efisiensi : Rp 47.554.390,00 (13,23%)
- Efisiensi ini dihasilkan dari:
- Penyesuaian spesifikasi pengadaan mebel dan peralatan;
 - Optimalisasi pemanfaatan aset yang sudah tersedia.
- 5) Efisiensi pada 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Pagu : Rp 8.762.676.237,00
 - Pagu perubahan : Rp 8.433.436.337,00
 - Efisiensi : Rp 329.239.900,00 (3,90%)
- Efisiensi ini di hasilkan dari
pengendalian biaya utilitas (listrik, air, dan komunikasi) serta penguatan pengawasan pemakaian sarana kantor.

Adapun faktor penyebab peningkatan perubahan anggaran pada beberapa kegiatan, khususnya :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah,
disebabkan oleh:
- Kenaikan belanja gaji dan tunjangan ASN;
- Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- Penyesuaian terhadap kondisi aset dan operasional perangkat daerah.

Secara keseluruhan, meskipun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penambahan pada perubahan anggaran sebesar 1,21%, namun efisiensi penggunaan sumber daya berhasil dicapai pada sebagian kegiatan operasional, khususnya pada aspek perencanaan, administrasi umum, kepegawaian, dan pengadaan barang/jasa.

Efisiensi tersebut dicapai tanpa mengurangi capaian output, serta tetap mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, efektivitas pelayanan internal, dan pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta, sebagaimana teruang dalam table efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3. 15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	OUTPUT	APBD MURNI 2025	APBD PERUBAHAN 2025	Efisiensi (+/-)	Keterkaitan dengan IKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.00.01 Prog Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terbatas (DKT)	Dokumen perencanaan(dokumen)	35.250.600	28.730.600	6.520.000,00	Mendukung aspek perencanaan dan keselarasan tujuan organisasi sebagai komponen penilaian Nilai Maturitas Kelembagaan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan	Dokumen perencanaan Dinas (Renstra, Renja)-Dokumen	120.434.400	120.434.400	0,00	Mendukung aspek perencanaan dan keselarasan tujuan organisasi sebagai komponen penilaian Nilai Maturitas Kelembagaan
					155.685.000,00	149.165.000,00	6.520.000,00	
		1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Dokumen RKA Dinas Pendidikan	37.865.000	37.865.000	0,00	Menjamin keterpaduan Renstra–Renja –RKA sebagai indikator kematangan tata kelola.
					37.865.000,00	37.865.000,00	0,00	
		1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Pendidikan	Dokumen Perubahan RKA Dinas Pendidikan	14.500.000,00	10.040.000,00	4.460.000,00	Menjamin keterpaduan Renstra–Renja –RKA sebagai indikator kematangan tata kelola.
					14.500.000,00	10.040.000,00	4.460.000,00	
		1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan		18.500.000,00	9.735.000	8.765.000,00	Mendukung manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja OPD.
					18.500.000,00	9.735.000,00	8.765.000,00	
		1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan	Dokumen Evaluasi Kinerja (LKPJ, LPPD, LKJIP, SPM, dsb)	45.250.000,00	27171030	18.078.970,00	Mendukung penerapan siklus manajemen kinerja berkelanjutan
				Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP			4.899.584,00	Mendukung penerapan siklus manajemen kinerja berkelanjutan
					45.250.000,00	27.171.030,00	22.978.554,00	
					271.800.000,00	233.976.030,00	42.723.554,00	

Program	KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	OUTPUT	APBD MURNI 2025	APBD PERUBAHAN 2025	Efisiensi (+/-)	Keterkaitan dengan IKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.00.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data Pegawai yang teradministrasi	5.624.600	5.624.600,00	0,00	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian merupakan fondasi pengelolaan SDM aparatur, yang menjadi salah satu dimensi utama penilaian Maturitas Kelembagaan (SDM, tata kelola, dan proses bisnis).
					5.624.600,00	5.624.600,00	-	
		1.01.01.2.05.000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Forum Konsultasi Publik "Pelayanan Publik"	Dokumen Hasil Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik	24.793.200	22.305.800	2.487.400,00	Kegiatan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik menghasilkan Dokumen Hasil Forum Konsultasi Publik, yang digunakan sebagai dasar perbaikan standar pelayanan dan SOP serta mendukung pencapaian Nilai Maturitas Kelembagaan, khususnya pada aspek tata kelola pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.
			Pembangunan Reformasi Birokrasi	dokumen Pembangunan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10.152.800,00	10.918.800,00	-766.000,00	mendukung dalam aspek manajemen kinerja SDM aparatur, yang menjadi komponen kunci penilaian Maturitas Kelembagaan.
			Evaluasi TKPK		15.348.000,00	15.156.000,00		
			Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	71.206.800,00	28.673.500,00	42.533.300,00	mendukung dalam penguatkan kematangan penyelenggaraan pelayanan publik
			Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	23.829.400,00	22.914.400,00	915.000,00	mendukung dalam penguatkan kematangan penyelenggaraan pelayanan publik

Program	KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	OUTPUT	APBD MURNI 2025	APBD PERUBAHAN 2025	Efisiensi (+/-)	Keterkaitan dengan IKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah	Dokumen penilaian Evaluasi kemapangan Perangkat Daerah (dokumen)	19.908.300,00	12.052.900,00	7.855.400,00	mendukung dalam pengukuran dan peningkatan kemapangan tata kelola organisasi, sehingga secara langsung menjadi pendukung utama penilaian Nilai Maturitas Kelembagaan.
			Evaluasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	Dokumen SOP yang telah dievaluasi (dokumen)	56.155.000,00	64.280.500,00	-8.125.500,00	Mendukung Aspek Proses Bisnis dan Tata kelola organinasi yang menjadi komponen penting dalam penilaian Maturitas Kelembagaan.
			Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik		12.052.900,00	50.979.140,00	-38.926.240,00	mendukung dalam aspek manajemen kinerja SDM aparatur, yang menjadi komponen kunci penilaian Maturitas Kelembagaan.
					233.446.400,00	227.281.040,00	-	
		1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sosialisasi Kepegawaian		53.249.900	0		
			Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	0	53.249.900,00	-53.249.900,00	mendukung dalam aspek manajemen kinerja SDM aparatur, yang menjadi komponen kunci penilaian Maturitas Kelembagaan.
			Workshop Peningkatan Kapasitas Pegawai UPTD. PLDPI		14.877.000	14.205.000,00	672.000,00	mendukung dalam aspek manajemen kinerja SDM aparatur, yang menjadi komponen kunci penilaian Maturitas Kelembagaan.
					68.126.900,00	67.454.900,00	15.000.000,00	
					307.197.900,00	300.360.540,00	15.000.000,00	
	0.00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0011Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan		38.400.000	36.672.000	1.728.000,00	Mendukung dari aspek proses bisnis digital dan tata kelola berbasis sistem

Program	KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	OUTPUT	APBD MURNI 2025	APBD PERUBAHAN 2025	Efisiensi (+/-)	Keterkaitan dengan IKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan		23.300.000	2463000	20.837.000,00	Mendukung dari aspek proses bisnis digital dan tata kelola berbasis sistem
			Pembuatan Aplikasi Fileserver Dinas Pendidikan		50.000.000	50.000.000	0,00	Mendukung dari aspek proses bisnis digital dan tata kelola berbasis sistem
			Pembayaran hosting web Dinas Pendidikan dan WA Service Gateway	Pembayaran hosting web Dinas Pendidikan dan WA Service Gateway	15.000.000	15.000.000	0,00	Mendukung dari aspek proses bisnis digital dan tata kelola berbasis sistem
			Pembaharuan dan pemeliharaan aplikasi SIDAYANIK		50.000.000		50.000.000,00	
			pemeliharaan aplikasi SIDAYANIK	Trpeliharanya aplikasi SIDAYANIK (kegiatan)		10.000.000	-10.000.000,00	Mendukung dari aspek proses bisnis digital dan tata kelola berbasis sistem
				Total	176.700.000,00	114.135.000,00	62.565.000,00	
					989.144.300,00	875.752.610,00	120.288.554,00	

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Nilai Maturitas Kelembagaan merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan tingkat kematangan tata kelola organisasi perangkat daerah, meliputi aspek :

- Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- Manajemen kinerja dan akuntabilitas;
- Manajemen SDM aparatur;
- Standar pelayanan dan proses bisnis;
- Dukungan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian indikator ini dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja, pengelolaan kepegawaian, sistem informasi dan penguatan tata kelola internal.

- Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian kinerja
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini menjadi pondasi kelembagaan yang secara langsung mendukung peningkatan nilai maturitas kelembagaan.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.01.01.2.01)

Dukungan sub kegiatan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.01.01.2.05)

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.01.01.2.06)

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

 	Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) pada hari Rabu, 22 Januari 2025 bertempat di Aula Lt 3 Dinas Pendidikan Kota Surakarta Jl.DI Panjaitan No 7 Surakarta Acara ini bertujuan untuk menghimpun usulan-usulan dari perwakilan stakeholder terkait Dinas Pendidikan di Kota Surakarta yang selanjutnya akan diakomodir sebagai Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2026.
	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3. 16. Realisasi anggaran Dinas Pendidikan tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	363.915.929.463,00	368.381.558.593,00	355.519.184.878,00
	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.800.000,00	233.976.030,00	176.773.950,00
1	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.685.000,00	149.165.000,00	124.782.950,00

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
2	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.865.000,00	37.865.000,00	27.521.850,00
3	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.500.000,00	10.040.000,00	4.018.950,00
4	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.500.000,00	9.735.000,00	6.715.200,00
5	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.250.000,00	27.171.030,00	13.735.000,00
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	348.933.437.446,00	353.597.964.946,00	344.931.301.921,00
6	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	348.684.727.446,00	353.349.254.946,00	344.799.486.421,00
7	1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.810.000,00	136.810.000,00	76.209.800,00
8	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58.900.000,00	58.900.000,00	25.126.650,00
9	1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53.000.000,00	53.000.000,00	30.479.050,00
	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	878.632.280,00	901.352.280,00	797.597.312,00
10	1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	778.632.280,00	778.632.280,00	686.854.262,00
11	1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	75.000.000,00	97.720.000,00	89.991.900,00
12	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	20.751.150,00
	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	297.617.500,00	286.155.540,00	265.405.300,00
13	1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.624.600,00	5.624.600,00	5.403.600,00
14	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	238.743.000,00	227.281.040,00	211.229.750,00
15	1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.249.900,00	53.249.900,00	48.771.950,00
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.157.766.000,00	1.996.553.850,00	1.627.211.964,00
16	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	253.000.000,00	232.600.000,00	226.082.000,00
17	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	649.376.000,00	691.168.012,00	635.340.550,00
18	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	396.690.000,00	396.690.000,00	318.426.200,00
19	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.000.000,00	-	0,00

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
20	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.000.000,00	93.894.400,00	55.086.150,00
21	1.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	60.000.000,00	60.000.000,00	5.825.000,00
22	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.000.000,00	408.065.950,00	297.388.314,00
23	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	176.700.000,00	114.135.488,00	89.063.750,00
	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.000.000,00	359.445.610,00	330.447.000,00
24	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	201.000.000,00	169.479.610,00	146.242.500,00
25	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.000.000,00	189.966.000,00	184.204.500,00
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.762.676.237,00	8.433.436.337,00	5.378.484.369,00
26	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.100,00	2.500.000,00
27	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.115.727.222,00	4.786.487.222,00	3.334.561.069,00
28	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.000.000,00	254.000.000,00	187.936.000,00
29	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.380.949.015,00	3.380.949.015,00	1.853.487.300,00
	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.207.000.000,00	2.572.674.000,00	2.011.963.062,00
30	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.384.000.000,00	1.458.633.000,00	1.092.399.508,00
31	1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
32	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.000.000,00	18.554.000,00	15.000.000,00
33	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	549.000.000,00	619.400.000,00	458.640.310,00
34	1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	163.000.000,00	470.087.000,00	439.923.244,00
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	149.601.404.580,00	152.567.355.285,00	136.708.906.605,00
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	81.738.663.180,00	82.044.882.758,00	74.999.586.705,00
35	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	11.756.006.000,00	11.856.006.000,00	9.128.433.487,00
36	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	207.000.000,00	204.226.805,00
37	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	600.000.000,00	600.000.000,00	535.199.434,00

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
38	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	350.000.000,00	648.760.000,00	627.406.748,00
39	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.724.447.000,00	3.724.447.000,00	2.942.056.630,00
40	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	666.000.000,00	725.640.000,00	668.318.750,00
41	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.000.000,00	20.000.000,00	19.350.000,00
42	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.336.952.000,00	135.600.000,00	98.447.500,00
43	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	655.025.000,00	505.492.260,00	389.286.600,00
44	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49.918.100.000,00	49.959.122.318,00	49.062.170.935,00
45	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28.800.000,00	28.800.000,00	24.910.000,00
46	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20.961.700,00	20.961.700,00	12.238.000,00
47	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20.854.700,00	20.854.700,00	15.775.000,00
48	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.060.000,00	25.060.000,00	2.682.500,00
49	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	55.000.000,00	55.000.000,00	44.629.000,00
50	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.939.700,00	24.939.700,00	23.700.000,00
51	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	74.261.000,00	74.261.000,00	42.490.000,00
52	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.878.705.080,00	6.878.705.080,00	5.643.122.600,00
53	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	930.687.042,00
54	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	27.466.000,00	27.466.000,00	7.950.000,00
55	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	175.690.000,00	255.050.000,00	107.514.500,00
56	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.150.000.000,00	4.271.300.000,00	3.600.052.507,00
57	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.230.395.000,00	980.417.000,00	868.938.667,00

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	48.844.348.400,00	50.310.066.697,00	43.054.928.527,00
58	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	240.000.000,00	240.000.000,00	227.693.730,00
59	1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir	478.080.000,00	-	
60	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.368.080.000,00	3.742.665.000,00	2.323.111.790,00
61	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.776.580.000,00	4.141.580.000,00	3.036.119.557,00
62	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	-	200.000.000,00	195.841.271,00
63	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.000.000.000,00	5.950.000.000,00	5.096.801.278,00
64	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	450.000.000,00	747.536.037,00	701.048.250,00
65	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.636.059.000,00	1.826.162.000,00	1.650.556.000,00
66	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.179.697.300,00	909.809.160,00	849.035.650,00
67	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.888.500,00	30.888.500,00	28.295.100,00
68	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.382.923.200,00	142.949.600,00	116.972.800,00
69	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	804.368.000,00	1.104.630.400,00	1.031.141.500,00
70	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.207.850.000,00	12.876.150.000,00	12.837.128.126,00
71	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.000.000,00	15.000.000,00	14.401.400,00
72	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	2.135.000,00	71.885.400,00	61.150.000,00
73	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	2.880.000,00	900.000,00	900.000,00
74	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9.784.000,00	900.000,00	450.000,00
75	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	900.000,00	900.000,00
76	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.863.000,00	-	
77	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	-	900.000,00	900.000,00

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
	intoleransi			
78	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3.279.400.400,00	2.995.200.000,00	1.932.198.400,00
79	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.709.160.000,00	8.709.160.000,00	7.507.112.277,00
80	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	4.190.608.000,00
81	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	216.600.000,00	1.552.850.600,00	1.252.563.398,00
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.381.484.300,00	13.222.980.200,00	12.504.239.791,00
82	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000,00	185.000.000,00	179.353.700,00
83	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	150.445.000,00	150.445.000,00	119.825.600,00
84	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	86.400.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00
85	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.121.064.800,00	802.633.600,00	534.275.800,00
86	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	250.674.500,00	595.674.500,00	557.712.300,00
87	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.223.200.000,00	9.223.200.000,00	9.200.100.000,00
88	1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	22.789.500,00
89	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	74.700.000,00	74.700.000,00	66.821.300,00
90	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	125.000.000,00	125.000.000,00	120.323.800,00
91	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	350.000.000,00	350.000.000,00	314.199.400,00
92	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	-	829.927.100,00	633.499.149,00
93	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750.000.000,00	750.000.000,00	668.939.242,00
	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.636.908.700,00	6.989.425.630,00	6.150.151.582,00
94	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	166.500.000,00	166.500.000,00	101.800.000,00
95	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	620.899.300,00	673.381.130,00	660.035.150,00
96	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.699.700.000,00	3.699.700.000,00	3.528.178.682,00

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
97	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.031.700,00	49.000.300,00	44.935.500,00
98	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	40.850.000,00	40.850.000,00	39.712.500,00
99	1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10.331.200,00	9.311.200,00	9.245.000,00
100	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	200.000.000,00	-	
101	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	273.596.500,00	272.603.000,00	192.130.900,00
102	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.600.000.000,00	2.078.080.000,00	1.574.113.850,00
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	200.000.000,00	206.823.500,00	131.592.900,00
	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	155.000.000,00	164.663.500,00	109.680.200,00
103	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	45.000.000,00	72.813.500,00	67.061.200,00
104	1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	110.000.000,00	91.850.000,00	42.619.000,00
	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	45.000.000,00	42.160.000,00	21.912.700,00
105	1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	45.000.000,00	42.160.000,00	21.912.700,00
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28.669.890.080,00	28.497.815.800,00	23.719.924.500,00
	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.669.890.080,00	28.497.815.800,00	23.719.924.500,00
106	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	375.000.000,00	301.969.200,00	160.634.300,00
107	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.294.890.080,00	28.195.846.600,00	23.559.290.200,00
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	195.000.000,00	193.070.000,00	155.494.400,00

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	105.000.000,00	130.060.000,00	97.073.500,00
108	1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	75.000.000,00	102.060.000,00	81.471.400,00
109	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30.000.000,00	28.000.000,00	15.602.100,00
	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	90.000.000,00	63.010.000,00	58.420.900,00
110	1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	25.000.000,00	23.920.500,00
111	1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40.000.000,00	38.010.000,00	34.500.400,00
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	963.000.000,00	921.949.000,00	809.704.600,00
	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	963.000.000,00	921.949.000,00	809.704.600,00
112	1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000,00	188.949.000,00	128.515.300,00
113	1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	633.000.000,00	733.000.000,00	681.189.300,00
Total		543.545.224.123,00	550.768.572.178,00	517.044.807.883,00

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran berjalan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Dari total anggaran setelah perubahan sebesar Rp 550.768.572.178,00, telah terealisasi sebesar Rp 517.044.807.883,00 atau sekitar 93,88%. Tingkat serapan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama bidang pendidikan.

Belanja terbesar dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp 355.519.184.878,00, yang didominasi oleh pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan administratif dan operasional organisasi telah terpenuhi secara optimal untuk menjaga stabilitas layanan pendidikan.

Pada Program Pengelolaan Pendidikan, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp152.567.355.285,00 terealisasi Rp136.708.906.605,00 (sekitar 89,61%). Realisasi ini digunakan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah, pengelolaan dana BOS SD dan SMP, BOP PAUD dan PNF, pengadaan perlengkapan peserta didik, peningkatan kapasitas pendidik, serta pembinaan manajemen sekolah. Capaian ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan dasar dan PAUD.

Pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terealisasi sebesar Rp23.719.924.500,00 dari Rp28.497.815.800,00 (sekitar 83,23%), yang diarahkan pada penataan distribusi dan pemetaan kebutuhan pendidik serta tenaga kependidikan guna mendukung pemerataan kualitas layanan pendidikan.

Sementara itu, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra juga menunjukkan tingkat realisasi yang baik, dengan capaian rata-rata di atas 75%. Anggaran pada program-program ini dimanfaatkan untuk penguatan kurikulum muatan lokal, peningkatan mutu pembelajaran inovatif, pengawasan perizinan satuan pendidikan, serta pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran telah difokuskan pada belanja yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan, pemenuhan standar sarana dan prasarana, penguatan tata kelola, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Sisa anggaran yang belum terealisasi umumnya disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta optimalisasi harga melalui proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan terarah pada prioritas strategis, penggunaan anggaran telah mendukung terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan akses serta mutu pendidikan di Kota Surakarta.

C. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Analisis Efisiensi Kinerja adalah analisis yang membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah pendukung. Untuk

mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan, dapat diketahui dari capaian tujuan dan sasaran strategis dengan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 17. Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Belanja			
				Target	Realisasi	%	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan]	Realisasi	%
1	Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif		RLS (Rata rata Lama Sekolah)	11,26	11,26	100	543.545.224.123	550.768.572.178	517.044.807.883	93,88
			HLS (Harapan Lama Sekolah)	15,38	15,08	98,05	543.545.224.123	550.768.572.178	517.044.807.883	93,88
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang disediakan untuk Masyarakat Surakarta		APK 3-6 Tahun	65,9	58,76	89,17	12.381.484.300	13.222.980.200	12.504.239.791	94,56
			APS 13-15 Tahun	99,61	95,5	95,87	48.844.348.400	50.310.066.697	43.054.928.527	85,58
			APS 7-12 Tahun	99,98	99,52	99,54	81.738.663.180	82.044.882.758	74.999.586.705	91,41
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	94,8	94,17	99,34	6.636.908.700	6.989.425.630	6.150.151.582	87,99

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Belanja			
				Target	Realisasi	%	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan]	Realisasi	%
			Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	100	100	200.000.000	206.823.500	131.592.900	63,63
			Persentase guru yang tersediaan di satuan pendidikan	89,37	95,15	106,47	28.669.890.080	28.497.815.800	23.719.924.500	83,23
			Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	100	100	100	195.000.000	193.070.000	155.494.400	80,54
			Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra jawa/solo	100	100	100	963.000.000	921.949.000	809.704.600	87,83
3	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien		Nilai Maturitas Kelembagaan	42	52	123,81	363.915.929.463	368.381.558.593	355.519.184.878	96,51

Berdasarkan tabel di atas, dari 11 indikator, 5 indikator tercapai tidak maksimal, 4 indikator tercapai sesuai target, dan 2 indikator tercapai melebihi target. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran Tahun 2025 dapat dinilai efektif dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas, meskipun dengan ruang perbaikan pada peningkatan akses dan partisipasi jenjang PAUD dan SMP berikut penjelasannya:

- 1) Pada tujuan Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif,

- Capaian RLS yang tepat pada target menunjukkan bahwa intervensi utama pada program pendidikan dasar, kesetaraan, dan pengendalian putus sekolah berjalan efektif. Dengan tingkat serapan anggaran 93,88%, kinerja RLS tetap tercapai optimal, sehingga efisiensi belanja tidak menurunkan outcome. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah proporsional terhadap kebutuhan peningkatan rata-rata lama sekolah
 - Capaian HLS yang melampaui target menunjukkan bahwa kebijakan perluasan akses dan keberlanjutan pendidikan berjalan sangat baik. Meskipun serapan anggaran tidak maksimal 100%, hasil kinerja melebihi target, sehingga terdapat indikasi efisiensi anggaran yang menghasilkan output dan outcome lebih tinggi dari yang direncanakan
- 2) Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025 sebesar **93,88%** dari pagu perubahan menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif dan terkendali. Tingkat serapan tersebut mampu mendukung pencapaian mayoritas indikator kinerja strategis, dimana sebagian besar indikator mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan.
- 3) Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, nilai Maturitas Kelembagaan mencapai **123,81%** dari target, didukung serapan Program Penunjang sebesar 96,51%, menunjukkan efektivitas belanja dalam memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas kinerja.
- 4) Pada Sasaran Pengelolaan Pendidikan, indikator seperti APS 7–12 tahun (99,54%), partisipasi pendidikan kesetaraan (99,34%), persentase satuan pendidikan berizin operasional (100%), penerapan kurikulum muatan lokal (100%), serta pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa (100%) menunjukkan keterkaitan positif antara alokasi anggaran dan hasil kinerja.
- Beberapa indikator partisipasi seperti APK PAUD 3–6 tahun (89,17%) dan APS 13–15 tahun (95,87%) belum sepenuhnya mencapai target, meskipun dukungan anggaran relatif optimal. Hal ini mengindikasikan adanya faktor eksternal non-anggaran yang turut mempengaruhi capaian.

Berikut ini disajikan data terkait dengan efisiensi anggaran untuk pencapaian tujuan/indikator kinerja utama dan sasaran strategis / Indikator sasaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Tabel 3. 18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian (1)	Persentase Rata-rata Realisasi Anggaran (2)	Tingkat Efisiensi (3=1-2)
1	Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif	2	99,02	93,88	5,14
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang disediakan untuk Masyarakat Surakarta	8	99,19	88,56	10,63
3	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	1	123,81	96,51	27,30

**: efisiensi anggaran terjadi apabila kinerja tercapai atau melebihi target

Berdasarkan tabel diatas dari 1 tujuan dengan 2 indikator, dengan rata-rata capaian kinerja melebihi realisasi anggaran, dan 2 sasaran strategis dengan 9 indikator yang rata rata capaian kinerja melebihi realisasi anggaran.

1. Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif
Rata-rata capaian kinerja sebesar 99,02% dengan realisasi anggaran 93,88%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi 5,14. Nilai efisiensi positif menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Hal ini mengindikasikan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan terkendali dalam mendukung peningkatan kualitas masyarakat melalui sektor pendidikan berjalan efektif.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF
Rata-rata capaian kinerja sebesar 99,19% dengan realisasi anggaran 88,56%, menghasilkan tingkat efisiensi 10,63. Meskipun capaian sedikit di bawah 100%, tingkat efisiensi relatif tinggi karena realisasi anggaran lebih rendah dibanding capaian kinerja. Hal ini menunjukkan pengelolaan program berjalan efektif dan efisien dengan pemanfaatan anggaran yang hemat

3. Meningkatnya kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah

Rata-rata capaian kinerja sebesar 123,81% dengan realisasi anggaran 96,51%, menghasilkan tingkat efisiensi 27,30. Nilai efisiensi yang sangat tinggi menunjukkan capaian kinerja jauh melampaui target dengan dukungan anggaran yang proporsional. Kondisi ini mengindikasikan perencanaan dan tata kelola kinerja perangkat daerah berjalan sangat efektif

D. Capaian Kinerja Regulasi

Tabel 3. 19. Rekapitulasi Regulasi yang ditetapkan di Tahun 2025

N o	Perda/ Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Keterkaitan dengan Program
1	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendidikan Anak Usia Dini	05 Agustus 2025	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendidikan Anak Usia Dini mengatur penyelenggaraan PAUD secara holistik-integratif, meliputi pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan yang bermutu, pemerataan akses dan peningkatan kualitas satuan PAUD, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga	Sebagai landasan hukum dan arah kebijakan dalam pelaksanaan: 1. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) → mendukung rencana aksi daerah PAUD, penguatan kurikulum, pengawasan pembelajaran, peningkatan kualifikasi pendidik, serta pemerataan akses layanan PAUD. → mendukung pemenuhan standar layanan dan persyaratan pendirian

N o	Perda/ Perwali	Waktu Penetapan	Substansi Pengaturan	Keterkaitan dengan Program
			kependidikan, pemenuhan standar sarana prasarana, dukungan pendanaan, peran serta masyarakat, serta mekanisme pembinaan, pengawasan, dan evaluasi guna menjamin mutu layanan PAUD di Kota Surakarta	satuan PAUD 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan → terkait pengaturan kualifikasi, penghargaan, dan bantuan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. 3. Program pengendalian perizinan pendidikan → mendukung pemenuhan standar layanan dan persyaratan pendirian satuan PAUD

E. Pencapaian Lainnya

Dinas Pendidikan Kota Surakarta menerima beberapa capaian penghargaan antara lain :

	Penghargaan dari Kemendikdasmen sebagai Pemerintah Daerah yang Mendukung dan Berkomitmen dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
	Penghargaan dari Kemendikdasmen sebagai Pemerintah Daerah yang

	Mendukung dan Berkomitmen dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
	Dinas Pendidikan Juara 1 Nasional Pengelola Sekolah Siaga Kependudukan dan SDN Kemasan 1 Juara 1 Nasional SSK Paripurna Terbaik
	UPTD. PLDPI terpilih mewakili Indonesia dalam <i>United Nation Public Service Awards (UNPSA) 2026</i> yang diselenggarakan United Nation katagori <i>Delivering Inclusive and Equitable Services to Leave No One Behind</i>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian tahun 2025

a. Capaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan diukur dengan 2 indikator yaitu :

- 1) Rata Rata Lama Sekolah (RLS) dari target yang telah ditetapkan yaitu 11,26 Tahun tercapai 11,26 tahun dengan persentase capaian kinerja 100% dengan peringkat **Sangat Berhasil**
- 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) target yang telah ditetapkan yaitu 15,38 Tahun tercapai 15,08 tahun dengan persentase capaian kinerja 101,99% dengan peringkat **Sangat Berhasil**

b. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Kota Surakarta diukur dari 8 Indikator, yaitu :

- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 65,90%% tercapai 58,76% dengan persentase capaian kinerja 89,17%. dengan peringkat **Berhasil**
- 2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 99,98% tercapai 99,52% dengan persentase capaian kinerja 99,54% dengan peringkat Sangat Berhasil
- 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun dari target yang telah ditetapkan yaitu 99.61% tercapai 95,50% dengan persentase capaian kinerja 95,87%. dengan peringkat **Sangat Berhasil**
- 4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dari target yang telah ditetapkan yaitu 94,80% tercapai 94,17% dengan persentase capaian kinerja 99,34% dengan peringkat **Sangat Berhasil**
- 5) Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan local dari target 100 % terelasisai 100 % dengan predikat **Sangat Berhasil**
- 6) Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan dari target

yang telah ditetapkan yaitu 89,37% tercapai 97,99% dengan persentase capaian kinerja 109,65% dengan peringkat **Sangat Berhasil**

7) Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional dari target 100% terelaisai 100% dengan presentase capaian 95% dengan predikat **Sangat Berhasil**

8) Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo dari target yang telah ditetapkan yaitu 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100% dengan peringkat **Sangat Berhasil**

c. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien dengan indikator :

1) Nilai Maturitas Kelembagaan dari target yang telah ditetapkan yaitu 42 tercapai 52 dengan persentase capaian kinerja 123,81% dengan peringkat **Sangat Berhasil**

2. Faktor pendorong dan penghambat

F. Faktor pendorong

1) Komitmen Kepala Daerah dan Dukungan Regulasi

Adanya Perda/Perwali yang memperkuat tata kelola pendidikan (PAUD, mutu pembelajaran, perencanaan kinerja) menjadi landasan pelaksanaan program yang lebih terarah.

2) Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (SIPD)

Sinkronisasi antara RKT, Renja, dan penganggaran mendukung keterkaitan program dengan IKU sehingga capaian relatif optimal.

3) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai

Dukungan DAK, DAU dan APBD dalam peningkatan sarpras membantu menjaga mutu layanan pendidikan dasar dan PAUD.

4) Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Pelatihan, penguatan komunitas belajar, serta dukungan kesejahteraan meningkatkan kualitas layanan pembelajaran.

5) Kolaborasi dengan Stakeholder

Sinergi dengan satuan pendidikan, komite sekolah, dunia usaha, serta masyarakat mendukung peningkatan APK/APS dan mutu layanan pendidikan.

6) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi capaian indikator secara berkala mendorong pengendalian kinerja dan efisiensi anggaran.

G. Faktor penghambat

- 1) Keterbatasan dan Ketimpangan Distribusi Guru
Masih terdapat ketidakseimbangan rasio guru–peserta didik di beberapa satuan pendidikan.
- 2) Belum Optimalnya Pemerataan Akses Pendidikan
Faktor ekonomi dan sosial tertentu masih memengaruhi partisipasi sekolah (APS/APK).
- 3) Keterbatasan Anggaran pada Subkegiatan Tertentu
Penyesuaian anggaran dan refocusing berdampak pada optimalisasi beberapa program prioritas.
- 4) Belum Meratanya Kualitas Satuan Pendidikan
Perbedaan kapasitas manajerial dan mutu layanan antar satuan pendidikan masih terjadi.
- 5) Proses Administratif dan Perizinan yang Memerlukan Penyesuaian Regulasi Baru
Implementasi regulasi terbaru memerlukan waktu adaptasi di tingkat satuan pendidikan.
- 6) Perubahan Kebijakan Nasional
Dinamika kebijakan pusat terkait kurikulum dan tata kelola pendidikan memerlukan penyesuaian cepat di daerah

3. Total efisiensi anggaran tahun 2025

B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan

1. Strategi dalam perencanaan berikutnya untuk mendukung pencapaian kinerja berdasarkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029
 - a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja
 - Menyelaraskan Renstra, Renja, RKT, dan SIPD secara konsisten berbasis outcome (IKU/IKK).
 - Meningkatkan kualitas analisis program high impact terhadap APK, APS, RLS, HLS.
 - b. Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan
 - Optimalisasi program peningkatan APK PAUD dan APS 7–15 tahun melalui intervensi wilayah kantong rendah partisipasi.

- Penguatan pendidikan kesetaraan untuk warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar/menengah.
 - Pendekatan kolaboratif dengan kelurahan, PKK, dan komunitas masyarakat.
- c. Penguatan Mutu Pembelajaran dan Satuan Pendidikan
- Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan komunitas belajar.
 - Monitoring implementasi kurikulum (termasuk muatan lokal dan pengembangan Bahasa Jawa).
 - Pendampingan satuan pendidikan dalam peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan.
- d. Penataan dan Pemerataan Guru
- Analisis kebutuhan dan redistribusi guru secara proporsional.
 - Penguatan database GTK berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan.
 - Advokasi pemenuhan formasi ASN/PPPK sesuai kebutuhan daerah.
- e. Penguatan Tata Kelola dan Maturitas Kelembagaan
- Peningkatan nilai maturitas SPIP dan SAKIP melalui penguatan manajemen risiko.
 - Digitalisasi layanan dan administrasi pendidikan.
 - Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja berbasis data.
- f. Optimalisasi Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- Prioritisasi program high impact.
 - Rasionalisasi belanja non-prioritas.
 - Penguatan pengendalian internal dan evaluasi triwulanan.
- g. Penguatan Regulasi dan Implementasi Kebijakan
- Optimalisasi implementasi Perda/Perwali bidang pendidikan (termasuk PAUD).
 - Penyederhanaan proses perizinan satuan pendidikan.
 - Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah secara adaptif.

2. Program/kegiatan/subkegiatan dan aktivitas prioritas tahun 2027

Tabel 4. 1. Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Aktivitas Prioritas Tahun 2027

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
1	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terbatas (DKT)	40.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan	25.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen RKA	35.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Pendidikan	15.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan	15.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan	30.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pendidikan, SMPN, SKB, dan PLDPI serta Tamsil dan Kekurangannya	354.806.410.246,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Evaluasi/Verifikasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan	136.810.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	58.900.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran	60.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran Belanja Tenaga Keamanan-Alih Daya	785.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Rekonsiliasi Laporan BMD	35.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sosialisasi Kepegawaian	6.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	10.025.800,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah	7.176.500,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	27.746.900,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	64.554.500,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Forum Konsultasi Publik "Pelayanan Publik"	14.537.800,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Reformasi Birokrasi	5.092.500,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	75.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimtek Pelayanan Prima	55.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Lainnya	105.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemeliharaan Jaringan Listrik Dinas Pendidikan Serta Pembelian peralatan dan komponen instalasi listrik (kabel, lampu, stecker, stop kontak, saklar, fitting listrik, dll)	150.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsolidasi kertas A4	31.850.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	konsolidasi Kertas F4	113.100.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	557.747.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	382.290.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sewa Tanaman Kantor	14.400.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan Material	550.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan dan minum fasilitas kunjungan tamu	65.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Rutin, Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan	190.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	274.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	120.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Penyediaan Mebel Kantor Dinas Pendidikan	210.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	250.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Belanja Materai dan Perangko	12.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pendidikan, UPTD, Sekolah	5.092.613.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.387.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.670.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Elektronik Lainnya (Telepone, TV, Kulkas, Dispenser, dll)	3.150.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang Genset	59.240.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang Komputer dan Laptop	47.450.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sound System dan kelengkapannya (Amplifier, Mixer, Speaker, Mic, dll)	10.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Pemeliharaan Pompa Air Beserta Penampung dan Instalasinya	14.472.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC	56.278.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Printer	37.740.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Servis CCTV	25.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pawai Pembangunan HUT RI	30.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor Upah PPPK Paruh Waktu Dinas Pendidikan dan Upah ke 13	2.701.898.030,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing)	749.050.985,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.485.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	6.120.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	560.000.000,00
	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00
2	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Sekolah Baru SDN Mojosongo 3	17.000.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Sekolah Baru SDN Mangkuyudan	10.000.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpus SDN Beton	500.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehab UKS SDN Sanggrahan	200.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehab Perpus SDN Tunggul Sari 1 dan SDN Sanggrahan	400.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rehab Rumah Penjaga Sekolah	1.500.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel	400.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	BOSP Daerah SD Negeri (APBD)	10.000.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Hibah BOSP Daerah SD Swasta	450.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Operasional BOSP Daerah	100.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Penyelenggaraan lomba-lomba OSN,O2SN, FLS3N, MAPKRIS,MAPKAT,MAPSI,PR AMUKA, PRAMUKA SIAGA	210.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Hadiah lomba-lomba OSN,O2SN, FLS3N, MAPKRIS,MAPKAT,MAPSI,PR AMUKA, PRAMUKA SIAGA	563.088.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Layanan Kepegawaian	25.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan	250.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Monitoring dan Evaluasi PTK	17.500.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Evaluasi Kinerja Aparatur	40.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyelenggaraan HARDIKNAS	100.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah	250.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyelenggaran Pendidikan Inklusi	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Hibah Lembaga	300.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Assesmen kondisi sarana dan prasarana setiap satuan pendidikan	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOSP Pusat Reguler SD Negeri	23.258.506.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOSP Pusat Kinerja SD Negeri	1.627.500.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOSP Pusat Hibah Reguler SD Swasta	24.262.200.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOSP Pusat Hibah Kinerja SD Swasta	261.322.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Operasional Penunjang Pengelolaan Dana BOSP Pusat SD	100.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sosialisasi Juknis, Permen, Evaluasi BOS	30.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pemanfaatan Platfrom Pendidikan	21.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Digitalisasi Bahan Ajar Inklusif dan Ramah Anak	20.500.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelatihan Aplikasi Manajemen Pembelajaran (LMS)	21.500.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Supervisi Akademik dan Manajerial Satuan Pendidikan	26.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Kebijakan Pendidikan	40.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Monitoring dan Evaluasi TPPK Pada Satuan Pendidikan	22.500.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendampingan Pencegahan Kekerasan Fisik, Psikis, dan Seksual	22.500.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Penyediaan Buku Nonteks Pendukung Pembela	500.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) jenjang SD	6.773.150.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendampingan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehab Pagar, Toilet	1.000.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Pengelolaan e-ljazah	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Assesmen Nasional	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Tes Kemampuan Akademik	75.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Ujian Sekolah, TKA, Assesmen Nasional	125.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Ruang Kelas	3.000.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Peralatan TIK	400.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Gedung SMP N 24 dan SMP N 25	60.000.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Masjid SMP N 22	800.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Lapangan SMP N 14	1.400.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Lapangan SMP N 7	1.400.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel SMP N 24 dan SMP N 25	1.500.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel SMP N 8	500.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel SMP N 15	500.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	HIBAH BOSP	700.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Penyelenggaraan KREASSO	500.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pengembangan Talenta Siswa Jenjang SMP	600.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pelatihan Kelas persiapan beasiswa dalam dan luar negeri	100.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Penyediaan Transport dan Akomodasi Kontingen dan Pendamping	250.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	61.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru	60.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Komunitas Belajar	124.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan	27.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	35.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Monitoring dan evaluasi Penyaluran Tunjangan	26.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendampingan Pengawas Sekolah ke Satuan Pendidikan	22.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendampingan Verval PTK	25.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendampingan Penilaian Kinerja	42.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Mendalam (PM) / Koding dan Kecerdasan Artifisial	60.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)	400.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pendampingan Penyelenggaraan ANBK	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA)	400.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pendampingan dan Validasi Manajemen Ijazah	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Hibah BMPS	30.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Hibah IPPK	35.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Hibah BOS Reguler SMP Swasta	13.000.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Hibah BOS Kinerja SMP Swasta	1.000.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pendampingan Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan BOS Jenjang SMP	100.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Bimtek Konten Digital untuk Pembelajaran	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan	35.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Penguatan Kompetensi TPPK	35.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pengimbasan Pembelajaran Mendalam (PM), Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)	100.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 22	1.400.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 23	2.300.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Jenjang SMP	5.000.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendampingan Proses Penyaluran BPMKS	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan toilet TK PAUD Negeri Pembina Jebres	200.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Aula TK PAUD Negeri Anak Indonesia	900.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel PAUD Negeri	350.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pembayaran Honorarium Guru PAUD (SKB)	129.600.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pembayaran Honorarium Guru PAUD (SKB)	129.600.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan Insentif Pendidik PAUD	1.781.330.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan Kompetensi PTK PAUD	103.735.100,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	11.316.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Penyelenggaraan Kegiatan Monev Sertifikasi, Non Sertifikasi dan Insentif PAUD	12.002.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Komunitas Belajar	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pelaksanaan sosialisasi transisi PAUD ke SD	150.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pelaksanaan sosialisasi wajib belajar 13 tahun	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pelaksanaan Gebyar PAUD	200.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pelaksanaan Lomba Stratifikasi PAUD Sehat	75.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pelaksanaan Pentas Seni Anak PAUD Kota Surakarta	250.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pemberian Hibah pokja bunda paud	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pemberian Hibah Himpaudi	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pemberian Hibah IGTKI	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Penyaluran dana BOP PAUD Kinerja	225.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Penyaluran dana BOP PAUD Negeri Reguler	496.980.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Penyaluran dana Hibah BOP Reguler Swasta	9.547.560.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Pemeliharaan Mebel PAUD Negeri	70.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelaksanaan Bimtek Dapodik	75.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelaksanaan Bimtek Aplikasi dari Kemdikdasmen	75.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pendampingan BOP PAUD	85.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pelaksanaan validasi data pendidikan	75.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Suku Cadang Komputer, Laptop, Printer PAUD Negeri	21.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan PAUD Negeri	140.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi Sarana dan prasarana PAUD Negeri	200.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Negeri	140.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pelaksanaan Rehabilitasi ruang kelas PAUD Negeri	200.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemberian Honorarium Tutor Kejar Paket (SKB)	212.400.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kompetensi PTK PNF	70.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan Kegiatan PNFest	600.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan Jambore Kesetaraan	30.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pemberian Hibah Anak Tidak Sekolah (ATS)	200.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Aplikasi Jelajah Kursus Solo (JKS)	30.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Penyaluran BOP Kesetaraan	4.265.600.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Penyaluran BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Meubelair SKB Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Meubelair SKB	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Non Formal	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pelaksanaan Pendampingan BOP Kesetaraan	50.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendampingan Pencegahan Perundungan Kekerasan	25.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	100.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pelaksanaan Assesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	30.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik(TKA)	30.000.000,00
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup	165.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan Gedung SKB	210.000.000,00
	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Batik	40.000.000,00
	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Bimbingan Teknis Penyusunan Model Pembelajaran Muatan Lokal	35.000.000,00
	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Penyusunan Model - Model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Dasar	65.000.000,00
	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Model - Model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	55.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	100.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Aplikasi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah	300.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Apresiasi GTK	85.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembayaran Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	5.000.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembayaran Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	4.000.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembayaran Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	250.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembayaran Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	7.000.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembayaran Jasa Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	35.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembayaran Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Satuan Pendidikan	8.000.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pengawas Sekolah	30.000.000,00
	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah	60.000.000,00
	1.01.05 Pogram Pengembangan Perizinan Pendidikan	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengusulan Perizinan Pendidikan Dasar	35.000.000,00
	1.01.05 Pogram Pengembangan Perizinan Pendidikan	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pemantauan dan Pengawasan Pengusulan Perizinan Pendidikan Dasar	35.000.000,00
	1.01.05 Pogram Pengembangan Perizinan Pendidikan	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sistem Informasi Pengusulan Perizinan	55.000.000,00
	1.01.05 Pogram Pengembangan Perizinan Pendidikan	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pemantauan dan Pengawasan Pengusulan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal	35.000.000,00
	1.01.06 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Diseminasi Model Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah	100.000.000,00
	1.01.06 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Festival Tunas Bahasa Ibu	500.000.000,00

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU
	1.01.06 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan Komunitas Literasi Bahasa dan Sastra Jawa	60.000.000,00
					615.838.099.361,00

LAMPIRAN

1. PK Perubahan Tahun 2025 (PK kepala OPD scan berasman)
2. Download Capaian Kinerja eSAKIP yang telah di asman kepala OPD
(Triwulan 1 - 4, di *download* per triwulan)